PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BUKU 1

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

BUKU I

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, pergeseran, perubahan atau pergeseran anggaran, penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 3A

   Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 terdiri dari:

   a. Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

      BAB I : PENDAHULUAN;

      BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023;

      BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

      BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

      BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

      BAB VI : PENUTUP;

   b. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 4

   Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 25 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

REVISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 25

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel..... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-1
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023..... II-1
2.1.1 Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama II-3
2.1.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-4
2.1.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing II-6
2.1.4 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah pada RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-7
2.1.5 Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Pelayanan Dasar) II-11
2.1.5.1. Pendidikan II-11
2.1.5.2. Kesehatan II-13
2.1.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-15
2.1.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... II-17
2.1.5.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-19
2.1.5.6. Sosial II-20

2.1.6. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar) II-22
2.1.6.1. Tenaga Kerja II-22
2.1.6.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-23
2.1.6.3. Pangan II-24
2.1.6.4. Pertanahan..... II-25
2.1.6.5. Lingkungan Hidup..... II-25
2.1.6.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-27
2.1.6.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-29
2.1.6.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... II-30
2.1.6.9. Perhubungan..... II-31
2.1.6.10. Komunikasi dan Informatika II-31
2.1.6.11. Koperasi dan UKM..... II-33
2.1.6.12. Penanaman Modal..... II-34
2.1.6.13. Kepemudaan dan Olahraga II-36
2.1.6.14. Statistik..... II-37
2.1.6.15. Persandian II-38
2.1.6.16. Kebudayaan II-39
2.1.6.17. Perpustakaan II-40
2.1.6.18. Kearsipan II-40

2.1.7. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan) II-41
2.1.7.1. Kelautan dan Perikanan II-41
2.1.7.2. Pariwisata..... II-42
2.1.7.3. Pertanian..... II-43
2.1.7.4. Kehutanan II-44

2.1.7.5. Energi dan Sumber Daya Mineral II-44
2.1.7.6. Perdagangan II-45
2.1.7.7. Perindustrian II-47
2.1.7.8. Transmigrasi II-48

2.1.8. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) II-49
2.1.8.1. Sekretariat Daerah II-49
2.1.8.2. Sekretariat DPRD II-52

2.1.9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan) II-53
2.1.9.1. Perencanaan II-53
2.1.9.2. Keuangan II-54
2.1.9.3. Kepegawaian II-55
2.1.9.4. Pendidikan dan Pelatihan II-57
2.1.9.5. Penelitian dan Pengembangan II-58

2.1.10. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan) II-58
2.1.10.1. Inspektorat Daerah II-58

2.1.11. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Kewilayahan) II-60
2.1.11.1. Kecamatan II-60

2.1.12. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Pemerintahan Umum) II-61
2.1.12.1. Kesatuan Bangsa dan Politik II-61

2.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sampai Triwulan II Tahun 2023.. II-61

2.3. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-62

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah II-64
2.4.1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-64
2.4.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-65
2.4.3. Urusan Pilihan II-69
2.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-71
2.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-72
2.4.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-73
2.4.7. Unsur Kewilayahan II-73
2.4.8. Unsur Pemerintahan Umum II-74

2.5. Isu Strategis II-74

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Gambaran Ekonomi Makro Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional III-1
3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah III-3
3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus III-5

3.2. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah III-10

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1. Prioritas Pembanguna Daerah IV-4

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023 ..... V-1

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 ..... V-2
5.2.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar V-3
5.2.1.1 Pendidikan V-3
5.2.1.2 Kesehatan V-4
5.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V-7
5.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman V-8
5.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat V-9
5.2.1.6 Sosial V-10

5.2.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar V-11
5.2.2.1 Tenaga Kerja V-11
5.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V-12
5.2.2.3 Pangan V-13
5.2.2.4 Pertanahan V-14
5.2.2.5 Lingkungan Hidup V-14
5.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil V-16
5.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa V-16
5.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V-18
5.2.2.9 Perhubungan V-19
5.2.2.10 Komunikasi dan Informatika V-19
5.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah V-20
5.2.2.12 Penanaman Modal V-20
5.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga V-21
5.2.2.14 Statistik V-21
5.2.2.15 Persandian V-22
5.2.2.16 Kebudayaan V-22
5.2.2.17 Perpustakaan V-22
5.2.2.18 Kearsipan V-23

5.2.3 Urusan Pilihan V-23
5.2.3.1 Kelautan dan Perikanan V-23
5.2.3.2 Pariwisata V-23
5.2.3.3 Pertanian V-24
5.2.3.4 Kehutanan V-24
5.2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral V-25
5.2.3.6 Perdagangan V-25
5.2.3.7 Perindustrian V-26
5.2.3.8 Transmigrasi V-26

5.2.4 Fungsi Pendukung V-26
5.2.4.1 Sekretariat Daerah V-26
5.2.4.2 Sekretariat DPRD V-27

5.2.5 Fungsi Penunjang V-28
5.2.5.1 Perencanaan V-28
5.2.5.2 Keuangan V-29
5.2.5.3 Kepegawaian V-29
5.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan V-30
5.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan V-30

5.2.6 Unsur Pengawasan V-31
5.2.6.1 Inspektorat V-31

5.2.7 Unsur Kewilayahan V-32
5.2.7.1 Kecamatan V-32

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum V-33
5.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik V-33

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-3
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam RKPD Tahun 2023 sd Triwulan II Tahun 2023 ..... II-5
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing Masyarakat dalam RKPD Tahun 2023 sd Triwulan II Tahun 2023 ..... II-6
Tabel 2.4 Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-7
Tabel 2.5 Rata-rata Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-7
Tabel 2.6 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-8
Tabel 2.7 Rekapitulasi Predikat Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-9
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan II-11
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan II-13
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-16
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-18
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-19
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Sosial II-21
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja II-22
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-23
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Pangan II-24
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan II-25
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup II-26
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-28
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-29
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-30
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan II-32
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika II-33
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM II-34
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal II-35
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-37
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Statistik II-37
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Persandian II-38
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan II-39
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan II-40
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan II-41
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan II-42
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata II-42
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Pertanian II-43
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan II-44
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan ESDM II-45
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan II-46
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian II-47
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi II-48
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah II-49
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD II-52
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan II-53
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan II-54
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian II-55
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan II-57

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan..... II-58
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah..... II-59
Tabel 2.48 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan..... II-60
Tabel 2.49 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik II-61
Tabel 2.50 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... II-62
Tabel 2.51 Rata-Rata Capaian Kinerja Evaluasi Terhadap Renja PD Tahun 2023 s.d Triwulan II Tahun 2023..... II-63
Tabel 2.52 Identifikasi Isu Kabupaten Terhadap Isu Regional Dan Isu Nasional. II-75
Tabel 3.1 Proyeksi indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023..... III-5
Tabel 3.2 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... III-5
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022..... III-6
Tabel 3.4 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022..... III-7
Tabel 3.5 Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022..... III-8
Tabel 3.6 Nilai Inflasi Kabupaten Kudus,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional... III-9
Tabel 3.7 Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2023..... III-11
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 III-14
Tabel 3.9 Target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... III-16
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun 2023..... III-16
Tabel 3.11 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023..... III-21
Tabel 3.12 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023..... III-22

Tabel 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional..... IV-1
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 ..... IV-4
Tabel 4.3 Konsistensi Keselarasan Program Pembangunan Daerah IV-8
Tabel 4.4 Keselarasan Program Prioritas dengan Sasaran Daerah IV-21
Tabel 4.5 Keselarasan Program Prioritas dengan Prioritas Pembangunan IV-29
Tabel 4.6 Rumusan dan Target Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (Tingkat Program)..... IV-41
Tabel 4.7 Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 ..... IV-53
Tabel 4.8 Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang ditolak pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 ..... IV-69

Tabel 5.1 Struktur Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 ..... V-1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kudus untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan mengakomodasi perubahan aturan, dinamika kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2023, perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, penyesuaian prioritas daerah, serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional tahun 2023, disertai perubahan/pergeseran anggaran, penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 27).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan

APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

Secara substansi, Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional, RPJMD Kabupaten Kudus, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, seperti SPM, SDGs, reformasi birokrasi dan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan mendasarkan evaluasi Triwulan II Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan pedoman penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah;
2. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta program kegiatan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan
4. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 serta penyesuaian pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Buku I, Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD dan alasan yang mendasari Perubahan RKPD.

1.2 Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen
Memuat hubungan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan
Mengemukakan kegunaan dokumen Perubahan RKPD dalam proses perencanaan pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Mengemukakan sistematika perubahan RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2023 baik fisik maupun keuangan dibandingkan target RKPD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memberikan uraian ringkas tentang asumsi-asumsi ekonomi makro, pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang mengalami perubahan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan sinkronisasi sasaran dan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2023 terhadap sasaran dan prioritas yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan perencanaan program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan kebutuhan yang memuat kegiatan yang mengalami pergeseran, penghapusan dan penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

2. Buku II, Lampiran terdiri dari:

I. Capaian Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023.

II. Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023

Secara umum evaluasi atas pelaksanaan RKPD dapat dijelaskan bahwa, Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 menyelenggarakan urusan pemerintahan pada APBD tahun 2023 sebanyak 220 program dengan 498 kegiatan, sedangkan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023, jumlah program dan kegiatan sebanyak 220 program dengan 501 kegiatan.

Perbedaan pada jumlah kegiatan di RKPD dan APBD sebanyak 3 (tiga) kegiatan karena merupakan Kegiatan DAK Non Fisik yang tidak tercantum dalam RKPD Tahun 2023. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); dan
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

2.1. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PADA RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Metode Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah data yang berasal dari Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus.

b. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelompokan data dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penilaian kinerja atas indikator kinerja pembangunan daerah. Penilaian dilakukan dengan cara melihat kondisi capaian kinerja RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan Target RKPD Tahun 2023.

c. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah sebagai berikut:

1. menunjukkan capaian target RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
2. membandingkan kondisi Realisasi pada RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan Target RKPD Tahun 2023;
3. melakukan analisa terhadap hasil capaian kinerja indikator pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dijadikan bahan percepatan pencapaian target RKPD Tahun 2023.

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023, yang terbagi atas kelompok urusan waijb, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dinyatakan dalam status sebagai berikut:

- untuk capaian kinerja terhadap target RKPD yang Tercapai lebih dari 100% (> 100%).
- untuk capaian kinerja terhadap target RKPD yang Akan tercapai (25%≤99%).
- untuk capaian kinerja terhadap target RKPD yang Perlu Upaya Keras (<25%).
- NA untuk capaian indikator *Not Available* yaitu indikator yang belum ada informasi data dari Perangkat Daerah atau belum ada rilis resmi dari yang berkompeten.

Sedangkan rata-rata capaian kinerja dari capaian kinerja pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dikategorikan dalam predikat kinerja, yaitu:

- Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja di atas 46,00 % (X ≥ 46,00%).
- Tinggi, untuk capaian kinerja diatas 38,00% sampai dengan 45,00% (45,00% ≥ X >38,00%).
- Sedang, untuk capaian kinerja diatas 33,00% sampai dengan 37,00% (37,00% ≥ X >33,00%).
- Rendah, untuk capaian kinerja diatas 26,00% sampai dengan 32,00% (32,% ≥ X >26,00%).
- Sangat Rendah, untuk capaian kinerja sama atau kurang dari 25,00% (X ≤ 25,00%).

Selain itu digambarkan dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja.
b) Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal penilaian kinerja (cukup).
c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kudus pada RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek daya saing, urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya, sebagai berikut :

2.1.1. Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus
dalam RKPD Tahun 2023 sd Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,48	74,94	75	75,16	75,89	76,48	76,48	100	●	Disdkpora
2	Harapan lama sekolah	14,9	13,22	13,23	13,24	13,25	14,9	14,9	100	●	Disdikpora
3	Rata-rata lama sekolah	9,2	8,63	8,75	8,76	9,06	9,2	9,2	100	●	Disdikpora
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	88	87,59	90,63	81,97	90,43	88	88	100	●	Disdikpora
5	Angka Harapan Hidup	76,54	76,50	76,6	76,68	76,76	76,54	76,76	100,29	●	Dinas Kesehatan
6	Angka Kematian Ibu	52,78	86,74	101,57	150,95	88,24	52,78	86,81	35,52	▶	Dinas Kesehatan
7	Angka Kematian Bayi	6,9	8,20	8,26	6,75	5,96	6,9	7,47	91,74	▶	Dinas Kesehatan
8	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	11.413,19	11.318	11.160	11.272	11.609,00	11.413,19	11.609,00	101,72	●	Bappeda
9	Indeks Reformasi Birokrasi	90	59,35	67,26	67,52	69,21	90	69,21	76,90	▶	Bagian Organisasi
10	Nilai akuntabilitas kinerja	83	66,36	68,93	69,45	71,13	83	71,13	85,70	▶	Bagian Organisasi
11	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	●	BPPKAD
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87	2,73	3,08	2,53	3,38	2,87	3,38	117,77	●	Dinas Kominfo
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	82,45	86,81	86,88	88,31	85	85,93	101,09	●	Bagian Organisasi
14	Angka kriminalita	0,013	0,01	0,015	0,011	0,019	0,013	0,010	123,08	●	Satpol PP

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	s										
15	Indeks rasa aman	0,53	0,54	0,55	0,44	0,86	0,53	0,97	183,02	●	Kesbangpol
16	Indeks Toleransi	100	100%	91,7%	91,7%	100	100	88,98	88,98	▶	Kesbangpol
17	Pertumbuhan Ekonomi	3,16	3,10	-3,11	-1,98	2,23	3,16	2,23	70,70	▶	Bappeda /BPS
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	5,67	5,66	-5,26	4,63	6,86	5,67	6,86	120,90	●	Bappeda /BPS
18	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	144,87	126,84	123,89	126,95	133,88	144,87	133,88	92,41	▶	Bappeda /BPS
19	Angka kemiskinan	5,9	6,68	7,31	7,6	7,41	5,9	7,41	74,41	▶	Bappeda /BPS
20	Angka pengangguran	2,9	3,86	5,53	3,77	3,21	2,9	3,21	89,31	▶	Disnaker inkop UKM
21	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	9,19	5,87	3,26	39,43	10,19	9,19	5,01	54,52	▶	DMPTSP
22	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	83,73	81,29	83,20	83,60	84,85	83,73	84,85	101,34	●	Dinas PUPR
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,77	63,75	64,20	62,76	54,88	67,77	54,88	80,98	▶	Dinas PKPLH
	Rata-rata capaian kinerja (%)								94,33		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● : Tercapai lebih dari 100% *▶ : Akan tercapai (20 %≤99%)* *▼ : Perlu Upaya Keras (<20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 23 indikator dengan rata-rata kinerja sebesar 94,33 persen. Capaian IKU Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 12 indikator atau 52,17 persen telah tercapai, dan 11 indikator atau 47,83 persen akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

2.1.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam RKPD Tahun 2023
sd Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,48	74,94	75	75,16	75,89	76,48	76,48	100	●	Disdikpora
2	Harapan lama sekolah	14,9	13,22	13,23	13,24	13,25	14,9	14,9	100	●	Disdikpora
3	Rata-rata lama sekolah	9,2	8,63	8,75	8,76	9,06	9,2	9,2	100	●	Disdikpora
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	88	87,59	90,63	81,97	90,43	88	88	100	●	Disdikpora
5	Angka Harapan Hidup	76,54	76,50	76,6	76,68	76,76	76,54	76,76	100,29	●	Dinas Kesehatan
6	Pertumbuhan PDRB	3,16	3,10	-3,11	-1,98	2,23	3,16	2,23	70,70	▶	Bappeda/ BPS
	Pertumbuhan Ekonomi (tanpa industri pengolah-an tembakau)	5,67	5,66	-6,67	4,63	6,85	5,67	6,86	120,90	●	Bappeda/ BPS
7	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	144,87	126,84	123,89	126,95	133,88	144,87	133,88	92,41	▶	Bappeda/ BPS
8	Angka kemiskinan	5,9	6,68	7,31	7,6	7,41	5,9	7,41	74,41	▶	Bappeda/ BPS
9	Angka pengangguran	2,9	3,86	5,53	3,77	3,21	2,9	3,21	89,31	▶	Disnakerinkop UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)								91,90		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 %≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat berjumlah 9 indikator, dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator atau 55,56 persen telah tercapai, dan 4 indikator atau 44,44 persen akan tercapai.

2.1.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Aspek Daya Saing dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing Masyarakat dalam RKPD Tahun 2023 sd Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	11.413,19	11.318	11.160	11.272	11.609,00	11.413,19	11.609,00	101,72	●	Bappeda/ BPS
2	Indeks Reformasi Birokrasi	90	59,35	67,26	67,52	69,21	90	69,21	76,90	▶	Bag. Organisasi
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87	2,73	3,08	2,53	3,38	2,87	3,38	117,77	●	Dinas Kominfo
4	Angka kriminalitas	0,013	0,01	0,015	0,011	0,019	0,013	0,010	123,08	●	Satpol PP
5	Indeks rasa aman	0,53	0,54	0,55	0,44	0,86	0,53	0,97	183,02	●	Satpol PP
6	Indeks Toleransi	100	100 %	91,7 %	91,7 %	100	100	88,98	88,98	▶	Kesbang pol
7	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	9,19	5,87	3,26	39,43	10,19 T	9,19	5,01	54,52	▶	DMPTSP
8	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	83,73	81,29	83,20	83,60	84,85	83,73	84,85	101,34	●	PUPR
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,77	63,75	64,20	62,76	54,88	67,77	54,88	80,98	▶	PKPLH
	Rata-rata capaian kinerja (%)								103,15		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● : Tercapai lebih dari 100% ▶ : Akan tercapai (20 %≤99%) ▼ : Perlu Upaya Keras (<20%)
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Aspek Daya Saing berjumlah 9 indikator, dengan capaian kinerja sebanyak 5

indikator atau 55,56 persen telah tercapai, dan 4 indikator atau 44,44 persen akan tercapai.

2.1.4. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah pada RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Kudus pada RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, maka status pencapaian indikator terhadap capaian RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dari 159 indikator kinerja pembangunan sebanyak 57 indikator atau 35,85% berstatus tercapai; 90 indikator atau 56,60% berstatus akan tercapai; 9 indikator atau 5,66% perlu upaya keras, dan 3 indikator atau 1,89% telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan rata-rata capaian kinerja urusan terhadap capaian RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dari 42 urusan dapat dikategorikan 37 urusan atau 88,1% berpredikat kinerja sangat tinggi, 1 urusan atau 2,4% berpredikat tinggi, 0 urusan atau 0% berpredikat sedang, 0 urusan atau 0% berpredikat rendah dan 4 urusan atau 9,5% berpredikat sangat rendah, sebagaimana tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Status	**Jumlah Indikator**	**Persentase**
Telah Tercapai	57	35,85
Akan Tercapai	90	56,60
Perlu Upaya Keras	9	5,66
Telah selesai tahun 2019	3	1,89
Total	**159**	**100**

Tabel 2.5
Rata-rata Capaian Indikator terhadap Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Predikat Kinerja	Jumlah Urusan	Persentase
Sangat Tinggi	37	88,1
Tinggi	1	2,4
Sedang	0	0
Rendah	0	0
Sangat Rendah	4	9,5
Total	**42**	**100**

Tabel 2.6
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2023
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			TELAH SELESAI TAHUN 2019
			TELAH TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU UPAYA KERAS	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	Pendididkan	15	5	10	0	0
2	Kesehatan	10	1	8	0	1
3	PUPR	8	5	3	0	0
4	Perumahan rakyat & kawasan permukiman	3	2	1	0	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7	5	1	1	0
6	Sosial	5	3	2	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0
1	Tenaga Kerja	2	1	1	0	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	3	1	0	0
3	Pangan	3	2	1	0	0
4	Pertanahan	1	1	0	0	0
5	Lingkungan Hidup	7	1	6	0	0
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	0	3	0	0
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	1	2	0	0
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	0	3	0	0
9	Perhubungan	3	2	0	0	1
10	Komunikasi dan Informatika	4	3	1	0	0
11	Koperasi dan UKM	2	0	2	0	0
12	Penanaman Modal	4	2	2	0	0
13	Kepemudaan dan Olahraga	2	2	0	0	0
14	Statistik	1	0	0	1	0
15	Persandian	1	0	0	1	0
16	Kebudayaan	2	1	1	0	0
17	Perpustakaan	2	0	1	1	0
18	Kearsipan	1	0	1	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					0
1	Kelautan dan Perikanan	1	0	1	0	0
2	Pariwisata	3	2	0	1	0
3	Pertanian	2	0	2	0	0
4	Kehutanan	1	1	0	0	0
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	0	1	0

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			TELAH SELESAI TAHUN 2019
			TELAH TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU UPAYA KERAS	
6	Perdagangan	5	0	5	0	0
7	Perindustrian	1	0	1	0	0
8	Transmigrasi	1	1	0	0	0
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					0
1	Sekretariat Daerah	16	1	14	1	0
2	Sekretariat DPRD	2	0	2	0	0
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Perencanaan	5	4	1	0	0
2	Keuangan	5	2	3	0	0
3	Kepegawaian	4	0	4	0	0
4	Pendidikan dan Pelatihan	2	0	1	1	0
5	Penelitian dan Pengembangan	1	0	1	0	0
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Inspektorat Daerah	8	3	4	1	0
	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	Kecamatan	1	0	1	0	0
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	4	3	0	0	1
	JUMLAH	**159**	**57**	**90**	**9**	**3**
	Persentase	**100**	**35,85**	**56,60**	**5,66**	**1,89**

Tabel 2.7
Rekapitulasi Predikat Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PREDIKAT KINERJA				
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	Pendididkan	V	-	-	-	-
2	Kesehatan	V	-	-	-	-
3	PUPR	V	-	-	-	-
4	Perumahan rakyat & kawasan permukiman	V	-	-	-	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	V	-	-	-	-
6	Sosial	V	-	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PREDIKAT KINERJA				
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
1	Tenaga Kerja	V	-	-	-	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	V	-	-	-	-
3	Pangan	V	-	-	-	-
4	Pertanahan	V	-	-	-	-
5	Lingkungan Hidup	V	-	-	-	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	-	-	-	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	-	-	-	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V	-	-	-	-
9	Perhubungan	V	-	-	-	-
10	Komunikasi dan Informatika	V	-	-	-	-
11	Koperasi dan UKM	V	-	-	-	-
12	Penanaman Modal	V	-	-	-	-
13	Kepemudaan dan Olahraga	V	-	-	-	-
14	Statistik	-	-	-	-	V
15	Persandian	-	-	-	-	V
16	Kebudayaan	V	-	-	-	-
17	Perpustakaan	V	-	-	-	-
18	Kearsipan	V	-	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
1	Kelautan dan Perikanan	V	-	-	-	-
2	Pariwisata	V	-	-	-	-
3	Pertanian	V	-	-	-	-
4	Kehutanan	V	-	-	-	-
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	V
6	Perdagangan	V	-	-	-	-
7	Perindustrian	V	-	-	-	-
8	Transmigrasi	V	-	-	-	-
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Sekretariat Daerah	V	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	-	V	-	-	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Perencanaan	V	-	-	-	-
2	Keuangan	V	-	-	-	-
3	Kepegawaian	V	-	-	-	-
4	Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	V
5	Penelitian dan Pengembangan	V	-	-	-	-
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Inspektorat Daerah	V	-	-	-	-
	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	Kecamatan	V	-	-	-	-
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	V	-	-	-	-
	JUMLAH	**37**	**1**	**0**	**0**	**4**
	Persentase	**88,1%**	**2,4%**	**0,0%**	**0,0%**	**9,5%**

Adapun hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Kudus pada RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, maka status pencapaian indikator terhadap capaian RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagai berikut.

2.1.5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

2.1.5.1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 15 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PENDIDIKAN										
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	101,87 %	99,15%	98,67%	110,17%	101,53 %	101,80%	101,00 %	99,21	▶	Disdikpora
2.	APK SMP/MTs	115,49 %	115,51%	116,08%	105,37%	109,70 %	114,75%	114,00 %	99,39	▶	Disdikpora
3.	APM SD/MI/Paket A	99,83%	88,61%	86,17%	99,29%	97,21 %	99,83 %	99,00 %	99,19	▶	Disdikpora
4.	APM SMP/MTs/Paket B	97,97%	86,21%	76,67%	82,08%	100,57 %	97,97 %	97,97 %	100	●	Disdikpora
5.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	103,19 %	100,78%	104,05%	103,34%	97,40 %	103,19%	103,0 %	99,82	▶	Disdikpora
6.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	102,27 %	120,81%	78,06%	117,77%	110,57 %	102,27%	102,0 %	99,74	▶	Disdikpora
7.	Persentase sekolah terakreditasi A	74,36%	74,69%	80,42%	73,32%	73,50 %	74,36 %	74,0 %	99,52	▶	Disdikpora
8.	APK PAUD	90,00%	76,01%	102,86%	118,59%	94,18 %	90,00 %	90%	100	●	Disdikpora
9.	APK pendidikan kesetaraan	1,42%	2,14 %	2,20%	1,56%	22,85 %	1,42 %	1,42 %	100	●	Disdikpora
10.	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisibaik	95,28%	95,93%	94,52%	96,24%	97,17 %	95,28 %	95%	99,71	▶	Disdikpora
11.	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	92,09%	95,40%	92,03%	89,74%	92,30 %	92,09 %	95%	103,16	●	Disdikpora
12.	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	70,06%	62,14%	57,67%	75%	59,40 %	70,06 %	70.00 %	99,91	▶	Disdikpora

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	38,00%	36,14%	24,56%	24,16%	52,89 %	38,00%	38,00%	100	●	Disdikpora
14.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	95,52%	65,89%	100%	87,89%	96,74 %	95,52%	95,0 %	99,46	▶	Disdikpora
15.	Persentase pendidik dan tenagakependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	95,10%	90,96%	99,88%	91,74%	88,00 %	95,10%	95.0 %	99,89	▶	Disdikpora
	Rata-rata capaian kinerja (%)								99,94		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pendidikan pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 15 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai, dan 10 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu Persentase sarpras Pendidikan non formal dalam kondisi baik karena jumlah sarpras pendidikan non formal sudah hampir keseluruhan dalam kondisi yang baik.

Indikator yang telah mencapai angka lebih dari 100% adalah APM SMP/MTs , APK PAUD, APK Pendidikan Kesetaraan, Presentase Sarpras pendidikan dalam Kondisi Baik, dan Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik. Untuk indikator APM SMP/MTs dapat mencapai angka 100% disebabkan sekolah menengah pertama dan MTs di Kabupaten Kudus dengan jumlah 50 sekolah telah terakreditasi seluruhnya, sehingga minat masyarakat dan kemauan masyarakat untuk melanjutkan sekolah cukup tinggi. Pada indikator APK PAUD dan APK Pendidikan Kesetaraan karena semakin tingginya kesadaran orang tua mengenai Pendidikan usia dini sehingga rentang usia siswa PAUD semakin lebar dan jumlah siswa PAUD semakin meningkat. Indikator APK Kesetaraan juga meningkat karena adanya peningkatan akses pendidikan kesetaraan. Untuk indicator Persentase Pendidik, non formal yang bersertifikasi pendidik karena para pendidik pendidikan non formal ini kebanyakan sudah mulai bersertifikasi pendidik.

Untuk indikator yang akan tercapai, dengan capaian sampai Triwulan II telah menunjukkan kinerja lebih dari 90%, sehingga optimis akan mencapai target pada akhir tahun 2023.

2.1.5.2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	KESEHATAN										
1.	Angka Kematian Ibu	52,78	72,90	101,57	150,95	88,24	52,78	86,81	35,52	▶	Dinas Kesehatan
2.	Angka Kematian Bayi	6,9	8,15	8,26	6,75	5,96	6,9	7,47	91,74	▶	Dinas Kesehatan
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	18,60%	8,09 %	4,71%	4,5%	19%	18,60%	6,3%	166,13	●	Dinas Kesehatan
4.	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	96,8 %	89,70	94,60%	95,4 %	100 %	40,64%	40,64	▶	Dinas Kesehatan
5.	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	69,6 %	93,05	91,54%	72,94%	100 %	42,58%	42,58	▶	Dinas Kesehatan
6.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	99%	99,00	96,25%	100 %	100 %	48%	48	▶	Dinas Kesehatan
7.	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92,7%	97,65 %	94,58	96,10%	96,73%	92,7 %	71,33%	76,95	▶	Dinas Kesehatan
8.	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	73,66%	100,00%	-	-	-	-	-	-		RSUD dr. Loekmonohadi
9.	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100%	95,7 %	100%	96,15	86,78%	100 %	44,23%	44,23%	▶	RSUD dr. Loekmonohadi
10.	Cakupan pelayanan BLUD	100%	98,5 %	93,33%	96,72	165,48%	100 %	56,08%	56,08%	▶	RSUD dr. Loekmonohadi
	Rata-rata capaian kinerja (%)								55,84		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*

Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan kesehatan pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 10 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 8 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah melebihi target yaitu prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun disebabkan Upaya penanganan terhadap stunting telah dioptimalkan dan mendapat dukungan CSR dari dunia usaha.

Masalah Angka Kematian Ibu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan antenatal (masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan. Upaya pencegahan kematian ibu yang sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan antara lain: a) peningkatan SDM kesehatan (sosialisasi deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi); b) peningkatan pelayanan kesehatan (Audit Maternal Perinatal, review deteksi dini ibu hamil berisiko; c) kemitraan lintas sektor dan lintas program; d) pemantapan sistem rujukan (aplikasi Si Bulan); e) pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jempesal); f) promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan; serta g) peningkatan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah untuk menjamin bahwa setiap masyarakat mendapat akses obat yang terjangkau serta mendapat fasilitas pendukung sesuai tingkatan penyakitnya.

Angka Kematian Bayi merupakan dampak dari tingginya ibu hamil risiko tinggi. Penyebab kematian bayi antara lain karena kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. Kasus yang lain adalah asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), dan kelainan kongenital juga masih cukup tinggi di Kabupaten Kudus. Upaya yang telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan antara lain: a) keterpaduan lintas program yaitu dengan program pengendalian penyakit menular melalui imunisasi pada bayi; b) perbaikan gizi masyarakat melalui pemberian PMT pada ibu hamil serta peningkatan konsumsi tablet besi (Fe); serta c) peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 40,64%, terdiri dari lima (5) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (38,82%), persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (40,32%), presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (40,78%), presentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (36,6%) dan presentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (46,68%).

Cakupan pelayanan pengendalian penyakit sebesar 42,58%, terdiri dari tujuh (7) indikator yaitu persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (39,38%), presentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (13,16%), presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (41,31%), presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (58,06%), presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (69,91%), presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (41,26%), dan presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (35%). Masih rendahnya capaian indikator terutama indiaktor SPM karena belum maksimalnya pengumpulan atau pengiriman data dari fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit.

Sedangkan cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) baru tercapai 48%, karena sasaran belum cukup usia sampai tercapai mendapatkan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Dengan peningkatkan Kerjasama lintas program dan lintas sektor diharapkan sampai dengan akhir tahun 2023 dapat tercapai UCI dan IDL sebesar 100%.

Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan sebesar 71,33% terdiri dari cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, dan cakupan pelayanan perizinan, sertifikasi dan pemetaan SDM Kesehatan. Pada akhir tahun cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan akan tercapai 100% melalui pelaksanaan pengadaan dan distribusti obat dan vaksin secara merata sesuai kebutuhan, tercukupinya anggaran untuk jaminan kesehatan, serta pelayanan terpadu untuk perizinan dan sertifikasi.

Indikator cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan terealisasi sebesar 44,23% karena masih dalam proses sehingga akan dilaksanakan percepatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan indikator cakupan pelayanan BLUD terealisasi 56,08% disebabkan jumlah kunjungan pasien di RSUD dr. Loekmonohadi sebanyak 79.327 orang dari target 141.447 orang.

2.1.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	88	84,0	85	95	95,45	88	95,45	108,47	●	PUPR
2.	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	85,00	86,3	87,64	87,90	90,02	85,00	90,02	105,91	●	PUPR
3.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	92,83	86,2	91,94	92,34	93,34	92,83	93,34	100,55	●	PUPR
4.	Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	91,07	90,5	90,17	90,17	91,06	91,07	91,06	99,99	▶	PUPR
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	66	62,0	63,03	64	65,00	66	65,00	98,48	▶	PUPR
6.	Persentase penduduk berakses air minum	100	95,8	95,37	98	98,25	100	98,25	98,25	▶	PUPR
7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	●	PUPR
8.	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100	100	100	100	100	100	100	100	●	PUPR
	Rata-rata capaian kinerja (%)								101,46		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (*20 % ≤ 99%) ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 8 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai, dan 3 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang melampaui target yaitu persentase alat-alat berat dalam kondisi baik karena dari jumlah alat berat 22 unit sebanyak 21 unit dalam keadaan baik, untuk indikator persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik karena telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap DI yang dalam kondisi rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat sehingga meningkatkan ketersediaan air irigasi. Jumlah Jaringan Irigasi Kabupaten Kudus seluas 10.295 ha, dengan kondisi baik seluas 9.268,40 ha (90,02 %), kondisi rusak ringan seluas 640 ha (6,22 %), kondisi sedang seluas 387 ha (3,76 %) dan rusak berat seluas 0 ha (0 %). Sedangkan indikator persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap karena dari panjang jalan sesuai SK jalan Kabupaten Kudus sepanjang 639,262 Km, dalam kondisi mantap sepanjang 596,6937 km dan kondisi tidak mantap sepanjang 42,5680 km.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase jumlah jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap dengan cara penanganan kondisi jembatan rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan jembatan. Jumlah Jembatan Kabupaten Kudus sebanyak 425 unit dengan kondisi baik sebanyak 181 unit (42,59%), kondisi sedang sebanyak 206 unit (48,47%) dan kondisi rusak 38 unit (8,94 %). Dan untuk indikator persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat melalui upaya menjaga kondisi drainase dalam kondisi baik antara lain pembangunan/rehabilitasi saluran drainase tuntas sampai dengan saluran pembuang, pemeliharaan saluran drainase (memperbesar *inlet* tempat masuknya air dari badan jalan, normalisasi saluran drainase, dan babat rumput di sepanjang bahu jalan) Panjang drainase Kabupaten Kudus sepanjang 592.692,25 m dengan Kondisi baik sepanjang 262.437,75 m (44,28 %), kondisi sedang sepanjang 122.810,00 m (35 %) dan Kondisi rusak sepanjang 207.444,5 m (35,00 %). Sedangkan indikator persentase penduduk berakses air minum dengan cara meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

2.1.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.	Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak	99,14%	98,97 %	99,98%	98,53%	99,98%	99,14%	99,98%	100,85	●	PKPLH
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,30%	98,05 %	96,77%	97,07%	97,20%	98,30%	97,25%	98,93	▶	PKPLH
3.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,02%	0,12 %	0,02%	0,02%	0,02 %	0,02 %	0,02%	100	●	PKPLH
	Rata-rata capaian kinerja (%)								99,93		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*

Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator kinerja yang telah melampai target yaitu indikator persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak karena adanya kontribusi desa/kel dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman (sarana prasarana jalan/jembatan, drainase, sanitasi dan air minum) dan perbaikan rumah tidak layak huni/bedah rumah.

Sedangkan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni belum dapat mencapai target disebabkan :

1. Pemilik rumah tersebut tidak masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, upaya yang telah dilakukan yaitu koordinasi dengan pemerintah desa untuk memasukkan pemilik rumah tidak layak huni ke dalam daftar DTKS Kemensos.
2. Nama sertifikat rumah yang akan diperbaiki bukan nama orang yang mengusulkan perbaikan RTLH.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai indikator tersebut melalui:

1. Meningkatkan usaha rehabilitasi RTLH melalui dana CSR atau BAZNAS.
2. Update data DTKS, sehingga warga yang belum masuk DTKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

2.1.5.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.	Cakupan penegakan perda dan perkada	85%	87%	100%	100%	100%	85%	100%	117,65	●	Satpol PP
2.	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	80%	98%	85%	89,94%	91,71 %	80%	90,48%	113,13	●	Satpol PP
3.	Rasio linmas per jumlah RT	1,34	1,36	1,36	1,36	1,36	1,34	1,36	101,49	●	Satpol PP
4.	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	86%	100%	100%	100%	100%	86%	100%	116,28	●	Satpol PP
5.	Tingkat waktu tanggap *(response time rate)*	7 menit	15 menit	10 menit	13,304 menit	15,75 menit	7 menit	20 menit	– 85,71	▼	Satpol PP
6.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	93	▶	Satpol PP
7.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	●	BPBD
	Rata-rata capaian kinerja (%)								79,41		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras , dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator tingkat waktu tanggap *(response time rate)* karena lokasi pos pemadam kebakaran yang kurang strategis dapat menjangkau lokasi terjauh di Kabupaten Kudus, kurangnya sarpras pemadam kebakaran yang sesuai standar dan masih adanya anggota yang belum mengikuti pelatihan pemadam kebakaran.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui peningkatan SDM anggota pemadam, pembentukan relawan kebakaran serta sarana prasarana yang memadai. Meskipun belum dapat mencapai target, namun telah mendekati standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 selama 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Capaian indikator yang telah melebihi taget yaitu Cakupan penegakan perda dan perkada karena telah dilaksanakan kegiatan penegakan terhadap perda/perkada sebanyak 19 kali dari jumlah aduan masyarakat sebanyak 19 kali dalam penegakan 10 perda/perkada, sehingga Cakupan penegakan perda dan perkada sebesar 100%. Indikator Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas karena telah dilaksanakan penanganan sebanyak 171 pelanggaran yang tertangani dari jumlah 189 pelanggaran, sehingga realisasi persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas sebesar 90,48%. Indikator Rasio linmas per jumlah RT karena pada Tahun 2023 jumlah linmas sebanyak 5.119 anggota sedangkan jumlah (Rukun Tetangga/RT) se Kabupaten Kudus sebanyak 3.771, sehingga Rasio linmas per jumlah RT sebesar 1,36 Orang/RT, Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten dari jumlah penanganan kebakaran yang dilaporkan sebanyak 83 kejadian dan yang tertangani 83 kejadian, sehingga Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten sebesar 100%.

Indikator Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 93% dari total 29 petugas kebakaran dengan 27 petugas kebakaran yang sudah mengikuti pelatihan khusus pemadam kebakaran dan 2 petugas yang belum mengikuti pelatihan khusus pemadam kebakaran.

2.1.5.6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	SOSIAL										
1.	Rasio PMKS	7,50%	7,87%	7,84%	9,42%	8.99 %	7,50 %	8,78%	82,93	▶	Dinsos P3AP2KB
2.	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	47%	37%	77%	79,74%	88,85 %	47%	62,99%	134,02	●	Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase penyandang disabilitas,anak terlantar,lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	5,6%	5,6%	15,68%	24.54%	16%	5,6%	31,2%	557,14	●	Dinsos P3AP2KB
4.	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	65%	65%	83%	71%	85%	65%	85%	130,77	●	Dinsos P3AP2KB
5.	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	75%	68%	82%	82,98%	90,62 %	75%	63.01%	84,01	▶	Dinsos P3AP2KB
	Rata-rata capaian kinerja (%)								197,77		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan sosial pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, dan 2 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator persentase PMKS yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar karena dari jumlah PMKS sebanyak 76.204 orang, yang telah mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar sebanyak 48.000 orang. Dan untuk indikator persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial dengan adanya regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal tentang SPM Sosial, maka capaiannya menyesuaikan dengan capaian dalam SPM sebesar 31,2% yaitu sebanyak 218 orang dari jumlah populasi sebanyak 669 orang. Sedangkan indikator persentase persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar disebabkan dari 12 jenis PSKS, PSKS yang aktif dalam menangani PMKS ada 10 jenis.

Indikator persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial, keluarga miskin yang mendapat Bantuan Pangan non tunai sebanyak 48.014 KPM dari Jumlah DTKS 76.203 RT. Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai target.

2.1.6. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar)

2.1.6.1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	TENAGA KERJA										
1.	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	50%	42%	45,53%	53,04%	47,62 %	50%	37,84%	75,68	▶	Disnaker Inkop,UKM
2.	Persentase kasus yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	●	Disnaker Inkop,UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)								87,84		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan tenaga kerja pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator persentase pencari kerja yang sudah bekerja melalui Program Penempatan Tenaga Kerja pada kegiatan peningkatan jejaring kerja dengan pemberi kerja dengan melaksanakan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja dan peningkatan pembinaan dan pemberdayaan Bursa Kerja Khusus pada satuan pendidikan menengah dan tinggi, serta meningkatkan kompetensi keterampilan kerja melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan pada UPTD Balai Latihan Kerja.

Indikator persentase kasus yang terselesaikan sudah mencapai target karena telah dilaksanakan fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan seperti pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan berupa

penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 jumlah kasus yang masuk sebanyak 9 kasus dan dapat terselesaikan dengan baik sebanyak 9 kasus.

2.1.6.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,02	62,02	62,07	65,18	65,54	63,02	65,54	104	●	Dinsos P3AP2KB
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	71,85%	71.57 %	71,64%	64,05%	63,98 %	71,85 %	66,09%	92	▶	Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase pekerja perempuan	60,97%	60,25 %	82,62%	88,73%	95,83 %	60,97 %	94,42%	154,86	●	Dinsos P3AP2KB
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penangananny a pada unit layanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	●	Dinsos P3AP2KB
	Rata-rata capaian kinerja (%)								112,72		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang melampaui target yaitu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki, semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan indikator

persentase pekerja perempuan karena dari jumlah perempuan yang bekerja sebanyak 195.048 orang dari angkatan kerja perempuan sebanyak 206.573 orang, serta dukungan minat bekerja perempuan di sektor formal dan informal.

Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan telah tercapai 100%. Dari laporan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak terdapat 13 kasus dan dapat diselesaikan di unit layanan terpadu perempuan dan anak.

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan merupakan perbandingan antara angkatan kerja perempuan sebanyak 206.573 orang dengan penduduk usia kerja perempuan sebanyak 313.337 orang. Tingkat capaiannya belum dapat mencapai target karena banyak penduduk perempuan yang memasuki usia kerja 15 – 64 tahun memilih menjadi Ibu Rumah Tangga (bukan angkatan kerja) bukan bekerja (angkatan kerja), upaya yang dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya partisipasi perempuan dalam Angkatan kerja serta mendorong penciptaan pekerjaan pekerjaan yang ramah perempuan, termasuk fleksibilitas waktu kerja, kebijakan dan lingkungan kerja yang aman dan inklusif.

2.1.6.3. Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	PANGAN										
1.	Persentase ketersediaan pangan utama	100%	100%	176,59%	161,12%	194,41%	100%	70%	70	▶	Dispertan dan pangan
2.	Persentase keamanan pangan	90%	86%	90%	93%	95%	90%	90%	100	●	Dispertan dan pangan
3.	Persentase penanganan daerah rawan pangan	100%	80%	94,44%	100%	100%	100%	100%	100	●	Dispertan dan pangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)								90		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pangan pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indicator persentase ketersediaan pangan utama dengan meningkatkan produksi pangan, pengadaan stok pangan dan koordinasi fertikal secara intensif.

2.1.6.4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PERTANAHAN										
1.	Persentase luas tanah bersertifikat	74,84%	74,75%	74,80%	79,93%	80,78%	74,84%	80,78%	107,94	●	PUPR
	Rata-rata capaian kinerja (%)								107,94		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pertanahan pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 1 indikator berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja tersebut telah melampaui target karena dari tanah seluas 42.516 ha di Kabupaten Kudus, telah bersertifikat seluas 34.344 ha. Hal tersebut disebabkan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengurus atau memperjelas status kepemilikan tanah.

2.1.6.5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Indeks kualitas air	50,85	46,00	47,22	47	43,75	50,85	43,75	86,04	▶	PKPLH
2.	Indeks kualitas udara	93,92	89,07	90,34	79,47	79,63	93,92	79,63	84,78	▶	PKPLH
3.	Indeks tutupan lahan	60,85	56,00	58,51	58,90	28,22	60,85	28,22	46,38	▶	PKPLH
4.	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50%	20%	27,90%	47,06%	48,25	50%	33,02	66,04	▶	PKPLH
5.	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	25%	9%	14,28%	17,78%	65,96	5%	65,96	1.312	●	PKPLH
6.	Persentase penanganan volume sampah	72%	88%	42,88%	77%	38,63%	72%	20,8%	28,89	▶	PKPLH
7.	Proporsi ruang terbuka hijau (RTH)	8,20%	8,15 %	8,10%	8,16%	8,1074%	8,20 %	8,107%	98,87	▶	PKPLH
	Rata-rata capaian kinerja (%)								246,14		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan lingkungan hidup pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 1 indikator tercapai, dan 6 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup karena adanya pembentukan bank sampah di desa/kelurahan, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang mulai peduli untuk mengelola sampah dari sumbernya dari tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 31 unit, dengan komunitas pecinta lingkungan hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 47 unit.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target pada indikator indeks kualitas air dan indikator indeks kualitas udara melalui optimalisasi pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi/sudah mencemari lingkungan, sosialisasi/peningkatan kapasitas tentang pelestarian lingkungan hidup dan optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan, serta memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten maupun desa/kelurahan. Sedangkan pada indikator indeks tutupan lahan dengan melakukan pemantauan perubahan tutupan lahan, pemeliharaan tutupan lahan dan penanaman pohon.

Pada indikator cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan peningkatan kuantitas pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan pada indikator persentase penanganan volume sampah melalui optimalisasi pengolahan sampah dari sumbernya, peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan sampah, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan teknologi dalam penanganan sampah di tingkat kabupaten maupun desa/kelurahan. Dan untuk mencapai target indikator proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui peningkatan luasan ruang terbuka hijau di perkotaan dan perumahan.

2.1.6.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.19

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	99,74%	99,18%	98,54%	98.97%	100 %	98,31 %	98,31%	▶	Dinas Dukcapil
2.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	100%	92,18%	95,60%	98,14%	98.49%	100 %	99,41 %	99,41%	▶	Dinas Dukcapil
3.	Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	50%	50%	▶	Dinas Dukcapil
	Rata-rata capaian kinerja (%)								82,57		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*

Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 3 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target pada indikator cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan baik dari segi sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam, penambahan titik pelayanan dan jenis pelayanan administasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik dan 9 Kecamatan, serta penambahan petugas, waktu dan tempat layanan jemput bola perekaman KTP-el di balai desa dan tempat lain yang telah ditentukan, pelayanan jemput bola Identitas Kependudukan Digital ke instansi (untuk ASN, TNI dan Polri), kecamatan, Mall Pelayanan Publik, optimalisasi Layanan Pengaduan dan Helpdesk Konsultasi di berbagai media (media massa, mediacetak, media sosial, website, call center), kolaborasi stakeholder lintas sektoral dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun melalui pelayanan jemput bola ke titik pelayanan dimana penduduk memiliki aksesibilitas, sakit, berada di lembaga pemasyarakatan, terkendala untuk hadir ke tempat pelayanan masyarakat, dan kerjasama dengan Rumah Sakit / Rumah Sakit Bersalin melalui

Program si Bulang Mahir; sedangkan indikator cakupan pengelolaan Database kependudukan melalui pengoptimalan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, khususnya pemutakhiran data kependudukan.

2.1.6.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1.	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	30%	10%	15%	30,08%	35%	30%	43%	143,33	●	Dinas PMD
2.	Persentase desa yang bermasalah	10%	50%	12%	11%	12%	10%	11,7%	83	▶	Dinas PMD
3.	Persentase peningkatan kawasan perdesaan	100%	25%	80%	100%	75%	100 %	90%	90	▶	Dinas PMD
	Rata-rata capaian kinerja (%)								105,44		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa yang melampaui target karena adanya sosialisasi, fasilitasi, pendampingan dan prospek bisnis yang cukup menjanjikan dengan berbagai kerjasama. Jumlah Lembaga Keswadayaan di Kabupaten Kudus sampai saat ini sebanyak 5.769 lembaga, yang terdiri dari 3.771 RT, 716 RW, 132 PKK, 814 Posyandu, 86 BKM, 25 Posyantekdesa, 132 Karang Taruna dan 93 BUMdes. Pada triwulan II tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah BUMDes yaitu sebanyak 93 BUMDes dari tahun 2022 sebanyak 72 BUMDes.

Pada indikator yang akan tercapai yaitu indikator persentase desa yang bermasalah karena dari 12 desa yang bermasalah telah terselesaikan 10 desa. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui pembinaan aparatur pemerintahan desa serta Bimtek keuangan dan aset desa. Sedangkan indikator persentase peningkatan kawasan perdesaan dari target 5 kawasan perdesaan telah terbentuk 4 kawasan perdesaan yaitu kawasan perdesaan industri gula tumbu, kawasan perdesaan wisata Colo, kawasan perdesaan edu wisata Patiayam dan kawasan perdesaan Kudus Heritage. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui sosialisasi dan penyusunan draft Keputusan Bupati tentang Peningkatan Kawasan Perdesaan.

2.1.6.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,01	2,01	1,89	2,10	2.08	2,01	2,11	95,02	▶	Dinsos P3AP2KB
2.	Cakupan peserta KB aktif	72,00%	70,88%	71,07%	72,62%	64,31%	72,00%	64,31%	89,32	▶	Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	14,00%	13,38%	14,35%	15,40%	10,93%	14,00%	10,93%	78,07	▶	Dinsos P3AP2KB
	Rata-rata capaian kinerja (%)								87,47		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2023, pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari 3 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya. Pada tahun 2023 dari perhitungan jumlah wanita usia subur 231.254 orang dan yang melahirkan 13.762 orang perkelompok usia (ASFR/*Age Specifik Fertility Rate*) diperoleh angka 2,11%. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui Kegiatan Promosi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Program KKBPK Melalui Media masa cetak dan elektronik serta Media luar ruang.

Pada indikator cakupan peserta KB aktif dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 128.838 PUS, yang aktif ber KB sebanyak 82.862 PUS. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target adalah :

- Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB.
- Meningkatkan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
- Meningkatkan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK.

Capaian indikator persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang dari 82.862 PUS yang aktif ber-KB hanya 9.057 PUS yang ber-KB MKJP sebesar 77,86%. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target adalah :

- Meningkatkan Advokasi Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) kepada Stakeholders dan Mitra kerja,
- Meningkatkan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

2.1.6.9 Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	PERHUBUNGAN										
1.	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	40 km/jam	34	36	37	38	40 km/jam	40 km/jam	100	●	Dinas Perhubungan
2.	Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	90%	79,84%	83,49%	86%	88%	90%	90%	100	●	Dinas Perhubungan
3.	Kontribusi retribusi perparkiran dan terminal terhadap PAD	0,019	0,019	-	-	-	-	-	-		Dinas Perhubungan
	Rata-rata capaian kinerja (%)								100		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan perhubungan pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator telah selesai pada tahun 2019, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

2.1.6.10 Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	48%	48	▶	Dinas Kominfo
2.	Kebijakan internal SPBE	3,06	1,94	3,12	2,30	3,90	3,06	3,90	127,45	●	Dinas Kominfo
3.	Tata kelola SPBE	2,43	1,43	2,43	1,90	3,00	2,43	3,00	123,46	●	Dinas Kominfo
4.	Layanan SPBE	3,03	2,55	3,39	3,49	3,82	3,03	3,82	126,07	●	Dinas Kominfo
	Rata-rata capaian kinerja (%)								106,25		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan komunikasi dan perhubungan pada Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE dan Layanan SPBE dikarenakan kemudahan koordinasi dengan perangkat daerah serta telah diterbitkannya regulasi dan pedoman evaluasi SPBE yang jelas pada masing-masng indikator penilaian membuat indeks SPBE dapat mencapai target.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media dengan melaksanakan percepatan penyelesaian program kegiatan dan mengadakan evaluasi untuk mendeteksi permasalahan sehingga dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.1.6.11 Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI	KOPERASI DAN UKM										
1.	Persentase koperasi aktif	89%	87,73%	86,33%	85,79%	88,75%	89%	49,17%	55,25	▶	Disnaker, Inkop, UKM
2.	Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah	6%	4,80 %	4,85%	5,70%	5,16 %	6%	5,04%	84	▶	Disnaker, Inkop, UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)								69,63		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan koperasi dan UKM pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator, yang seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase koperasi aktif melalui pembinaan dan pengawasan terhadap kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi para pelaku (pengurus dan pengelola) koperasi dan fasilitasi permodalan. Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mempercepat capaian kinerja indikator persentase perkembangan UMKM melalui peningkatan kualiatas SDM pelaku UMK dengan pelatihan, dukungan stimulan bantuan modal usaha dan fasilitasi dalam perijinan baik NIB, PIRT, Halal dan Hak Cipta, fasilitasi kemitraan pemasaran dengan pasar modern / retail (Indomaret), serta fasilitasi kemitraan permodalan antara UMKM dengan perbankan.

2.1.6.12 Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XII	PENANAMAN MODAL										
1.	Persentase peningkatan jumlah investor	10%	31,70%	320%	-27,76%	-34,00 %	10%	2,17%	21,7	▶	DPMPTSP
2.	Realisasi investasi yang terlaporkan	3,497 T	2,053 T	1,95T	0,73 T	1,09 T	3,497 T	0,77 T	22,02	▶	DPMPTSP
3.	Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	60%	32,44%	24,36%	75%	70,75%	60%	100%	166,67	●	DPMPTSP
4.	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80%	78%	98%	614%	86,84%	80%	100%	125	●	DPMPTSP
	Rata-rata capaian kinerja (%)								83,85		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan penanaman modal pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 4 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Jumlah investor sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 2.962 investor sedangkan jumlah investor tahun 2022 sebesar 2.899. Persentase peningkatan jumlah investor dihitung dengan mengurangkan jumlah investor tahun 2023 sebesar 2.962 dengan jumlah investor di tahun 2022 sebesar 2.899 dibagi dengan jumlah investor tahun 2022 dikalikan 100% sehingga didapat nilai 2,17%. Jumlah investor di triwulan II tahun 2023 sudah melampaui jumlah investor di triwulan IV tahun 2022 dan diharapkan pada akhir tahun 2023 bisa mencapai target kenaikan investor sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena Iklim investasi yang mulai kondusif di tahun 2023 sehingga mendorong minat investor untuk berinvestasi. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target peningkatan jumlah investor adalah dengan melaksanakan sosialiasi perizinan OSS dan pendampingan pemrosesan perizinan dengan OSS secara lebih intensif.

Realisasi investasi yang terlaporkan pada triwulan II Tahun 2023 terealisasi sebesar 0,77 Trilyun dengan target 3,497 trilyun atau sebesar 22,02%. Realisasi investasi ini merupakan penjumlahan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I yang dikeluarkan oleh BKPM pada bulan April 2023 ditambah dengan realisasi investasi perusahaan skala mikro sampai dengan bulan Juni 2023. Sedangkan realisasi Investasi dari LKPM triwulan II baru akan dikeluarkan oleh BKPM di Bulan Juli 2023. Faktor penyebab masih rendahnya realisasi investasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 karena kewenangan di tingkat kabupaten untuk pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) hanya terbatas untuk usaha kecil sedangkan perusahaan berskala menengah menjadi kewenangan provinsi dan perusahaan skala besar menjadi kewenangan BKPM. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi adalah mengoptimalkan kegiatan pendampingan pelaporan LKPM ke perusahaan kecil, menengah dan besar. Untuk realisasi investasi perusahaan skala menengah dan besar perlu berkoordinasi ke provinsi dan BKPM agar realisasi investasinya dapat diverifikasi sehingga dapat menambah jumlah realisasi investasi di Kabupaten Kudus.

Realisasi dari indikator persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standard pelayanan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar 100% dari targetnya 60%. Sedangkan realisasi dari indikator persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan sebesar 100% dari target 80%. Faktor pendorong pencapaian kinerja yang telah melampaui target karena penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) memudahkan pelaku usaha untuk mengakses dan melakukan perizinan secara online. DPMPTSP Kabupaten Kudus juga telah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pemegang hak akses perizinan agar dapat melakukan tugasnya sebagai OPD teknis untuk memverifikasi persyaratan teknis yang dibutuhkan sehingga perizinan yang terbit dapat sesuai dengan standar pelayanan.

2.1.6.13 Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	96,96%	96,43 %	81,00%	100%	100 %	96,96%	96,96%	100	●	Disdikpora
2.	Cakupan pembinaan olahraga	92,00%	92,00 %	91,77%	92%	92,30%	92,00%	92,00%	100	●	Disdikpora
	Rata-rata capaian kinerja (%)								100		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

2.1.6.14 Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada table berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIV	STATISTIK										
1.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	0%	0	▼	Dinas Kominfo
	Rata-rata capaian kinerja (%)								0		
	Predikat kinerja								Sangat Rendah		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan statistik pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator yang berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Penyebab capaian yang perlu upaya keras karena kesulitan dalam pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing Perangkat Daerah. Upaya yang akan dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Kudus sekaligus

mensosialisakan Peraturan Bupati Kudus nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus, yang di dalamnya disebutkan bahwa setiap Perangkat adalah Produsen Data merangkap sebagai walidata pendukung. Tugas Produsen data adalah menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Kab. Kudus, serta menyampaikan data kepala walidata (Dinas Kominfo) beserta metadata yang melekat pads Data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan walidata pendukung adalah sekretaris/pejabat administrator yang membidangi kesekretariatan pada perangkat daerah, di mana salah satu tugasnya adalah memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang disampaikan oleh produsean data. Forum Satu Data Kabupaten Kudus rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023.

2.1.6.15 Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV	PERSANDIAN										
1.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	24%	9%	44%	12%	82%	24%	0%	0	▼	Dinas Kominfo
	Rata-rata capaian kinerja (%)								0		
	Predikat kinerja								Sangat Rendah		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan persandian pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 1 indikator yang berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Belum terealisasinya capaian kinerja urusan persandian disebabkan kurangnya aparatur yang menguasai keamanan informasi sehingga beberapa sub domain terkena insiden keamanan informasi dan belum adanya tools untuk pengujian kerentanan aplikasi.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan memberikan pelatihan kepada personal yang sudah ada terkait keamanan informasi, dan membentuk tim CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sebagai upaya tanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. Selain itu akan dibangun SOC (*Security Operation Center)* yang berfungsi untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespon insiden keamanan siber.

2.1.6.16 Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XVI	KEBUDAYAAN										
1.	Persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	71%	48,0 %	47%	53%	108 %	71%	24,57%	35%	▶	Dinas Budpar
2.	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20%	16,00 %	22%	37,27%	48%	20%	70,7%	354%	●	Dinas Budpar
	Rata-rata capaian kinerja (%)								194,5		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kebudayaan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator , sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang melebihi target yaitu Indikator persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu karena dari 389 buah cagar budaya yang diregistrasikan sebanyak 275 buah cagar budaya telah dikelola secara terpadu. Selain itu juga didorong telah terbentuknya Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB) Kabupaten Kudus, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Kudus, Register Musem dan Kurator sehingga Obyek Diduga Cagar Budaya (ODBC)/Cagar Budaya (CB) yang tertangani bisa lebih banyak serta dibantu oleh Juru Pelihara (Jupel) Cagar Budaya.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase seni/budaya yang diaktualisasikan dengan melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada Semester II sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2.1.6.17 Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XVII	PERPUSTAKAAN										
1.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	9,4%	8,31 %	2,35 %	1,14%	1,69 %	9,4%	1,00%	10,64	▼	Dinas Arpus
2.	Persentase ketersediaan bahan pustaka	73,58%	70,87 %	70,78%	71,02%	71,03%	73,58%	71,03%	96,53	▶	Dinas Arpus
	Rata-rata capaian kinerja (%)								53,59		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan perpustakaan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator , sebanyak 1 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator persentase pengunjung perpustakaan per tahun yang disebabkan karena kurangnya koleksi bahan pustaka yang menarik dan sesuai minat masyarakat, serta kurangnya aksesibilitas ke layanan perpustakaan. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui sosialisasi pembudayaan gemar membaca melalui perpusling (desa, sekolah) layanan perpustakaan pada kegiatan *Car Free Day*, layanan Pojok Baca Digital dan melalui kegiatan pelibatan masyarakat.

2.1.6.18 Kearsipan

Kinerja penyelenggaran urusan Kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XVII I	KEARSIPAN										
1.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	32%	8,31 %	6,68%	25,58%	25,58	32%	15%	46,88	▶	Dinas Arpus
	Rata-rata capaian kinerja (%)								46,88		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kearsipan pada Triwulan II Tahun 2022 terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target, sebagai berikut :

- Rekruitmen Arsiparis melalaui PPPK/CPNS.
- Pemenuhan sarana-prasarana kearsipan di Perangkat Daerah.
- Melaksanakan Pelatihan/ Bimtek pada pengelolla kearsipan di Perangkat Daerah.
- Pemusnahan arsip di Perangkat Daerah sesuai prosedur.
- Mendorong Perangkat Daerah agar proaktif menyerahkan arsip Statisnya pada LKD.

2.1.7 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan)

2.1.7.1 Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1.	Persentase peningkatan produksi perikanan	100	88,99	97,14%	98,01%	98,9 %	100 %	52,19%	52,19	▶	Distan dan Pangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)								52,19		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 1 indikator, berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya untuk mencapai target Akhir RKPD Indikator prosentase peningkatan produksi perikanan dengan melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara rutin pada perilaku pembudidaya ikan dan pengolahan ikan serta mencari inovasi-inovasi untuk peningkatan produksi perikanan

2.1.7.2 Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PARIWISATA										
1.	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	14%	8%	-57%	-48%	10,9 %	14%	33,31%	238	●	Dinas Budpar
2.	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	10%	0%	4%	0%	8%	10%	0%	0	▼	Dinas Budpar
3.	Persentase peningkatan promosi pariwisata	15%	13%	60%	80%	14%	15%	60%	400	●	Dinas Budpar
	Rata-rata capaian kinerja (%)								212,67		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pariwisata pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang perlu upaya keras yaitu indikator persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai optimis akan dapat mencapai target karena kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan yakni pada Semester II Tahun 2023.

Capaian indikator yang telah mencapai target yaitu indiaktor Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata karena tidak ada pembatasan pengunjung di daya tarik wisata pasca pandemic Covid-19 sehingga PAD tahun ini bisa memenuhi target, sedangkan pada indikator Persentase peningkatan promosi pariwisata karena promosi dibantu dengan media sosial dengan rata-rata upload konten perhari 1 konten.

2.1.7.3 Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	PERTANIAN										
1.	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	100	102,1	96,50%	102,4	102,9	100	99,2%	99,2	▶	Distan dan Pangan
2.	Persentase peningkatan produksi peternakan	100	81,31	96,64%	88,53	86,1	100	43,8%	43,8	▶	Distan dan Pangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)								71,5		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pertanian pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan melalui peningkatan sarpras pertanian berupa rehab jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan bantuan alat/mesin pertanian kepada kelompok tani, serta peningkatan kapasitas SDM petani melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan secara rutin .

Sedangkan pada indikator Persentase peningkatan produksi peternakan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan pembinaan terhadap kelompok tani serta peningkatan sarpras peternakan yang memadai.

2.1.7.4 Kehutanan

Kinerja penyelenggaran urusan Kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	KEHUTANAN										
1.	Persentase tutupan lahan	0,48%	0,08 %	0,20%	9,95%	14,92	0,48 %	26,86%	5.595,83	●	Dinas PKPLH
	Rata-rata capaian kinerja (%)										
	Predikat kinerja										

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kehutanan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 1 indikator yang berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator telah melampaui target karena sesuai Capaian indikator persentase tutupan lahan yang melampaui target karena telah dilaksanakan penanaman sebanyak 270 batang pohon di lahan Taman Huran Raya (Tahura), dimana 1 batang pohon diasumsikan memiliki tutupan lahan seluas 25 m2, sehingga tutupan lahan yang dihasilkan seluas 6.750 m2 dari luas Tahura yaitu 25.129 m2 (2,5 hektar) di Dukuh Ngrangit Desa Terban Kecamatan Jekulo sesuai persetujuan lahan dari Bupati Kudus Nomor 522.6/4149/21.00/2019.

2.1.7.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan ESDM

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
1.	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	0%	20%	100 %	100 %	0	0	▼	DPMPTSP
	Rata-rata capaian kinerja (%)								0		
	Predikat kinerja								Sangat Rendah		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 1 indikator yang berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Hal ini dikarenakan kegiatan koordinasi terkait penyusunan rekomendasi panas bumi belum dilaksanakan. Untuk mencapai target indikator ini maka akan dilaksanakan koordinasi terkait penyusunan rekomendasi panas bumi yang akan dilaksanakan di triwulan III bulan September 2023.

2.1.7.6 Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	PERDAGANGAN										
1.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	70%	37,83 %	41%	52,94%	40%	70%	40%	57,14	▶	Dinas Perdagangan
2.	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	100%	65%	37,03%	41,25%	94,34%	100 %	71%	71	▶	Dinas Perdagangan
3.	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	95%	75%	68,53%	72,88%	75%	95%	41,67%	43,86	▶	Dinas Perdagangan
4.	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	4,50%	2,28 %	1,83%	2,84%	2,46 %	4,50 %	2,83%	62,89	▶	Dinas Perdagangan
5.	Cakupanpengelolaan pasar rakyat	95%	80%	80%	85%	90%	95%	84%	88,42	▶	Dinas Perdagangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)								64,66		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan perdagangan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 5 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan penataan PKL. Pada Indikator Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi melalui pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan pokok, barang penting dan barang bersubsidi, serta mengupayakan usulan penambahan SDM yang berkompeten. Sedangkan Indikator Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen dengan mengusulkan penambahan Petugas Pengawas Kemetrologian yang yang telah lulus mengikuti diklat PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap wajib tera yang tidak menera / meneraulangkan alat UTTP yang dimiliki serta terhadap pelaku usaha BDKT yang tidak

memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas. mencapai target.

Dalam mencapai target Indikator kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD, dilaksanakan melalui :

- Pemungutan retribusi PKD Kios/ Los dilaksanakan per bulan
- Berkoordinasi dengan BPPKAD perihal percepatan serah terima pasar bitingan dari investor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
- Melaksanakan Sosialisasi kepada pedagang pasar jember perihal aturan pemakaian kekayaan daerah (PKD);
- Berkoordinasi dengan BPPKAD dan Bappeda perihal kondisi bangunan pasar jember yang sangat memprihatinkan agar bisa dialokasikan untuk pembangunan pasar jember;
- Segera membuat Surat perjanjian sewa PKD dengan pedagang pasar jember;
- Pemungutan retribusi PKD Kios/ Los dilaksanakan per bulan.
- Mengoptimalkan penarikan retribusi yang lain.

Dan untuk indikator cakupan pengelolaan pasar rakyat melalui peningkatan sarana prasarana pasar serta peningkatan ketertiban dan keamanan pasar.

2.1.7.7 Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	PERINDUSTRIAN										
1.	Persentase pertumbuhan IKM	0,40%	0,20 %	0,25%	0,30%	0,37 %	0,40 %	0,28%	70	▶	Disnaker,Inkop,UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)								70		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan perindustrian pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 1 indikator yang berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dengan melakukan pendampingan pada IKM dalam hal pemenuhan komitmen perolehan perizinan berusaha dan mensosialisasikan panduan penggunaan aplikasi SIINas dan OSS RBA.

2.1.7.8 Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	TRANSMIGRASI										
1.	Persentase calon transmigran yang terfasilitasi	25%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	100	●	Disnaker, Inkop,UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)								100		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan transmigrasi pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 1 indikator berstatus telah tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

2.1.8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan)

2.1.8.1 Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	SEKRETARIAT DAERAH										
1.	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	87,10%	87,10	▶	Bagian Pemerintahan
2.	Persentase fasilitasi Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Bagian Pemerintahan
3.	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	90%	78,50 %	84%	479%	349 %	90%	219 %	243,33	●	Bagian Hukum
4.	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	97%	50%	90%	96%	100 %	97%	7,42 %	7,65	▼	Bagian Hukum
5.	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	100%	100%	90%	92,5%	100 %	100 %	44,6%	44,6	▶	Bagian Kesra
6.	Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	84,6%	84,6	▶	Bagian Kesra
7.	Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah	100%	90%	88%	100%	95%	100 %	50%	50,00	▶	Bagian Organisasi
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	82,45 %	84,81	86,88	88,31	85	85,93	101,10	●	Bagian Organisasi

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Nilai akuntabilitas kinerja	83,00	66,36 %	68,93	69,45	71,13	83,00	71,13	85,70	▶	Bagian Organisasi
10	Indeks Reformasi Birokrasi	90	59,35 %	67,26	67,52	69,21	90	69,21	76,90	▶	Bagian Organisasi
11.	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	50%	50,00	▶	Bagian Organisasi
12.	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%	89,39%	107,1%	77,75%	100 %	75%	75	▶	Bagian Umum
13.	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	85%	100%	100%	100%	100 %	85%	50%	58,82	▶	Bagian Perekonomian
14.	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	35%	31,23 %	38,23%	3%	54,87%	9%	5,02%	55,78	▶	Bagian Perekonomian
15.	Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	90%	89%	100%	89,97%	91,40%	90%	77,06%	85,62	▶	Bagian Administrasi Pembangunan
16.	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	95%	100,00%	98.85%	89,11%	92,21%	95%	54,05%	56,89	▶	Bagian Pengadaan Barjas
	Rata-rata capaian kinerja (%)								78,94		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*

Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur pendukung Sekretariat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 16 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, sebanyak 14 berstatus akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan karena produk hukum baru sebanyak 26 Produk dari 350 produk hukum yang ditargetkan. Adapun Upaya yang akan dilakukan adalah dengan mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah untuk menyampaikan *minute* Produk Hukum sebagai dokumen yang wajib dipublikasikan.

Indikator yang telah melampaui target yaitu indikator persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda karena penyusunan produk hukum telah terealisasi 135 draft dari target 40 draft dan fasilitasi bantuan hukum telah tercapai sesuai target yaitu 5 perkara.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target indikator yang berstatus akan tercapai pada unsur pendukung Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- Percepatan pelaksanaan fasilitasi deliniasi batas desa/kelurahan mapun antar kabupaten.
- Pengoptimalan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan dilaksanakan.
- Percepatan kelengkapan administrasi pencairan hibah dan penyaluran serta pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh.
- Penyusunan kebijakan sistem dan mekanisme kerja yang efektif untuk pembinaan kelembagaan dan penyesuaian terhadap regulasi baru mengenai ketatalaksanaan.
- Penerapan Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus untuk mengupayakan perubahan di 8 (delapan) area yang menjadi fokus perubahan.
- Penyesuaian target dan mengoptimalkan kinerja pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
- Pengoptimalan rekomendasi TPID dan kontribusi laba BUMD untuk mencapai target yang ditetapkan.
- Pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui Desk Tepra, pelaksanaan monitoring capaian kinerja pada Perangkat Daerah yang berkinerja rendah dan berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pemantauan pelaksanaan RUP.
- Pendampingan secara intensif kepada Perangkat Daerah dalam persiapan pengadaan barang dan jasa.

2.1.8.2 Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	SEKRETARIAT DPRD										
1.	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100%	100 %	100%	92,85%	88,95%	100 %	38,29 %	38,29	▶	Sekretariat DPRD
2.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	53,17 %	53,17	▶	Sekretariat DPRD
	Rata-rata capaian kinerja (%)								45,73		
	Predikat kinerja								Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (*20 % ≤ 99%) ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur pendukung Sekretariat DPRD pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja tinggi.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target indikator persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD agar pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan dengan menginformasikan dan mempublikasikan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD yang ter*update*/terkini.

2.1.9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Penunjang Urusan Pemerintahgan)

2.1.9.1 Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PERENCANAAN										
1.	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Bappeda
2.	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Bappeda
3.	Persentase keterisian data/informasi	65%	58%	58,12%	58,43%	60%	65%	60%	92,31	▶	Bappeda
4.	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Bappeda
5.	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Bappeda
	Rata-rata capaian kinerja (%)								98,46		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang Perencanaan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 5 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target yaitu mengoptimalkan dan

meningkatkan koordinasi dengan Instansi dan Perangkat Daerah agar ketersediaan data dan informasi terpenuhi.

2.1.9.2 Keuangan

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	KEUANGAN										
1.	Persentase realisasi PAD	100%	102%	131,62%	137,5%	102,67%	100 %	48,29%	48,29	▶	BPPKAD
2.	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	99,73%	99,73	▶	BPPKAD
3.	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	BPPKAD
4.	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95%	80%	88,95%	84%	86,17%	95%	33%	34,74	▶	BPPKAD
5.	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	90%	99,57%	99,94%	99,94%	90%	99,99%	111,10	●	BPPKAD
	Rata-rata capaian kinerja (%)								78,77		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang Keuangan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 5 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, dan 3 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total asset yang dimiliki Pemerintah Daerah karena 99,99% telah melaporkan aset rusak berat sesuai dengan ketentuan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pada indikator persentase realisasi PAD melalui sosialisasi dan penagihan kepada wajib pajak/obyek pajak. Untuk indikator persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan dengan mengupayakan efektifitas target waktu dalam penyusunan KUA-PPAS dan Perda APBD. Sedangkan indikator capaian realisasi pembayaran belanja PD melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk percepatan pengajuan belanja.

2.1.9.3 Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	KEPEGAWAIAN										
1.	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	53,91%	53,91	▶	BKPP
2.	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	95%	95%	95%	79%	82%	95%	94,12%	99,07	▶	BKPP
3.	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	98%	100 %	91,83%	91,83	▶	BKPP
4.	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	100%	50%	63%	75%	88%	100 %	87,5%	87,5	▶	BKPP
	Rata-rata capaian kinerja (%)								83,08		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (*20 % ≤ 99%) ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang Kepegawaian pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 4 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Indikator Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar sebesar 53,01% dengan rumus perhitungan prosentase terselesaikannya usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun dibagi jumlah usulan dengan total SK Kenaikan Pangkat sebanyak 399 SK dibandingkan target sebanyak 700 SK dan Pensiun sebanyak 211 SK dibandingkan target sebanyak 450 SK, dan dengan adanya tupoksi yang jelas terkait pelayanan kepegawaian terkait Kenaikan Pangkat dan Pensiun maka optimis akan mencapai target.

Untuk indikator persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku dari 34 Perangkat Daerah terdapat 2 Perangkat Daerah yang mempunyai kasus. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan pembinaan kedisiplinan.

Pada indikator persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian menunjukkan hampir semua usulan pelaporan kepegawaian Perangkat Daerah telah terpenuhi seperti pembuatan kartu kepegawaian, izin cuti, pelaporan LHKPN, fasilitasi tes kesehatan, fasilitasi JKK/JKM telah terpenuhi semua kecuali usulan penghargaan Satya Lancana Karyasatya belum bisa terealisasi karena keputusan penerima penghargaan tersebut berada di Pemerintah Pusat. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui pengoptimalan laporan kepegawaian tepat waktu dan sesuai dengan target..

Pada indikator Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG terdapat Aplikasi sistem informasi yang terintegrasi sudah tercapai 7 buah dari target 8 buah, yaitu: SIDICA (Aplikasi untuk mempermudah permohonan kartu identitas pegawai), SIHADIRV2(Aplikasi untuk mempermudah Manajemen Absensi pegawai), E-SKP (Aplikasi untuk mempermudah penyusunan kegiatan Sasaran Kerja Pegawai, E-Document (Aplikasi untuk Arsip Digital Pegawai), E-Cuti (Aplikasi untuk mempermudah proses pengajuan cuti), SIMPEG (Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), dan E-Mutasi (Aplikasi Sistem Informasi Mutasi Pegawai). Untuk mencapai target dibutuhkan 1 (satu) sistem aplikasi yang terintegrasi akan dirilis pada tahun 2023 ini, sehingga optimis akan mencapai target.

2.1.9.4 Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1.	Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	46%	32%	35,86	29,18%	38%	46%	16,58%	36,04	▶	BKPP
2.	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	1,6%	9,69 %	1,61	5,89%	7,92 %	1,6%	0,10%	6,25	▼	BKPP
	Rata-rata capaian kinerja (%)								21,15		
	Predikat kinerja								Sangat Rendah		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Indikator yang berstatus perlu Upaya keras yaitu indikator Persentase ASN yang memenuhi Pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun disebabkan kegiatan diklat teknis orientasi PPPK baru dilaksanakan di Semester II. Upaya dalam mencapai target dengan melaksanakan kegiatan diklat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi adalah segera melakukan penilaian potensi kompetensi pada ASN yang terpilih untuk mengisi jabatan yang kosong.

2.1.9.5 Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1.	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	100%	57,14 %	57,14%	86%	86%	100 %	50%	50	▶	Bappeda
	Rata-rata capaian kinerja (%)								50		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 1 indikator, berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi, namun masih diperlukan adanya program *improvement* yang bersifat perubahan dan *inovatif* yang akan mendorong peningkatan kinerja.

2.1.10. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan)

2.1.10.1 Inspektorat Daerah

Kinerja penyelenggaran Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INSPEKT0RAT DAERAH										
1.	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material	100%	62%	93,02%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Inspektur Daerah
2.	Persentase t indaklanjut rekomendasi koordinasi supervise dan pencegahan KPK	100%	79%	80,46%	79,40%	95%	100 %	19%	19	▼	Inspektur Daerah
3.	Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Inspektur Daerah
4.	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	67%	67	▶	Inspektur Daerah
5.	Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,5	3,126	3,1	2,781	3,011	3,5	3,011	86,03	▶	Inspektur Daerah
6.	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Inspektur Daerah
7.	Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	32,4%	2,4%	4,76%	23,11%	11,11%	32,4 %	11,11 %	34,29	▶	Inspektur Daerah
8.	Persentase realisasi progress PMPRB	100%	69%	69%	84%	76,67%	100 %	80,71 %	80,71	▶	Inspektur Daerah
	Rata-rata capaian kinerja (%)								69,58		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 8 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator persentase tindaklanjut rekomendasi koordinasi supervise dan Pencegahan KPK karena terkendala proses bisnis sistem penilaian, dimana eviden telah 65% namun ternilai 19%. Upaya yang

dilaksanakan dalam mencapai target melalui optimalisasi submit/pengiriman ke sistem dan optimalisasi capaian 8 area intervensi dalam rencana aksi Kopsurgah Pemerintah Kabupaten Kudus.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target pada indikator persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti yaitu akan mempercepat tindak lanjut dari penyelesaian terhadap 9 aduan yang sampai dengan Triwulan II terselesaikan terselesaikan 6 aduan. Sedangkan pada indikator Nilai rata-ata maturitas SPIP PD dengan meningkatkan komitmen dari pimpinan pemerintah daerah untuk mendukung dan mengutamakan penerapan SPIP.

Untuk indikator persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM pada Triwulan II pengajuan ZI tahun 2023 masih dalam proses pada tahap seleksi administrasi. Sedangkan pada indikator persentase realisasi progress PMPRB masih stagnan dikarenakan perubahan regulasi dari Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 menjadi PermenpanRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

2.1.11. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Kewilayahan)

2.1.11.1 Kecamatan

Kinerja penyelenggaran unsur Kewilayahan Kecamatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	KECAMATAN										
1.	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	97,59%	100 %	100 %	50,20%	50,20	▶	9 Kecamatan dan 9 Kelurahan
	Rata-rata capaian kinerja (%)								50,20		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :
● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Unsur Kewilayahan pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 1 indikator, berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target melalui peningkatan fasilitasi

dan mengoptimalkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan agar tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

2.1.12 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Pemerintahan Umum)

2.1.12.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja penyelenggaran Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1.	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Kesbangpol
2.	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	86%	85,98 %	-	-	-	-	-	-		Kesbangpol
3.	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	●	Kesbangpol
4.	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100%	100%	75%	75%	100 %	100 %	100%	100	●	Kesbangpol
	Rata-rata capaian kinerja (%)								100		
	Predikat kinerja								Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (20 % ≤ 99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras(< 20%)*
Sangat Tinggi X≥46; Tinggi 45 ≥X>38; Sedang 37 ≥X>33; Rendah 32≥X>26; Sangat Rendah X≤25

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada Triwulan II Tahun 2023 terdiri dari 4 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 1 indikator telah berakhir pada tahun 2019, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

2.2. CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MININAL (SPM) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung prioritas nasional, maka perlu memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat dan kawasan, Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

serta bidang Sosial. Adapun capaian SPM sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

Tabel 2.50
Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Bidang / Urusan	Capaian Penerapan		
		2021	2022	sd Triwulan II 2022
1	Pendidikan	76.00	82.00	82.00
2	Kesehatan	91.00	84.00	84.00
3	Pekerjaan Umum	99.00	99.00	99.00
4	Perumahan dan Permukiman	100.00	100.00	100.00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum	87.00	97.00	97.00
6	Sosial	90.00	99.00	99.00
	Kabupaten Kudus	**90.50**	**93.50**	**93.50**

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, Bappeda 2023 (data diolah)

Permasalahan penerapan SPM di Kabupaten Kudus selain adanya perubahan regulasi yang sangat cepat juga disebabkan kurangnya sinergi perencanaan dan penganggaran pada internal Perangkat Daerah. Meskipun demikian penerapan SPM di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari tahun 2021. Bahwa keberhasilan pencapaian target ini diperlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Kabupaten Kudus. Target SPM harus diupayakan peningkatan dan dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan.

2.3. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kegiatan pada RKPD 2023 dengan menggunakan evaluasi realisasi DPA Perangkat Daerah. Hasil realisasi DPA Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Untuk mengevaluasi tingkat capaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dapat dikategorikan dalam predikat kinerja, yaitu :

- Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja di atas 47,00 % (X ≥ 47,00%).
- Tinggi, untuk capaian kinerja diatas 38,00% sampai dengan 47,00% (47,00% ≥ X >38,00%).
- Sedang, untuk capaian kinerja diatas 33,00% sampai dengan 38,00% (38,00% ≥ X >33,00%).
- Rendah, untuk capaian kinerja diatas 26,00% sampai dengan 33,00% (33,% ≥ X >26,00%).
- Sangat Rendah, untuk capaian kinerja sama atau kurang dari 26,00% (X ≤ 26,00%).

Evaluasi Renja Perangkat Daerah dilaksanakan pada Perangkat Daerah dan Sub Unit yang terdiri dari 34 Perangkat Daerah dan Sub Unit

yaitu 8 Bagian, 19 Unit Pelaksana Tugas (UPT) Puskesmas, 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan, dan 9 Kelurahan. Berdasarkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebanyak 66 Perangkat Daerah dan Sub Unit atau 92,96% berpredikat Sangat Tinggi, dan 5 Perangkat Daerah dan Sub Unit atau 7,04% berpredikat Tinggi. Perangkat Daerah yang berpredikat tinggi, sebagai berikut :

1. UPTD Puskesmas Purwosari
2. UPTD Puskesmas Mejobo
3. UPTD Puskesmas Jepang
4. UPTD Puskesmas Gribig
5. Inspektorat Daerah

Kondisi rata-rata capaian kinerja evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.51
Rata-Rata Capaian Kinerja Evaluasi terhadap Renja PD
Tahun 2023 s.d Triwulan II Tahun 2023

No	Kategori	Rata-rata Capaian Kinerja	
		Jumlah PD/Sub Unit	%
1	SANGAT TINGGI	66	92,96
2	TINGGI	5	7,04
3	SEDANG	-	-
4	RENDAH	-	-
5	SANGAT RENDAH	-	-
	JUMLAH	71	100

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 sehingga realisasi kinerja belum optimal antara lain :

- Terdapatnya pentahapan penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang menghambat terlaksananya kegiatan – kegiatan yang bersumber dari dana tersebut;
- Adanya kegiatan – kegiatan yang bersifat kontraktual yang masih dalam proses pelelangan/pengadaan;
- Adanya beberapa kegiatan yang akan dialihkan pendanaannya, menunggu perubahan RKPD dan APBD Tahun 2023.

Solusi yang dapat diambil atas permasalahan yang ada untuk kinerja dan anggaran tahun berikutnya antara lain:

- Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan II, sehingga capaian realisasi kinerja dan penyerapan anggaran dapat optimal dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait yang bersinggungan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dengan perencanaan pembangunan, dan keuangan dalam rangka perubahan RKPD dan APBD Tahun 2023.

Untuk mengetahui secara lengkap kondisi capaian evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat disajikan dalam Lampiran.

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab berbagai permasalahan yang diidentifikasi terdapat kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang teridentifikasi pada masing-masing urusan, adalah sebagai berikut :

2.4.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut :

a) Masih terdapat tenaga pendidik yang kurang memenuhi kompetensi.
b) Masih terdapat sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak.

2) Kesehatan

Pembangunan Kesehatan juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, masih ada beberapa permasalahan antara lain

a) Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi.
b) Belum cukupnya usia sasaran penerima layanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
c) Belum optimalnya penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ekonomi maupun sosial, serta masih terdapatnya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiataan penataan ruang. Beberapa permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain :

a) Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak.
b) Belum terbangunnya sistem drainase pada daerah genangan air.

c) Masih perlunya peningkatan kualitas infrastruktur air minum dan sanitasi aman.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, nyaman dan berkelanjutan termasuk kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan Kawasan permukiman terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a) Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni.
b) Masih adanya permukiman kumuh/ilegal.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mewujudkannya masih ada permasalahan yang dihadapi, antara lain :

a) Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
b) Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai.
c) Terbatasnya jumlah pos damkar.
d) Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
e) Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
f) Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat
g) Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat

6) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus, namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a) Masih adanya PPKS yang memerlukan intervensi.
b) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan.
c) Belum optimalnya validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis

2.4.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Meskipun pada Tahun 2021 terjadi kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus, namun masih ada permasalahan dalam meningkatkan partisipasi Angkatan kerja, antara lain :

a) Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja belum optimal
b) Mutu tenaga kerja yang Relatif Rendah
c) Kurangnya Akses Tenaga Kerja Pada Pasar Kerja

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yang perlu perhatian antara lain:

a) Penduduk perempuan yang memasuki usia kerja (14 – 64 tahun) memilih menjadi ibu rumah tangga (bukan angkatan kerja) bukan bekerja (angkatan kerja).
b) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik
c) Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
d) Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak
e) Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak.
f) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3) Pangan

Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh cadangan pangan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi. Kabupaten Kudus telah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

a) Masih kurangnya diversifikasi pada pola konsumsi masyarakat agar beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
b) Belum optimalnya ketersediaan pangan.
c) Masih perlunya pendampingan dan pembinaan terhadap produsen penghasil pangan segar secara intensif.

4) Pertanahan

Peningkatan akses dan aset reforma agraria dilaksanakan untuk menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah serta redistribusi lahan. Dalam upaya pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a) Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

5) Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

a) Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara
b) Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/*reduce*, daur ulang/*recycled* dari sumber sampah

c) Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah).
d) Overkapasitas TPA Tanjungrejo.

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik, masih menemui beberapa permasalahan, meliputi :

a) Belum semua penduduk di Kabupaten Kudus memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat berperan cukup penting dalam proses pembangunan, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Dalam melaksanakan proses tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a) Masih ditemukannya desa yang bermasalah hukum.
b) Masih ditemukannya desa yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan.
c) kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

a) Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
b) Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

9) Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui permsalahan sebagai berikut :

a) Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan perkotaan dalam rangka meminimalisasi potensi kemacetan pada jam sibuk dan kerawanan kecelakaan.

10) Komunikasi dan Informatika

Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a) Belum optimalnya keterlibatan Perangkat Daerah dalam upaya membangun pengelolaan komunikasi publik.
b) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan.

11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

a) Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi
b) Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang
c) Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro

12) Penanaman Modal

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu:

a) Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha
b) Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

a) Belum optimalnya prestasi olah raga.
b) Kurangnya sarana olahraga yang memenuhi standar.
c) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembinaan perilaku generasi muda

14) Statistik

Ketersediaan data yang valid sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Perangkat Daerah sebagai produsen data diharapkan mampu menyediakan data yang andal. Dalam mewujudkannya masih ditemukan permasalahan antara lain :

a) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indoensia.

15) Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman

dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi *(e-government)* tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Dalam pengelolaan persandian masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

a) Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
b) Belum adanya sistem kerja / kerangka kerja keamanan informasi terstandar

16) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mempertahankan, melestarikan, menjaga dan mewarisi budaya lokal sehingga dapat memperkokoh budaya bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kudus dalam pembangunan kebudayaan antara lain :

a) Belum optimalnya pelestarian obyek pemajuan.
b) Belum optimalnya pengelolaan permuseuman.

17) Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat, permasalahan yang dihadapi antara lain :

a) Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan
b) Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
c) Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca
d) Ketersediaan bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kudus.
e) Kualitas bahan Pustaka masih kurang memadai.
f) Koleksi buku digital dan koleksi terbitan berkala masih kurang.

18) Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain :

a) Kualitas pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah kurang maksimal.
b) Belum adanya buku panduan tentang prosedur penyusutan arsip.
c) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku.
d) Belum optimalnya pemanfaatan arsip.

2.4.3 Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kudus tidak memiliki potensi perikanan laut namun memiliki potensi perikanan darat. Pembangunan perikanan telah

dilaksanakan melalui budidaya dan pengolahan perikanan, namun masih dijumpai permasalahan, antara lain :

a) Produksi perikanan belum optimal.

2) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya masih terdapat permasalahan antara lain :

a) Belum optimalnya pembangunan destinasi pariwisata.
b) Belum optimalnya pembangunan kelembagaan dan pemasaran pariwisata.

3) Pertanian

Pembangunan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalaha sebagai berikut :

a) Produksi pertanian belum optimal
b) Sarana prasarana dan infrastruktur pertanian belum memadai

4) Kehutanan

Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Potensi berkurangnya tutupan lahan.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah berupa pemberian izin pengelolaan panas bumi atau energi baru terbarukan (EBT), dan sampai saat ini belum ada yang mengajukan perizinan panas bumi disebabkan karena tidak terdapat potensi panas bumi baru yang terbarukan, namun demikian dimungkinkan adanya penemuan sumber energi baru yang terbarukan, dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Belum adanya inovasi mengenai sumber energi terbarukan.

6) Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah. Adapun permasalahan yang masih menjadi kendala adalah:

a) Belum optimalnya upaya pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal

b) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi
c) Masih rendahnya kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD
d) Masih kurangnya diversifikasi produk unggulan yang berpotensi menjadi komoditas ekspor
e) Belum optimalnya penyebarluasan informasi guna pengenalan produk ekspor dalam pameran, misi dagang maupun pencitraan produk
f) Masih kurangnya optimalisasi pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan pada produk-produk perdagangan dalam upaya perlindungan konsumen

7) Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah *(value added creation)* dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Namun permasalahan Perindustrian yang masih menjadi kendala adalah :

a) Kurangnya pemberian pemahaman kepada masyarakat dalam hal prosedur perijinan industri.
b) Belum adanya penyederhanaan mekanisme alur perijinan usaha industri.

8) Transmigrasi

Transmigrasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Namun masih dijumpai permasalahan sebagai berikut :

a) Fasilitasi terhadap program transmigrasi belum optimal.

2.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yang penting dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, sebagai berikut :

a) Kurangnya pemberian pemahaman kepada Perangkat Daerah untuk menyampaikan *minute* produk hukum sebagai dokumen yang wajib dipublikasikan.
b) Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesra.
c) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
d) Belum terpenuhinya kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD, yang secara teknis juga membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Masih adanya agenda kerja DPRD yang belum terealisasi.

2.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah tahapan yang strategis, dimana keberhasilan pembangunan diawali dari tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Namun demikian, masih ditemui permasalahan dalam perencanaan pembangunan, yaitu :

a) Masih rendahnya keterisian data/informasi perencanaan pembangunan.

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

a) Keterbatasan waktu untuk mencermati rekening belanja pada Perangkat Daerah.
b) Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum melaporkan asset rusak berat sesuai dengan ketentuan.
c) Belum optimalnya realisasi PAD.

3) Kepegawaian

Mewujudkan ASN yang profesional merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, permasalahan yang dihadapi adalah :

a) Adanya kasus-kasus pelanggaran disiplin pada Perangkat Daerah menunjukkan masih kurangnya komitmen ASN maupun Perangkat Daerah dalam menegakkan disiplin.
b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat didukung sistem informasi yang memadai.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Belum optimalnya pemetaan kompetensi ASN
b) Belum adanya HCDP (*Human Capital Development Program*) sehingga belum dapat mengetahui tingkat kebutuhan pengembangan ASN secara akurat

5) Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada permasalahan:

a) Belum optimalnya fasilitasi jejaring penelitian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah.

2.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan antara lain:

a) Tidak ada perangkat daerah yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan set yang bersifat material.
b) Penilaian dan verifikasi dari Kemendagri, nilai total berdasarkan nilai verifikasi dan bobot per area.
c) Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.
d) Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi.
e) Belum optimalnya budaya sadar resiko.
f) Kurangnya komitmen dalam pembangunan *Zona Integritas (ZI)* agar mendapatkan predikat WBK/WBBM.
g) Adanya penggantian Road Map PMPRB dengan RB Tematik.

2.4.7 Unsur Kewilayahan

Kecamatan

Pembangunan kewilayahan sangat diperlukan untuk penguatan peran kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu :

a) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa
b) Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan antara lain administrasi kependudukan, pelestarian budaya di wilayah kecamatan, data sosial kemasyarakatan yang akurat untuk focus program penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyusunan APBDesa.
c) Belum optimalnya dukungan pemerintah kecamatan atas upaya pencapaian SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di wilayahnya.

2.4.8. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kudus termasuk daerah yang terkondusif, hampir tidak ada potensi konflik sosial dan interaksi diantara masyarakat lintas agama terjalin dengan baik, namun masih ada Permasalahan perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya konflik sosial.

2.5 ISU STRATEGIS

Rencana pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, dengan memperhatikan dinamika isu global yang menimbulkan dampak social ekonomi masyarakat secara global. Penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional dan nasional yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional

No	Isu Strategis Kabupaten	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Nasional
1	Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Reformasi Sistem Kesehatan
2	Tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusifitas Wilayah	Transformasi Digital
3	Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman	Kesenjangan Wilayah	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4	Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha	• Penanggulangan Kemiskinan • Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha	Reformasi Ekonomi
5	Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	• Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam • Kedaulatan Pangan dan Energi	• Reformasi Ketahanan Bencana • Ekonomi Hijau • Ketahanan Pangan

Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan kriteria di atas dalam tahun 2023 yaitu :

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

   Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2022, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 75,89 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2022 sebesar 9,06 dan harapan lama sekolah tahun 2022 sebesar 13,25. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain :

   a. Pendidikan

      Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, di samping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

   b. Kesehatan

      Permasalahan di bidang kesehatan yaitu pelayanan pengendalian penyakit yang baru terlaksana sebesar 42,58% dan cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) baru tercapai 48%. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Salah satu menjadi tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat sesejahteraan adalah tingkat pendapatan per kapita masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat. Pendapatan perkapita masyarakat Kudus pada tahun 2022 telah mencapai 133, 88 juta /tahun, telah melampau tingkat pendapatan perkapita Jawa Tengah maupun Nasional. Meskipun demikian, peningkatan perndapatan perkapita perlu terus didorong untuk mencapai target RPJMD Kabupaten Kudus sebesar 144,87 juta/tahun. Di sampiang pendapatan perkapita, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari tingkat konsumsi masrayakat, dimana capaian pada tahun 2022 sudah mencapai 11,609 juta /orang/tahun. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMD 2023 yang ditetapkan sebesar 11,413 juta/orang/ tahun. Permasalahan yang harus ditangani dalam peningkatan kesejahteraan adalah terkait dengan pemerataan pendapatan masyarakat serta variasi pola konsumsi masyarakat dan jaminan ketersediaan dan keamana barang yang dikonsumsi masyarakat.

2. Tata kelola pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 71,13, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Angka kriminalitas pada tahun 2023 sebesar 0,019. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan

toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 7,41 yang dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di pada tahun 2022 sebesar 3,21%. Berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dilakukan dengan memberi pelatihan-pelatihan teknis dan seminar kewirausahaan untuk memberikan semangat pada angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Ekonomi Makro Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Perekonomian global menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tercermin dari meredanya tekanan inflasi di berbagai negara, berkurangnya volatilitas harga energi, kuatnya pasar tenaga kerja di negara maju, serta permintaan global yang masih tangguh. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mengalami penguatan, diantaranya Amerika Serikat tumbuh 1,6 persen *year on year* (*yoy),* Tiongkok tumbuh 4,5 persen (*yoy*), Jepang tumbuh 1,3 persen (*yoy*). Sementara Perekonomian Korea Selatan dan Singapura mengalami perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing 0,8 dan 0,4 persen (*yoy*). Tekanan inflasi global yang mereda disebabkan penurunan harga komoditas bahan bakar dan energi, harga logam, serta harga komoditas pertanian yang cenderung melandai.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (*yoy*). Dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor transportasi dan pergudangan yang didorong oleh banyaknya momen hari besar keagamaan dan masuknya bulan Ramadhan. Selanjutnya sumber pertumbuhan tertinggi masih terjadi pada sektor industri pengolahan, ditopang oleh permintaan domestik maupun global yang menguat. Selain itu, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92 persen (*qtq*). Di sisi lain, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh seluruh komponen yang tumbuh positif, termasuk konsumsi pemerintah yang tumbuh setelah terkontraksi beberapa triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah ditopang oleh tingginya peningkatan belanja barang dan belanja pegawai serta belanja pembayaran bunga utang. Selain itu didorong juga oleh peningkatan pertumbuhan komponen Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 6,2 persen (*yoy*). Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I 2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara

spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96 persen dibanding triwulan I 2022 (*yoy*) (BPS, Ekonomi Indonesia Triwulan I 2023, rilis 5 Mei 2023).

Kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan pertumbuhan signifikan pada pendapatan negara, dan belanja negara yang meningkat. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 29,0 persen (*yoy*) menjadi sebesar Rp647,2 triliun atau sebesar 26,3 persen dari pagu APBN 2023. Kinerja tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNBP. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp518,7 triliun atau tumbuh 10,5 persen (*yoy*). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 15,5 persen dari APBN, sementara TKD mencapai 21,0 persen dari APBN. Realisasi TKD pada triwulan I tahun 2023 menurun 2,9 persen (*yoy*) yang dipengaruhi oleh turunnya realisasi DAU dan Dana Otsus yang belum terealisasikan. Berdasarkan capaian tersebut, anggaran hingga Maret 2023 berada pada kondisi surplus sebesar Rp128,5 triliun atau sekitar 0,6 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.879,1 triliun atau sebesar 39,2 persen terhadap PDB.

Sepanjang triwulan I 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar ditengah tingginya ketidakpastian pasar global. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp15.227 per USD, melemah 6,16 persen (*yoy*). Pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh tekanan yang terutama dipengaruhi oleh penutupan tiga bank di Amerika Serikat dan tertahan oleh kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang baik. Likuiditas perekonomian dan intermediasi perbankan tetap terjaga meskipun mengalami tren pertumbuhan yang menurun. Pertumbuhan kredit tetap positif yang ditopang oleh memadainya likuiditas perbankan dan kebijakan pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM). Sementara itu, inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih melampaui batas sasaran inflasi nasional 2023. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mengalami perlambatan setelah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022. Kebangkitan perekonomian Tiongkok berpeluang menjadi pendorong bagi ekspor Indonesia, ditengah turunnya harga komoditas dan melemahnya ekonomi mitra dagang Indonesia selama ini. Perkembangan indikator ekonomi Indonesia seperti indikator konsumsi dan indikator investasi menunjukkan pertumbuhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perlambatan. Meski demikian, Indonesia perlu waspada terhadap kondisi perekonomian global dengan semakin besarnya ketidakpastian. Dari sisi pengeluaran 2023, konsumsi LNPRT diproyeksi tumbuh karena adanya pelaksanaan pemilu. Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan akomodasi makanan dan minuman diperkirakan kembali meningkat sejalan dengan berakhirnya

pandemi, sementara sektor pertanian diproyeksikan melambat karena pengaruh perubahan iklim. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7–5,5 persen. (Sumber: Bappenas, Mei 2023).

3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I Tahun 2023 tumbuh 5,04% (*yoy*), melambat dibanding triwulan sebelumnya (5,24%; *yoy*), namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (5,03%; *yoy*). Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut. Sejalan dengan pertumbuhan tahunan, secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah masih tumbuh positif sebesar 1,55% *quarter to quarter* (*qtq*) pada triwulan I 2023, meningkat dibandingkan 0,63% (*qtq*) pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain di Jawa, kecuali DIY. Jawa Tengah masih menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pertumbuhan positif aktivitas ekonomi triwulan I 2023 juga tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tetap masih kuat. Kredit perbankan di Jawa Tengah tumbuh 11,41% (*yoy*), didorong oleh kredit konsumsi. Pelonggaran mobilitas masyarakat oleh Pemerintah serta momen Ramadhan, mampu mendorong aktivitas masyarakat sehingga permintaan domestik dan kebutuhan pendanaan meningkat.

Berdasarkan sisi pengeluaran, seluruh komponen utama produk domestik regional bruto (PDRB) tumbuh positif kecuali ekspor luar negeri yang terkontraksi. Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terbesar pada triwulan I 2023 adalah konsumsi rumah tangga, dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB triwulan I 2023 sebesar 3,11% dan tumbuh 5,31% (*yoy*). Kondisi tersebut seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada saat momen Imlek dan persiapan bulan ramadhan. Lebih lanjut, investasi dan konsumsi pemerintah juga tercatat tumbuh positif, namun kinerja ekspor luar negeri masih terkontraksi pada triwulan laporan.

Secara agregat, konsumsi domestik Jawa Tengah tumbuh melambat pada triwulan I 2023. Penurunan konsumsi domestik terutama disebabkan oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,42% (*yoy*), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (7,62%; *yoy*). Konsumsi rumah tangga juga melambat namun masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,31% (*yoy*). Di sisi lain, konsumsi LNPRT tumbuh 5,43% (*yoy*), meningkat dibanding triwulan sebelumnya (5,39%; *yoy*). Konsumsi rumah tangga sebagai komponen perekonomian terbesar tumbuh 5,31% (*yoy*) dan memiliki andil sebesar 3,11% pada triwulan I 2023. Pertumbuhan positif tersebut disebabkan oleh peningkatan mobilitas seiring dengan peningkatan konsumsi pada momen imlek dan persiapan menjelang bulan ramadhan.

Kinerja investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih tumbuh positif sebesar 5,63% (*yoy*) pada triwulan laporan. Pertumbuhan positif investasi di awal tahun ditopang oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional, khususnya penyelesaian pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang telah mencapai 47,85%. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sedang melangsungkan pembangunan di KIT Batang yang direncanakan akan selesai pada 2023, diantaranya Rumah Keramik Indonesia (RKI), Cosmos Ink, Unipack Plasindo, dan Aneka Gas Industri. Pertumbuhan positif dari investasi juga tercermin dari *likert scale* (LS) yang masih positif sebesar 0,92 dan SBT realisasi investasi sebesar 6,15% (*yoy*). Selain itu, kinerja investasi juga didorong oleh berbagai kegiatan pemerintah provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk menarik investasi melalui Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi dan Pariwisata Jawa Tengah (KERIS Jateng). Secara rutin, KERIS Jateng telah menyelenggarakan *Central Java Investment Business Forum (CJIBF)* sebagai gerbang promosi investasi di Jawa Tengah.

Tekanan inflasi di Jawa Tengah mulai menurun, namun demikian inflasi sejumlah kelompok masih perlu mendapatkan perhatian. Beberapa kelompok tersebut antara lain Kelompok Transportasi; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Tekanan inflasi gabungan enam kota Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2023 mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV 2022. Inflasi pada triwulan I 2023 yaitu sebesar 5,22% (*yoy*), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (5,63%; *yoy*). Meskipun tekanan inflasi di Jawa Tengah mulai menurun, namun terdapat beberapa kelompok yang masih perlu mendapat perhatian. Kelompok tersebut antara lain Kelompok Transportasi; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan I 2023 mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi tahunan tertinggi berlangsung di Kota Surakarta, didorong oleh Kelompok Transportasi serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Inflasi kemudian disusul oleh Cilacap, Purwokerto, Kudus, dan Tegal. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kota Semarang. Inflasi tahunan gabungan enam kota Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2023 terutama bersumber dari Kelompok Transportasi; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Inflasi pada Kelompok Transportasi terutama berlangsung seiring dengan penyesuaian harga BBM dan berakhirnya relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penyesuaian BBM oleh Pertamina, salah satunya sejalan dengan implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Regulasi baru tersebut telah mendorong kenaikan harga BBM khususnya bensin

dan solar. Peningkatan lebih lanjut juga didorong oleh kenaikan harga mobil seiring dengan berakhirnya skema diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peningkatan mobilitas serta penyesuaian tarif moda transportasi juga turut mengerek inflasi pada kelompok transportasi, (Bank Indonesia, Mei 2023).

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20-5,60
2	PDRB ADHK	Milyar Rp	1.101,63
3	PDRB per kapita	Juta Rp	40,87
4	Inflasi	%	3,0 ± 1
5	Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	58.267,24
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48 – 4,80
7	Angka Kemiskinan	%	9,86 – 9,05
8	Rasio Gini	Angka	0,34

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus

Keberhasilan pembangunan diperlukan untuk mengetahui tingkat berbagai ukuran antara lain melalui indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro daerah merupakan suatu sistem informasi daerah yang dapat memberikan informasi terutama bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (tahun 2018 sampai dengan tahun 2022), dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, investasi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,24	3,10	-3,11	-1,98	2,23
2.	IPM	74,58	74,94	75	75,16	75,89
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,33	3,86	5,53	3,77	3,21
4.	Penduduk Miskin (%)	7,59	6,98	7,31	7,60	7,41

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2023

a. Pertumbuhan Ekonomi

Target indikator utama pembangunan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 akan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2018–2022

Tahun	PDRB Harga Konstan (2010)	
	Pertumbuhan Dengan Tembakau (%)	Pertumbuhan Tanpa Industri Pengolahan Tembakau (%)
2018	3,24	5,47
2019	3,09	5,62
2020	-3,11	-5,24
2021*	-1,54	4,7
2022**	2,23	6,85

Sumber : BPS, 2023
*Ket * : angka sementara; ** : angka sangat sementara*

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus untuk tahun 2022 sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif pasca pandemi Covid-19 sebesar 2,23 persen setelah dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh membaiknya kondisi ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau (IHT) sebagai sektor usaha basis yang sudah memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus. Selain itu, lapangan usaha yang terkait sektor yang mendukung pariwasata dan perdagangan yaitu sektor transportasi dan pergudangan serta sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan tingkat pertumbuhan 61 persen dan 16 persen secara berturut–turut. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kabupaten Kudus sudah menunjukkan perkembangan menggembirakan.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 75,89 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata–rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2020 sebesar 75,16. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2023 menjadi 75,97–76,16. Pasca dampak Covid19 terdapat perubahan mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan, dimana kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat cenderung meningkat. Perubahan pola pendidikan pasca wabah Covid-19 juga terjadi, yaitu dengan pelaksanaan program belajar di rumah tetapa dilaksanakan secara terbatas seiring dengan

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Untuk perubahan perilaku konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja untuk kebutuhan primer seperti pangan dan kesehatan, sebaliknya kebutuhan sekunder untuk sandang, hiburan, dan transportasi justru berkurang.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,28	3,8	5,53	3,77	3,21
2	TPAK	%	72,37	72,05	74,5	74,77	70,99
3	Jumlah tenaga kerja	orang	468.131	470.169	483.983	501.443	485.05
4	Jumlah angkatan kerja	orang	484.031	488.718	512.319	521.094	501.12
5	Jumlah pengangguran	orang	15.946	18.549	28.336	19.651	16.07
6	Jumlah tenaga kerja yang ikut dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	N/A	N/A	79.517	140.589	234.914

Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tahun 2023.

Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,21 persen setelah pada tahun 2021 juga mengalami penurunan pada angka 3,77 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat dipertahankan pada tingkat 3 persen pada tahun 2023, seiring dengan adanya pekembangan iklim ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2022 dan 2023. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 diperkirakan akan turun sekitar 0,26 persen dari TPT tahun 2021 sebesar 3,21 persen menjadi 2.95 – 3,4 persen.

Jumlah Angkatan kerja Kabupaten pada tahun 2022 sejumlah 501.120 orang, dimana dari jumlah tersebut sebesar 485,048 merupakan kelompok bekerja dan sebesar 16.072 orang termasuk kelompok menganggur dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,21 persen. TPT pada tahun 2022 tercatat sebagai tingkat penurunan TPT terendah selama 5 tahun terakhir, dimana hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 memberikan andil pada serapan tenaga kerja daerah sehingga terjadi penurunan pengangguran secara signifikan.

d. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 2018 ke 2022 tersaji dalam tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	59.990	58.000	64.240	67.060	66.060
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,98	6,68	7,31	7,6	7,41
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	393.078	406.470	429.666	450.992	482.806
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,88	0,83	1,01	1,23	0,9
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,19	0,17	0,18	0,27	0,19

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2023.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2022 menurun tipis sebesar 0,19 persen dari tingkat kemiskinan tahun 2021 dari 7,6 persen menjadi 7,41 pada tahun 2022. Dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kudus, capaian penurunan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 58.000 orang (6,68 persen) , kemudian meningkat tajam pada periode 2020 – 2021 sebagai efek dari terjadinya wabah Covid-19. Peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dikatakan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi lesunya kondisi perekonomian sehingga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 kabupaten/kota Garis Kemiskinan Sedang, yaitu garis kemiskinan berada di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Peningkatan batas garis kemiskinan cenderung naik, disebabkan meningkatnya harga-harga dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang rentan miskin.

Sebagai langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam pengurangan kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, perumahan, pengembangan ekonomi produktif dan pengembangan wira usaha baru. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan individu masyarakat. Dengan fokus pada sasaran serta lokus terintegrasi dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.

e. Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Kudus pada triwulan I 2023 sebesar 5,58% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 6,40% (*yoy*). Sejalan dengan inflasi gabungan enam kota Provinsi Jawa Tengah, Kelompok Transportasi menjadi kelompok dengan andil penyumbang inflasi tertinggi pada periode ini akibat peningkatan harga bensin dan mobil. Kenaikan harga bensin tersebut berlangsung seiring dengan penyesuaian harga yang dilakukan oleh Pertamina, sedangkan kenaikan harga mobil berlangsung seiring dengan berakhirnya skema PPnBM di tahun 2023. Sementara itu, inflasi di Kabupaten Kudus masih tertahan akibat Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi. Penurunan harga telepon seluler, laptop/notebook, dan televisi berwarna ditengarai menjadi faktor penurunan pada kelompok tersebut.

Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023* Juni
1	Nasional	3.13	2.72	1.68	1.87	5.51	3.52
2	Jawa Tengah	2.82	2.81	1.56	1.7	5.63	3.18
3	Kudus	3.11	3.02	1.24	1.59	6.40	3.76

*Sumber : SDI – BPS *Berita Resmi Statistik Rilis 3 Juli, 2023*

Inflasi Kudus tahun kalender dan year on year (*yoy*) 2022 sebesar 6,40 melampau angka tingkat inflasi Nasional (5,42) dan Jawa Tengah (5,81). Kelompok komoditi yang menyumbang inflasi tertinggi diduduki oleh sub kelompok transportasi sebesar 17,02 persen dengan andil inflasi sebesar 0,01 persen. Sub Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menduduki peringkat ke dua dengan tingkat inflasi sebesar 7,44 persan dan memeberi andil sebesar 0,04 persen. Sedangkan peringkat ketiga diduduki oleh sub Kelompok Makanan, Minuman, Rokok dan Tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 0,34 persen dengan tingkat inflasi sebesar 7,11 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 sebesar 6,40 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,59 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 sebesar 5,63 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 5,63 persen. Pada Desember 2022, gabungan enam kota di Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,34. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 0,61 persen dengan IHK sebesar 114,70 diikuti oleh Kota Cilacap sebesar 0,59 persen dengan IHK sebesar

113,44; Kota Purwokerto sebesar 0,49 persen dengan IHK sebesar 114,10; Kota Surakarta sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 114,85; Kota Semarang sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 112,85; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,40 persen dengan IHK sebesar 113,12.

Pada level nasional, bulan Desember 2022 terjadi inflasi *Year on Year* (*yoy*) sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Inflasi *yoy* tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen dengan IHK sebesar 119,83 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,26 persen dengan IHK sebesar 110,95. Inflasi *yoy* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,86 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,87 persen; kelompok transportasi sebesar 15,26 persen. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022 kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen.

Kabupaten Kudus, pada bulan Juni 2023 mengalami inflasi yang utamanya disebabkan kenaikan harga daging ayam ras, mobil, bakso siap santap, bawang putih, dan rokok kretek filter. Sedangkan beberapa komoditas yang menahan inflasi di Kabupaten Kudus antara lain bensin, beras, bawang merah, cabai merah, dan emas perhiasan.

3.2 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Perubahan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

a. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum, indikator ekonomi daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, tetap menjadi target, dengan beberapa revisi terhadap RKPD Tahun 2023. Capaian pembangunan Kabupaten Kudus sendiri masih menghadapi tantangan yang ditandai dari capaian kinerja makro pembangunan. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 7,60% menjadi 7,41% pada tahun 2022, namun masih lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sebesar 7,31. Angka kemiskinan yang meningkat tersebut justru berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang menurun, yakni dari tahun 2021 sebesar 3,77% menjadi 3,21% pada tahun 2022. Demikian halnya dengan capaian pertumbuhan ekonomi, meskipun masih dalam kondisi minus pada

tahun 2020 (-3,11) dan 2021 (-1,54), namun pada tahun 2022 mengalami perbaikan dengan angka 2,23. Adanya Pandemi Covid-19 menjadi penyebab signifikan bagi capaian pembangunan yang tidak optimal, sebagaimana terjadi secara global. Capaian kinerja tersebut mengindikasikan adanya perbaikan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, meskipun belum signifikan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan serius, dengan meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2022. Adapun capaian pembangunan SDM yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 75,16 pada tahun 2021 menjadi 75,89 pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Kudus, 2023).

Adapun target indikator makro ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET	
		RKPD Kab. Kudus Tahun 2023	Perubahan RKPD Kab. Kudus Tahun 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,5-3,3	2,2 - 3,16
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	5,65	5,0 - 5,7
2.	IPM	76,0-76,44	76,00 – 76,50
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,05-3,50	2,90 - 3,40
4.	Penduduk Miskin (%)	6,01–6,50	5,99–6,50

Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 Tahun 2023, Bappeda (data diolah*)

Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2022 telah menunjukkan trend perkembangan yang positif dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dimana telah menunjukkan hasil yang positif sebesar 2,23 persen. Meski demikian, pemulihan ekonomi tahun ini diperkirakan berjalan lebih lambat dari target yang telah ditetapkan pada RKPD 2023. Hal ini disebabkan karena penguatan ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada indsutri hasil tembakau belum kembali pulih sepenuhnya sebagaimana pada saat sebelum Covid-19. Hal ini berdampak pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2023 yang semula diperkirakan sebesar 2,5-3,3 persen mengalami perubahan menjadi 2,2–3,16 persen. Jika dihitung angka pertumbuhan ekonomi selain industri pengolahan tembakau, tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada angka 6,85 persen yang bersumber dari industri pengolahan, sektor trasnportasi pergudangan, dan sektor akomodasi dan makanan minuman. Dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan non IHT akan mengalami penyesuaian trend pertumbuhan daerah maka tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT diperkirakan antara 5 sampai 5,7 persen selaras dengan target RPJMD 2023 sebesar 5,65 persen. Hal

ini disebabkan oleh kondisi riil sektor ekonomi industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau sebagai sektor yang paling dominan mengalami trend pertumbuhan telah mengalami *recovery* pertumbuhan setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan investasi daerah menjadi tantangan bagi Kabupaten Kudus untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi produksi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal masyarakat. Selain itu, dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan, yang direpresentasikan pada peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 75,89 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata–rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2021 sebesar 75,16. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2023 menjadi 76,00–76,50. Dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat pasca pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan. Dengan adanya pandemi Covid-19, kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat cenderung meningkat. Normalisasi penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Begitu juga pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang telah ditingkatkan pada berbagai unit layanan kesehatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah mengupayakan capaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 97,58 persen.

Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 3,21 persen setelah pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 3,77 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi atas dampak Covid-19 serta adanya normalisasi iklim ekonomi yang menyesuaikan dengan kondisi tata kehidupan normal baru. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 diperkirakan akan turun sekitar 0,1 – 0,31 persen dari TPT tahun 2022 sebesar 3,21 persen menjadi 2,9 – 3,4 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2017 sebanyak 7,59% menurun menjadi 6,68% di Tahun 2019. Jumlah angka kemiskinan mengalami kenaikan sebagai akibat dari munculnya dampak wabah Covid-19. Tingkat penduduk miskin di Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mengalami penurunan ke angka 7,41 dari tingkat kemiskinan tahun 2021 menjadi 7,60 persen atau turun sebesar 0,19. Hal ini menjadi tantangan tersendiri

atas upaya pemulihan upaya pemulihan perkonomian secara umum, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sudah menunjukkan perkembangan pada arah yang positif, sedangkan tingkat kemiskinan daerah masih mengalami tingkat penurunan jumlah penduduk miskin yang kurang signifikan. Dampak akan adanya wabah Covid-19 memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktifitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2023, diharapkan program – program yang berdampak pada pengurangan penduduk miskin terutama pada kemiskinan ekstrim dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara umum di Kabpaten Kudus. Target penurunan tingkatan kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 diharapkan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 5,99 – 6,50 persen.

b. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kebijakan keuangan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, letak Kabupaten Kudus berada di Pulau Jawa. Sebagai episentrum ekonomi, Pulau Jawa memiliki keunggulan dengan persebaran pusat-pusat perekonomian nasional di dalamnya. Selain itu, kondisi infrastruktur yang relatif bagus (konektivitas geografis) membuat pergerakan manusia, barang, dan jasa juga lancar. Kedua, porsi pendapatan transfer meliputi lebih dari 70% dari total pendapatan daerah. Dengan ketergantungan yang tinggi tersebut, perubahan kebijakan transfer Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.

Setelah melewati Semester I Tahun 2023, optimisme mengiringi perjalanan di awal Semester II Tahun 2023 ini. Berbagai berita positif terungkap, antara lain ekonomi yang bertumbuh positif, pencabutan status pandemi Covid-19, surplus pada APBN, dan utang IMF yang telah lunas.

Merespon berbagai kejadian yang ada dan mengantisipasi kondisi ke depan, kebijakan keuangan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 diusulkan untuk dilakukan perubahan karena beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2023 yang mendorong penyesuaian target pendapatan tahun 2023; dan
- Terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat penyelesaian target dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan reformasi struktural melalui pengelolaan keuangan yang terfokus, kredibel, dan

akuntabel guna mendukung peningkatan produktivitas. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara rinci untuk masing-masing komponen APBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Target pendapatan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 diubah berdasarkan realisasi pendapatan daerah Semester I dan kondisi yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Berdasarkan capaian realisasi pendapatan Semester I Tahun 2023 (berdasarkan data SIMDA yang diambil tanggal 3 Juli 2023), realisasi pendapatan daerah sebesar Rp936.302.366.809,00 atau sebesar 45,50% dari target APBD awal sebesar Rp2.057.937.665.140,00. Secara umum, capaian PAD adalah sebesar Rp232.198.987.624,00 atau 54,04% dari target Rp429.654.851.000,00. Pada akun Pendapatan Pajak Daerah realisasi telah mencapai Rp83.308.292.989,00 atau sebesar 48,29%. Pada pos Pendapatan Transfer, realisasi sebesar 43,24%. Sedangkan pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah nol karena memang tidak ditargetkan ada pendapatan masuk. Secara rinci, realisasi pendapatan daerah pada Semester I Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	*429.654.851.000*	*232.198.987.624*	*54,04*
Pajak Daerah	172.510.725.000	83.308.292.989	48,29
Retribusi Daerah	31.847.520.000	12.036.116.273	37,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.028.327.000	7.977.507.696	99,37
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.268.279.000	128.877.070.666	59,32
Pendapatan Transfer	*1.628.282.814.140*	*704.103.379.185*	*43,24*
Transfer Pemerintah Pusat	1.437.590.146.140	642.148.718.587	44,67
Transfer Antar Daerah	190.692.668.000	61.954.660.598	32,49
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	
Pendapatan Hibah	-	-	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	*2.057.937.665.140*	*936.302.366.809*	*45,50*

Sumber: BPPKAD, 2023

Sebagai sebuah instrumen fiskal lokal, APBD diarahkan untuk dapat merespon dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan kredibel agar mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi lokal yang lebih dalam. Pada Semester I Tahun 2023, dalam rangka optimalisasi PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan bauran kebijakan sesuai dengan karakteristik masing-masing akun pendapatan. Akun pendapatan pajak daerah dioptimalkan dengan menggunakan baik metode intensifikasi (melalui peningkatan NJOP PBB-P2 secara selektif pada wilayah yang

mengalami pertumbuhan tinggi dan penggunaan alat pemantau transaksi pajak secara elektronik) maupun metode ekstensifikasi (pendataan untuk obyek pajak daerah yang selama ini belum disentuh).

Pada akun hasil retribusi daerah, beberapa langkah dilakukan guna mendukung optimalisasi retribusi daerah, khususnya melalui aktivitas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan aplikasi SIMRETDA dalam rangka integrasi pemungutan retribusi daerah. Pembangunan aplikasi SIMRETDA ini diharapkan memudahkan konsolidasi pelaporan dalam pemungutan retribusi daerah. Selain itu, perluasan digitalisasi dilakukan dengan aplikasi *e-Retribusi* yang selama ini hanya digunakan di Pasar Kliwon, sekarang digunakan untuk beberapa pasar lain yang dikelola Dinas Perdagangan.

Kebijakan lain yang diambil Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2023 adalah menyesuaikan nilai perolehan air tanah dan mengintensifkan pemantauan transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Namun demikian, dalam menerapkan kebijakan tersebut, Pemkab Kudus juga mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal dan kondisi pelaksanaan berusaha di Kabupaten Kudus dengan memberikan insentif fiskal antara lain dalam bentuk pengurangan ketetapan dan penghapusan denda pajak daerah. Bauran kebijakan yang diterapkan tersebut dinilai efektif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Selain itu, kondisi perekonomian yang relatif stabil dan berkembang dengan tumbuhnya industri kuliner meningkatkan keyakinan adanya kenaikan pendapatan daerah pada Tahun 2023 ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perubahan asumsi dan target pendapatan APBD dibutuhkan agar APBD dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 direncanakan mengalami kenaikan dari semula sebesar Rp1.729.161.588.000,00 menjadi Rp2.232.890.657.370,00 atau naik sebesar Rp503.729.069.370,00 atau sebesar 29,13%. Kenaikan target pendapatan daerah disumbang oleh masing-masing komponen pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah, diperkirakan naik sebesar Rp62.093.367.000,00 atau sebesar 15,11% dari semula Rp410.998.331.000,00 menjadi Rp473.091.698.000,00.
b. Pendapatan Transfer naik sebesar Rp438.935.702.370,00 atau sebesar 33,30% dari semula Rp1.318.163.257.000,00 menjadi sebesar Rp1.757.098.959.370,00. Kenaikan ini bersumber dari kenaikan pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp407.475.366.570,00 (penyesuaian pada akun DBH Pajak dan DAK) dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah

Daerah sebesar Rp31.460.335.800,00 (penyesuaian Bagi Hasil Pajak)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terjadi kenaikan sebesar Rp2.700.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat untuk diteruskan sebagai penyertaan modal kepada PDAM.

Secara rinci, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 diusulkan diubah sebagaimana Tabel 3.9

Tabel 3.9
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	*410.998.331.000*	*429.654.851.000*	*473.091.698.000*
Pajak Daerah	162.510.725.000	172.510.725.000	174.288.764.000
Retribusi Daerah	26.196.000.000	31.847.520.000	31.303.382.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.028.327.000	8.028.327.000	9.971.340.000
Lain-lain PAD Yang Sah	214.263.279.000	217.268.279.000	257.528.212.000
Pendapatan Transfer	*1.318.163.257.000*	*1.628.282.814.140*	*1.757.098.959.370*
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.144.806.286.000	1.437.590.146.140	1.552.281.652.570
Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.356.971.000	190.692.668.000	204.817.306.800
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*	*0*	*2.700.000.000*
Pendapatan Hibah	0	0	2.700.000.000
PENDAPATAN DAERAH	*1.729.161.588.000*	*2.057.937.665.140*	*2.232.890.657.370*

Sumber: BPPKAD, 2023

2) Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 pada sisi belanja disusun setelah melihat realisasi belanja Semester I Tahun 2023. Secara rinci realisasi belanja daerah Tahun 2023 sampai dengan semester I dicantumkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH	2.244.752.949.070,00	870.345.697.776,00	(1.374.407.251.294)	38,77
5.1	BELANJA OPERASI	1.676.011.431.622,00	696.194.411.890,00	(979.817.019.732)	41,54
5.1.01	Belanja Pegawai	963.209.686.822,00	408.020.846.136,00	(555.188.840.686)	42,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.061.202.160,00	250.142.535.254,00	(366.918.666.906)	40,54
5.1.05	Belanja Hibah	93.358.152.640,00	37.926.030.500,00	(55.432.122.140)	40,62
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.382.390.000,00	105.000.000,00	(2.277.390.000)	4,41
5.2	BELANJA MODAL	289.520.540.003,00	45.651.292.700,00	(243.869.247.303)	15,77
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.643.330.800,00	0,00	(5.643.330.800)	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.147.297.500,00	28.671.127.875,00	(37.476.169.625)	43,34
5.2.03	Belanja Modal	130.493.751.867,00	10.461.878.125,00	(120.031.873.742)	8,02

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
	Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.788.189.836,00	6.396.315.700,00	(80.391.874.136)	7,37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	247.970.000,00	121.971.000,00	(125.999.000)	49,19
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000)	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.074.820.445,00	881.341.700,00	(8.193.478.745)	9,71
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.074.820.445,00	881.341.700,00	(8.193.478.745)	9,71
5.4	BELANJA TRANSFER	270.146.157.000,00	127.618.651.486,00	(142.527.505.514)	47,24
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.436.325.000,00	10.188.522.700,00	(10.247.802.300)	49,85
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	249.709.832.000,00	117.430.128.786,00	(132.279.703.214)	47,03

Sumber: BPPKAD, 2023

Dengan mempedomani PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tabel realisasi belanja daerah Semester 1 Tahun 2023 disusun menurut klasifikasi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Secara keseluruhan Realisasi belanja daerah Tahun 2022 semester I mencapai Rp870.345.697.776,00,00 atau sebesar 38,77% dari alokasi belanja yang sudah ditetapkan yaitu Rp2.244.752.949.070,00 dengan rincian belanja operasi terealisasi sebesar 41,54%, belanja modal 15,77%, belanja tak terduga 9,71% dan belanja transfer 47,24%. Penyerapan anggaran belanja daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah didukung dengan kemampuan keuangan daerah secara optimal. Rendahnya serapan belanja modal sampai dengan semenster I hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada serta sebagian besar kegiatan masih dalam proses pengerjaan.

Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 struktur belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

   Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

   a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari

12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;

c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;

d. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Belanja Modal

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tak Terduga

   Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

   Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
   b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Adapun proyeksi belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2023, diasumsikan naik sebesar Rp753.170.783.536,00 atau sebesar 40,32% dari semula sebesar Rp1.867.932.603.930,00 menjadi Rp2.621.103.387.466,00. Perubahan belanja daerah ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan jumlah pegawai yang disebabkan karena purna tugas, mutasi serta penerimaan pegawai PPPK dan penyesuaian asumsi penerimaan gaji dan tunjangan pegawai.
2. Menampung beberapa belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.
3. Menampung perubahan belanja hibah kepada KPU dengan dengan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menampung perubahan belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) karena menyesuaikan dengan Rencana Kerja Penganggaran (RKP) hasil evaluasi dari Tim Asistensi Penggunaan DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah.
5. Menampung perubahan belanja tak terduga untuk penanganan bencana.
6. Terdapat perubahan dalam target pendapatan tahun 2023.
7. Terdapat perbedaan prediksi SiLPA tahun 2023 dalam APBD dengan SiLPA hasil audit BPK.
8. Menampung perubahan belanja wajib dan prioritas yang belum tertampung dalam RKPD Tahun 2023, baik itu penambahan, pengurangan maupun pergeseran.

Adapun proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2023 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.11
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	Selisih	%
5	BELANJA	1.867.932.603.930	2.244.752.949.070	2.621.103.387.466	753.170.783.536	40,32
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.456.802.022.564	1.676.011.431.622	1.903.285.874.627	446.483.852.063	30,65
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	864.614.800.420	963.209.686.822	979.580.931.227	114.966.130.807	13,30
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	534.296.919.784	617.061.202.160	772.612.184.760	238.315.264.976	44,60
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	55.420.152.360	93.358.152.640	148.566.945.640	93.146.793.280	168,07
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	2.470.150.000	2.382.390.000	2.525.813.000	55.663.000	2,25
5 . 2	BELANJA MODAL	128.440.524.366	289.520.540.003	429.398.119.629	300.957.595.263	234,32
5 . 2 . 1	Belanja Tanah	24.587.000.000	5.643.330.800	0	-24.587.000.000	-100,00
5 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.928.527.400	66.147.297.500	137.193.501.375	92.264.973.975	205,36
5 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	32.494.770.530	130.493.751.867	125.458.601.889	92.963.831.359	286,09
5 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.181.716.436	86.788.189.836	161.498.359.165	135.316.642.729	516,84
5 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	248.510.000	247.970.000	4.997.657.200	4.749.147.200	1.911,05
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya		200.000.000	250.000.000		
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	4.000.000.000	9.074.820.445	12.660.432.210	8.660.432.210	216,51
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000	9.074.820.445	12.660.432.210	8.660.432.210	216,51
5 . 4	TRANSFER	278.690.057.000	270.146.157.000	275.758.961.000	-2.931.096.000	-1,05
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	18.870.673.000	20.436.325.000	20.614.129.000	1.743.456.000	9,24
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	259.819.384.000	249.709.832.000	255.144.832.000	-4.674.552.000	-1,80

Sumber: BPPKAD, 2023

3) Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 169/8/XVIII.SMG/05/2023, Perihal: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, tanggal 19 Mei 2022 yang memuat lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 65.A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023 dan 65.B//LHP/XVIII.SMG/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023. Penerimaan pembiayaan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang semula dalam RKPD diproyeksikan sebesar Rp.138.771.015.930,00 berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi sebesar Rp.390.912.730.076.00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tersebut sebagian besar bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya sehingga harus dilakukan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023.

Pengeluaran pembiayaan pada RKPD tahun 2023 direncanakan naik sebesar Rp.2.700.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk penambahan penyertaan modal

pada PDAM sebagaimana amanat dalam surat Kementerian Keuangan nomor S-2/MK.7/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.700.000.000,00.

Untuk lebih jelasnya perubahan pembiayaan tahun 2023 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah			Bertambah / (Berkurang)	%
		RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.771.015.930	186.815.283.930	390.912.730.076	252.141.714.146	182,70
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.771.015.930	186.815.283.930	390.912.730.076	252.141.714.146	182,70
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	2.700.000.000	2.700.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	2.700.000.000	2.700.000.000	
PEMBIAYAAN NETTO		138.771.015.930	186.815.283.930	388.212.730.076	249.441.714.146	179,75
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0	0	0	0	0

Sumber: BPPKAD, 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 telah berjalan sampai dengan triwulan II. Tujuan dan sasaran untuk mencapai Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera telah berada di tahun terakhir periode RPJMD tahun 2018-2023. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, 23 indikator kinerja daerah, menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus adalah

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan
4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.
5. Meningkatnya kualitas Pendidikan
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
7. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat
8. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi;
9. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama
10. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
11. Meningkatnya daya saing investasi daerah
12. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah
13. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kudus, Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah *Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas,* dengan prioritas:

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Penguatan Daya Saing Daerah;
3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan;
4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Pada alokasi anggaran yang bersumber dari DBHCHT, prioritas tersebut fokus pada:

- Peningkatan Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/TPS3R dengan Perluasan Lahan TPA dan penyediaan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah serta Penyediaan IPLT
- Penanganan (Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi) Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase
- Pemenuhan Perlengkapan Keselamatan Jalan, LPJU, Guardrail, Marka dan Rambu

Prioritas-prioritas tersebut didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, program unggulan dan program penyelenggaraan pemerintah daerah.

Persandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan
1	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Pertanian dan Pangan 4. Dinas Sosial P3AP2KB
2	Penguatan daya saing daerah	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. DINAS DIKPORA 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perdagangan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas PMPTSP 6. Dinas Komunikasi dan Informatika
			Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas PKPLH 4. Dinas PMD
3	Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Pertanian dan Pangan 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Pengelolaan daya dukung dan daya tampung	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan	1. Dinas PKPLH 2. Dinas Pertanian dan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan
	lingkungan hidup	secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	ketahanan bencana, dan perubahan iklim	3. Dinas PUPR 4. BPBD
5	Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat Daerah 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Dukcapil 5. BPPKAD 6. BKPP 7. BAPPEDA 8. Sekretariat DPRD 9. Kecamatan 10. Badan Kesbangpol 11. Satpol PP
			Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat Daerah 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Dukcapil 5. BPPKAD 6. BKPP 7. BAPPEDA 8. Sekretariat DPRD 9. Kecamatan 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023 yang meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,97-76,48
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 90
3. Angka Kriminalitas sebesar 0,013
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5-3,16 menjadi 2,2-3,16
5. Pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau sebesar 5,67

Serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Kabupaten Kudus yang meliputi :

1. Harapan lama sekolah sebesar 14,90
2. Rata-rata lama sekolah sebesar 9,20
3. Persentase akses dan mutu pendidikan 88,00
4. Angka Kematian Ibu sebesar 52,78
5. Angka Kematian Bayi sebesar 6,9
6. Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn) sebesar 11.413,19
7. Nilai akuntabilitas kinerja sebesar 83,00
8. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK) WTP
9. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,87
10. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85
11. Indeks rasa aman sebesar 0,53

12. Indeks Toleransi sebesar 100%
13. PDRB Per Kapita (juta rupiah) sebesar 144,87
14. Angka kemiskinan sebesar 5,99-6,35 menjadi 5,90-7,26
15. Angka pengangguran sebesar 2,95-3,40 menjadi 2,90-3,21
16. Nilai investasi (dalam triliun) sebesar Rp 9,19
17. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap sebesar 83,73
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,77

Indikator tujuan dan sasaran tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dan dalam perubahan RKPD Tahun 2023, ditargetkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,97-76,48	75,97-76,48
2	Harapan lama sekolah	Tahun	14,90	14,90
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,20	9,20
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	%	88,00	88,00
5	Angka Harapan Hidup	Angka	76,54	76,54
6	Angka Kematian Ibu	Angka	52,78	52,78
7	Angka Kematian Bayi	Angka	6,9	6,9
8	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	ribu Rp/org/thn	11.413,19	11.413,19
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90	90
10	Nilai akuntabilitas kinerja	Angka	83,00	83,00
11	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	Predikat	WTP	WTP
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,87	2,87
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85
14	Angka kriminalitas	Angka	0,013	0,013
15	Indeks rasa aman	Angka	0,53	0,53
16	Indeks Toleransi	%	100	100
17	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,5-3,16	2,2-3,16
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	%	5,67	5,67
18	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	Rp juta	144,87	144,87
19	Angka kemiskinan	%	5,99-6,35	5,90-7,26
20	Angka pengangguran	%	2,95-3,40	2,90-3,21
21	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	Rp. Trilyun	9,19	9,19
22	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	83,73	83,73
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,77	67,77

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

a. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kudus sebagai masukan dalam perubahan rencana pembangunan daerah

tahun 2023 meliputi bidang prasarana wilayah, perekonomian, sumberdaya alam, sosial budaya, pemerintahan, dan keuangan

1. Bidang Prasarana Wilayah :
   - Peningkatan dan perbaikan jalan dan jembatan
   - Peningkatan sarana transportasi
   - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum
2. Bidang Perekonomian
   - Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian dan pertanian lainnya
   - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
   - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi informasi serta Pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya bidang perikanan
   - Peningkatan bantuan ternak untuk masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat
   - Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan berupa alat pembuat pakan fermentasi dan sarana prasarana / kendang bagi peternak.
3. Bidang SDA-LH
   - Peningkatan kuota stimulan rumah sederhana sehat dan bantuan peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH)
   - Mengoptimalkan pengelolaan DAS secara terpadu berupa pembangunan saluran drainase perkotaan
   - Mengoptimalkan pengelolaan SDA dengan pembangunan bangunan perkuatan tebing/talud
4. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
   - Peningkatan sarana prasarana sekolah
   - Peningkatan infrastruktur pedesaan untuk peningkatan perekonomian masyarakat
   - Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui pelatihan ketrampilan untuk peningkatan pendapatan masyarakat
   - Peningkatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berupa bantuan dana stimulan aktivitas organisasi masyarakat
   - Pelindungan pengembangan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan dengan pemberdayaan dan pemberian bantuan sarana prasarana kesenian.
5. Bidang keuangan melalui Bantuan Khusus Keuangan kepada desa untuk peningkatan sarana prasarana pendukung perekonomian, penyediaan air minum/Pamsimas dan pemberdayaan.

Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 tersaji pada bagian akhir Bab ini.

b. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 dan RKP Pemutakhiran Tahun 2023

Prioritas nasional tahun 2023 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastrutkur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Major Project dengan lokasi prioritas di Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023:

1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

c. Program Unggulan

Rencana pembangunan daerah tahun 2023 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kabupaten Kudus yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah, *Guruku Sayang Guruku Senang* dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Religius. Sesuai numenklatur program dalam Permendagri 90 Tahun 2019 beserta turunannya, program unggulan ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berupa tunjangan guru SD, SMP dan PAUD, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Tunjangan guru madin, TPQ Diakonia, pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah.
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera. Program unggulan ini dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial berupa santunan anak yatim piatu, dan santunan kematian dengan skema BTT pada Dinas Sosial P3AP2KB
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru, dengan inovasi PRABUKU (Pembentukan Wirausaha Baru Kudus). Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera. Program unggulan ini dilaksanakan melalui Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu

Kudus yang Religius. Program unggulan ini dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berupa Bantuan khotib dan imam, pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen. Melalui inovasi Pemberdayaan dan Pendampingan P3A dan Gapoktan. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera. Program unggulan ini dilaksanakan melalui Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera. Program unggulan ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) berupa bantuan modal usaha, pada Dinas NakerperinkopUKM
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia. Melalui inovasi *Kudus Taste of Java*. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Cerdas. Program unggulan ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan berupa hibah pembinaan olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pembinaan Sejarah Program Pengelolaan Permuseuman, Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera. Program unggulan ini dilaksanakan melalui Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada Dinas Sosial P3AP2KB
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera. Program unggulan ini dilaksanakan melalui Program hubungan industrial pada Dinas NakerperinkopUKM.

d. Program Prioritas Daerah

Program prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2018-2023 secara regulasi mengalami pemutakhiran sehingga untuk konsistensinya terpetakan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Konsistensi Keselarasan Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
Program peningkatan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A	Dinas Dikpora
		APK SMP/MTs/Paket B	
		APK PAUD	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	
		APK Pendidikan Kesetaraan	
		APM SD/MI/Paket A	
		APM SMP/MTs/Paket B	
		Jumlah warga negara 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (SPM)	
		Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	
		Persentase sekolah terakreditasi A	
		Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	
		Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	
		Persentase sarana prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	
		Persentase sarana prasarana Pendidikan non formal dalam kondisi baik	
		Persentase pendidik pendidikan non formal yang	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
		bersertifikasi pendidik	
		Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	
		Rata - rata kemampuan Literasi SD	
		Rata - rata kemampuan Numerasi SD	
		Rata - rata kemampuan Literasi SMP	
		Rata - rata kemampuan Numerasi SMP	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase organisasi pramuka yang aktif	
Program Peningkatan Kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan BLUD	DKK, RSUD dr.LOEKMONOHADI, Dinas Sosial P3AP2KB
		Angka Kematian Ibu	
		Angka Kematian Bayi	
		Prevalensi stunting pada anak dibawah dua tahun	
		Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	
		Cakupan desa/kelurahan UCI dan IDL	
		Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	
		Persentase tercapainya ketersediaan sarpras pendukungnya	
		Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	
	Program Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	
	Program sediaan farmasi,	Persentase sarana kefarmasian, alat Kesehatan dan	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
	alat kesehatan dan makanan minuman	makanan minuman yang sesuai standar	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan desa siaga aktif	
	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR Laju Pertumbuhan Penduduk	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase penggunaan MKJP	
Program Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Dikpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	
Program Ekonomi kreatif pengolahan pangan	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	persentase ketersediaan pangan utama	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan pangan	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan daerah rawan pangan	
Program	Program Pengarusutamaan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja	Dinas Sosial

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
Pemberdayaan Perempuan	Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Langsung APBD	P3AP2KB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pekerja perempuan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja (TPAK)	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Strata Kabupaten Layak Anak (KLA)	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani	
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	Dinas Sosial P3AP2KB
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial	
		Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial Rasio PMKS	
	Program Penanganan	Cakupan penanganan korban bencana alam/sosial	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
	Bencana		
Program Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum}	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
Program peningkatan transparansi anggaran dan akuntabilitas	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Bappeda, Bagian Organisasi (Setda), BPPKAD, Inspektorat Daerah
		persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	
		Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu	
		Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan	
		Persentase keterisian data/informasi	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	
		Indeks kualitas perencanaan bidang Pemsosbud	
		Indeks kualitas perencanaan bidang Praswileksda	
	Program Penelitian dan Pengembangan	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
		Persentase peningkatan hasil kelitbangan	
		Persentase penerapan hasil inovasi	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Setda)	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	Bagian Organisasi
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi target PAD	BPPKAD
	Program Pengelolaan Keuangan	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		capaian realisasi pembayaran belanja PD	
		rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan	
		penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	
		penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan	
		Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan Penyelesaian tahapan/proses	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	Inspektorat
		persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	
		persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti	
		persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
		Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	
		persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	
		persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	
		persentase realisasi progres PMPRB	
		Persentase PD dengan capaian Kinerja >90%	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Elemen Kapabiitas Level 4	
Program Manajemen Pemerintahan yang Modern	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	Dinas Kominfo
	Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	Indeks SPBE Kebijakan Internal SPBE Layanan SPBE Tata Kelola SPBE	
	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	
Program Pendidikan Karakter	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan Perda dan Perkada Jumlah warga negara yang memeperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota Persentase cakupan penanganan gangguan tibumtranmas	Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
		Rasio Linmas per jumlah RT	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik	Persentase pendidikan politik masyarakat	Bakesbangpol
Program Pemerataan Dana CSR	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi Kerjasama Daerah)	Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan (Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama)	Bagian Pemerintahan
Program pemanfaatan zakat,infak, sodaqoh	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan (Bag Kesra) Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	Bagian Kesra (Setda)
Program Sadar Keberagaman	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	Bakesbangpol
Program Budaya dan Adat	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Seni Budaya yang diaktualisasikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Tema Dokumentasi Sejarah Lokal	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	
	Program Pengelolaan	Persentase Museum Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
	Permuseuman		
Program Pemberdayaan Ekonomi lokal	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	persentase peningkatan produksi hasil perikanan olahan	
	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase peningkatan produksi peternakan	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata	persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	
		Persentase peningkatan promosi pariwisata	
	Program Pengembangan	Persentase pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
	Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kreatif	
Program Pemasaran Hasil Produk Lokal	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan pengelolaan pasar rakyat Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana gudang SRG Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana rakyat	Dinas Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen Prosentase fasilitasi perlindungan konsumen	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	
Program Penguatan industri rakyat dan produktifitas kreatif	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas NakerperinkopUKM
	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang sudah bekerja	
	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang terselesaikan	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase perkembangan UMKM	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan IKM	
Program Akselerasi Daya Saing	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	persentase peningkatan jumlah investor	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanamana Modal	realisasi investasi yang terlaporkan	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	
Program Pembangunan	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
Infrastruktur			PKPLH
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standar pelayanan	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase ketaatan rencana tata ruang	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yg memiliki sertifikasi kompetensi	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan rencana tata ruang	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecepatan rata - rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	
	Program Pengembangan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
	Perumahan		
	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase kawasan permukiman lingkungan yang layak	
Program Pembangunan berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks tutupan lahan	Dinas PKPLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	
		Indeks kualitas udara	
		IKLH	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase penanganan volume sampah	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegaitan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	

Program Pembangunan Daerah	Program sesuai KMDN 050/5889/2021	Indikator	Perangkat Daerah
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	

Setelah terpetakan konsistensi Program Daerah dengan Program sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri 050/5889/2021, selanjutnya pemetaan diselaraskan dengan sasaran Daerah. Keselarasan tertuang pada table berikut :

Tabel 4.4
Keselarasan Program Prioritas dengan Sasaran Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
Misi 1 :					
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia			
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
					Program Pembinaan Perpustakaan
			1. Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan Kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
			masyarakat		Program Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
					Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
					Program Pengendalian Penduduk
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
				Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			2. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Ekonomi kreatif pengolahan pangan	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan
				Pemberdayaan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
					Program Perlindungan Perempuan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
					Program Perlindungan Khusus Anak
				Peningkatan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
					Program Penanganan Bencana
Misi 2 :					
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi			
			3. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Pelayanan publik yang prima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum}
				Peningkatan transparansi anggaran dan akuntabilitas	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Penelitian dan Pengembangan
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Setda)
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Keuangan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
					Program Penyelenggaraan Pengawasan
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Manajemen pemerintahan yang modern	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
					Program Pengelolaan Aplikasi Informasi
					Program Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Misi 3 :					
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Angka Kriminalitas		Pendidikan karakter	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik
			4. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Pemerataan dana CSR	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi Kerjasama Daerah)
				Pemanfaatan zakat, infak sodaqoh	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Sadar Keberagaman	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				Budaya dan adat	Program Pengembangan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
					Kebudayaan
					Program Pembinaan Sejarah
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
					Program Pengelolaan Permuseuman
Misi 4 :					
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnyapeningkatan perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi			
		Pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	5. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Program pemberdayaan ekonomi lokal	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
					Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Pemasaran hasil produk lokal	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
					Program Pengembangan Ekspor
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Program Penguatan industri rakyat dan produktifitas kreatif	Program Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
					Program Hubungan Industrial
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
					Program Pengembangan UMKM
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Program Akselerasi Daya Saing	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
					Program Promosi Penanaman Modal
					Program Pelayanan Penanaman Modal
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanamana Modal
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
				Program Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
					Program Penataan Bangunan Gedung
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
					Program Penyelenggaraan Jalan
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Program Pengembangan Perumahan
					Program Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				Program Pembangunan berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program Daerah	Program Prioritas
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Untuk memastikan bahwa program prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2023 selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023, maka disajikan tabel berikut:

Tabel 4.5
Keselarasan Program Prioritas dengan Prioritas Pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang sudah bekerja
		Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang terselesaikan

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Persentase perkembangan UMKM
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan IKM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan pengelolaan pasar rakyat Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana gudang SRG Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana rakyat
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi
		Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	persentase ketersediaan pangan utama
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan daerah rawan pangan
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial
			Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial Persentase PMKS yang

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
			mendapat pelayanan kebutuhan dasar
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial Rasio PMKS
		Program Penanganan Bencana	Cakupan penanganan korban bencana alam/sosial
		Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Laju Pertumbuhan Penduduk
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase penggunaan MKJP
	Penguatan Daya Saing Daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A
			APK SMP/MTs/Paket B
			APK PAUD
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun
			APK Pendidikan Kesetaraan
			APM SD/MI/Paket A
			APM SMP/MTs/Paket B
			Jumlah warga negara 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (SPM)
			Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)
			Persentase sekolah terakreditasi A
			Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
			Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi
			Persentase sarana prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik
			Persentase sarana prasarana Pendidikan non formal dalam kondisi baik
			Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik
			Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik
			Rata - rata kemampuan Literasi SD
			Rata - rata kemampuan Numerasi SD
			Rata - rata kemampuan Literasi SMP
			Rata - rata kemampuan Numerasi SMP
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan pertahun
			Persentase ketersediaan bahan pustaka
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase organisasi pramuka yang aktif
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan BLUD
			Angka Kematian Ibu
			Angka Kematian Bayi
			Prevalensi stunting pada anak dibawah dua tahun
			Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan
			Cakupan desa/kelurahan UCI dan IDL
			Cakupan pelayanan pengendalian penyakit

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
			Persentase tercapainya ketersediaan sarpras
			Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
		Program Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana kefarmasian, alat Kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan desa siaga aktif
		Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan Perda dan Perkada Jumlah warga negara yang memeperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota Persentase cakupan penanganan gangguan tibumtranmas Rasio Linmas per jumlah RT
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik	Persentase pendidikan politik masyarakat
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi Kerjasama Daerah)	Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan (Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama)
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan (Bag Kesra) Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
			zakat, infak, sodaqoh
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Seni Budaya yang diaktualisasikan
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Tema Dokumentasi Sejarah Lokal
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal	persentase peningkatan jumlah investor
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanamana Modal	realisasi investasi yang terlaporkan
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pekerja perempuan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja (TPAK)
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Strata Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani
	Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	persentase peningkatan produksi hasil perikanan olahan
			Persentase peningkatan produksi perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian/perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian/perkebunan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase peningkatan produksi peternakan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	persentase kenaikan PAD sektor pariwisata
			Persentase peningkatan promosi pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen (Persentase fasilitasi perlindungan konsumen)
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal
	Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase pekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yg memiliki sertifikasi kompetens
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan rencana tata ruang
			persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
			persentase jumlah jembatan kabupaten dalam

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
			kondisi mantap
			Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
			Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
			Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecepatan rata - rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
		Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni Presentase kawasan permukiman lingkungan yang layak
			Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks tutupan lahan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air Indeks kualitas udara IKLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase penanganan volume sampah
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegaitan yang memiliki izin

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup
	Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum}	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
			persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD
			Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu
			Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan bidang Pemsosbud Indeks kualitas perencanaan bidang Praswileksda Cakupan fasilitasi perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemsosbud Cakupan fasilitasi perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja bidang praswileksda
		Program Penelitian dan Pengembangan	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah
			Persentase peningkatan hasil kelitbangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Setda)	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi target PAD
		Program Pengelolaan Keuangan	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
			capaian realisasi pembayaran belanja PD
			rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan
			penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan
			penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan
			Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan Penyelesaian tahapan/proses
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material
			persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK
			persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti
			persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti
			Nilai rata-rata maturitas SPIP PD
			persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Program Prioritas	Indikator
			persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM
			persentase realisasi progres PMPRB
			Persentase PD dengan capaian Kinerja >90%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Elemen Kapabilitas Level 4
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media
		Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	Indeks SPBE Kebijakan Internal SPBE Layanan SPBE Tata Kelola SPBE
		Program Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan data statistik sektoral

Sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi lndikator Kinerja Utama (lKU) maupun lndikator Kinerja Kunci (lKK) pada akhir tahun perencanaan. Selain penetapan indikator, penentuan target menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu perencanaan agar dapat diukur ketercapaiannya. Atas uraian kesesuaian dan keselarasan prioritas Pembangunan daerah dengan program prioritas di Perangkat daerah, maka berikut kami sampaikan perbandingan target pada RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Tabel 4.6
Rumusan dan Target Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (Tingkat Program)

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	2	2
2.	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi	50	50
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang sudah bekerja	50	50
4.	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang terselesaikan	100	100
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	89	89
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil dan Menengah	-	0,3
7.	Program Pengembangan UMKM	Persentase perkembangan UMKM	6	6
8.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan IKM	0,4	0,4
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan pengelolaan pasar rakyat	95	95
		Kontribusi Pendapatan Pasar terhadap PAD	4,5	4,5

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana gudang SRG	10	10
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana rakyat	10	10
10.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	100	100
11.	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	persentase ketersediaan pangan utama	100	100
12.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan pangan	90	90
13.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan daerah rawan pangan	100	100
14.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	85	85
15.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial	100	100
		Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	85	85
16.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial Rasio PMKS	75 7,5	75 7,5
17.	Program Penanganan Bencana	Cakupan penanganan korban bencana alam/sosial	100	100

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
		Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100
18.	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Laju Pertumbuhan Penduduk	2,01	2,01
19.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif	72,00	72,00
20.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase penggunaan MKJP	14	14
21.	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A	101,80	101,80
		APK SMP/MTs/Paket B	114,75	114,75
		APK PAUD	90,00	90,00
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	102,27	102,27
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	103,19	103,19
		APK Pendidikan Kesetaraan	1,42	1,42
		APM SD/MI/Paket A	99,83	99,83
		APM SMP/MTs/Paket B	97,97	97,97
		Jumlah warga negara 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (SPM)	100%	100%
		Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	100%	100%
		Persentase sekolah terakreditasi A	74,36	74,36

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
		Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	95,52	95,52
		Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	95,10	95,10
		Persentase sarana prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	95,28	95,28
		Persentase sarana prasarana Pendidikan non formal dalam kondisi baik	90	90
		Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	38,00	38,00
		Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	70,00	70,00
		Rata - rata kemampuan Literasi SD	2,07	2,07
		Rata - rata kemampuan Numerasi SD	1,91	1,91
		Rata - rata kemampuan Literasi SMP	2,03	2,03
		Rata - rata kemampuan Numerasi SMP	1,99	1,99
22.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan pertahun Persentase ketersediaan bahan pustaka	9,4 73,58	9,4 73,58
23.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	92	92
24.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase organisasi pramuka yang aktif	100	100
25.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan BLUD	100	100

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
		Angka Kematian Ibu	52,78 per 100.000 KH	52,78 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	6,9 per 1000 KH	6,9 per 1000 KH
		Prevalensi stunting pada anak dibawah dua tahun	18,60	18,60
		Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100	100
		Cakupan desa/kelurahan UCI dan IDL	100	100
		Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100	100
		Persentase tercapainya ketersediaan sarpras pendukungnya	100	100
		Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan		
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100	100
26.	Program Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92,7	92,7
27.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana kefarmasian, alat Kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	100	100
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan desa siaga aktif	80	80
29.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif	96,36	96,36
30.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan Perda dan Perkada Jumlah warga negara yang memeperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota Persentase cakupan penanganan gangguan tibumtranmas Rasio Linmas per jumlah RT	85 100 100 1,34	85 100 100 1,34

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
31.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik	Persentase pendidikan politik masyarakat	100	100
32.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi Kerjasama Daerah)	Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan (Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama)	100	100
33.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan (Bag Kesra)	100	100
		Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100	100
34.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100	100
35.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Seni Budaya yang diaktualisasikan	62,5	62,5
36.	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Tema Dokumentasi Sejarah Lokal	1	1
37.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20	20
38.	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	100	100
39.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal	100	100
40.	Program Promosi Penanaman Modal	persentase peningkatan jumlah investor	10	10

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
41.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan	60 80	60 80
42.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanamana Modal	realisasi investasi yang terlaporkan	3,497 T	3,497 T
43.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100	100
44.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD	29	29
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,02	63,02
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	71,85	71,85
45.	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	100	100
46.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pekerja perempuan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja (TPAK)	89 71,85	89 71,85
47.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Strata Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nindya	Nindya
48.	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani	100	100
49.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	persentase peningkatan produksi perikanan	100	100
50.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	persentase peningkatan produksi hasil perikanan olahan	100	100

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
51.	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian	100	100
52.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	100	100
53.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase peningkatan produksi peternakan	100	100
54.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	100	100
55.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata	10	10
56.	Program Pemasaran Pariwisata	persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	14	14
		Persentase peningkatan promosi pariwisata	15	15
57.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	2
58.	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	1,657,570,000,000 Rupiah	1,657,570,000,000 Rupiah
59.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen (Persentase fasilitasi perlindungan konsumen)	95 20	95 20
60.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	70	70
61.	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	85	85
62.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	100	100
63.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100	100

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
64.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	66	66
65.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan	60	60
66.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase pekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan	60	60
67.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	89 91,07 92,83	89 91,07 92,83
68.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yg memiliki sertifikasi kompetens	50	50
69.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100	100
70.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecepatan rata - rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	40 km/jam	40 km/jam
		Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	90	90
71.	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,30	98,30
72.	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,02	0,02
73.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase kawasan permukiman lingkungan yang layak	99,14	99,14
74.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks tutupan lahan	60.85	60.85

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
75.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air Indeks kualitas udara IKLH	50,85 93,92 67,77	50,85 93,92 67,77
76.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8,20	8,20
77.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase penanganan volume sampah	72	72
78.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegaitan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50	50
79.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	25	25
80.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum}	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	85	85
81.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100
		persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100
		Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu	100	100
		Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan	100	100
		Persentase keterisian data/informasi	100	100

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
82.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan bidang Pemsosbud	100	100
		Indeks kualitas perencanaan bidang Praswileksda	100	100
		Cakupan fasilitasi perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemsosbud	100	100
		Cakupan fasilitasi perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja bidang praswileksda	100	100
83.	Program Penelitian dan Pengembangan	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	100	100
		Persentase peningkatan hasil kelitbangan	100	100
		Persentase penerapan hasil inovasi	100	100
84.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Setda)	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100	100
85.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi target PAD	100	100
86.	Program Pengelolaan Keuangan	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	100
		capaian realisasi pembayaran belanja PD	100	100
		rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan	100	100
		penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100	100
		penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan	100	100
		Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan Penyelesaian tahapan/proses	100	100

No.	Program Prioritas	Indikator	Target	
			2023	Perubahan 2023
87.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90	90
88.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100	100
		persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	100	100
		persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti	100	100
		persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100
		Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,5	3,5
		persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100
		persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	32,4	32,4
		persentase realisasi progres PMPRB	100	100
		Persentase PD dengan capaian Kinerja >90%	75	75
89.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Elemen Kapabilitas Level 4	50	50
90.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100	100
91.	Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	Indeks SPBE Kebijakan Internal SPBE Layanan SPBE Tata Kelola SPBE	2,87 3,06 3,03 2,43	2,87 3,06 3,03 2,43
92.	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100	100

Sebagaimana telah disampaikan pada subbab Pokok-pokok Pikiran DPRD, berikut disajikan daftar pokok-pokok pikiran DPRD masing-masing komisi sesuai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Perlu diinformasikan bahwa daftar usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan tambahan dan atau perbaikan atas usulan pada dokumen RKPD Tahun 2023. Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, merujuk pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023.

Tabel 4.7
Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Melanjutkan Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Miftahul Falah Desa Undaan Tengah Kec Undaan	1 paket	Undaan Tengah	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Undaan Tengah RT 03 RW 01 Kec Undaan	1 paket	Undaan Tengah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rehab Mushola Tarbiyatul Aulat Undaan Tengah Gang 6	1 paket	Undaan Tengah	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI
4	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Penataan Lapangan Sepak Bola dan Bola Voly Desa Kalirejo Kec Undaan	1 paket	Kalirejo	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
5	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Lapangan Voly Desa Medini Kec Undaan	1 paket	Medini	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rehab Gedung Mawaqiul Ulum Desa Medini Kec Undaan	1 paket	Medini	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI
7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rehabilitasi Masjid Jami' Baitul Muttaqin Desa Lambangan Kec Undaan	1 paket	Lambangan	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
9	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Jalan RT 01 RW 01 Desa Jurang Kec Gebog	1 paket	Jurang	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 125.000.000	VERIFIKASI
10	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Betonisasi Jalan Rw 4 Desa Gulang	1 paket	Gulang	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 45.000.000	VERIFIKASI
11	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Drainase Rt 8/4 Desa Gulang Kec. Mejobo	1 paket	Gulang	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
12	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kegiatan Kepemudaan DPD KNPI Kabupaten Kudus	1 paket	Kudus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
13	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Gedung Serbaguna desa Sambung	1 paket	Desa Sambung	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI
17	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PEMBANGUNAN PAGAR DAN AULA MAKAM KEMBAR MBAH HASAN MUJAHID RT 05/ RW 02	1 paket	Jl. Temulus - Jongso No. 01 Mejobo Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
19	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RA MUSLIMAT NU HIDAYATUS SHIBYAN	1 paket	Ds. Temulus RT.04/RW 04 Kec Mejobo Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
21	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	BANTUAN OPRASIOANL, MOBIL & KEGIATAN PEMBINAAN UNTUK BANOM NU BESERTA LEMBAGA NU (MWC NU, PC MUSLIMAT, PC ANSOR, PC IPPNU, LTMNU & LPBI NU)	1 paket	Jl. Pramuka No. 20 Wergu Wetan	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 550.000.000	VERIFIKASI
23	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	FESTIFAL LITERASI PMII KUDUS	1 paket	Kudus	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 50.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
24	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi di Media TV	1 paket	Kudus	SEKRETARIAT DPRD	Rp 25.000.000	VERIFIKASI
25	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi di Media Cetak	1 paket	Kudus	SEKRETARIAT DPRD	Rp 25.000.000	VERIFIKASI
26	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi di Media Online	1 paket	Kudus	SEKRETARIAT DPRD	Rp 25.000.000	VERIFIKASI
28	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pengecoran Jalan Rw 01 dan Rw 02 Desa Peganjaran Bae Kudus	1 paket	Desa Peganjaran Bae Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 200.000.000	VERIFIKASI
29	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pengaspalan Jalan Rt 06 dan Rt 07/ Rw 11 Desa Gondangmanis Bae Kudus	1 paket	Desa Gondangmanis Bae Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 200.000.000	VERIFIKASI
30	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Betonisasi JUT Blok Kudo Desa Jojo	1 paket	Desa Jojo Mejobo Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 200.000.000	VERIFIKASI
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehab Gedung Kelas 4,5,6 SD 1 Bae Kudus	1 paket	Desa Bae Kec. Bae Kudus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 200.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
34	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengaspalan Jalan Perumahan Megawon	1 paket	Megawon	DINAS PKPLH	Rp 200.000.000	VERIFIKASI
37	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wergu Wetan	1 paket	Desa Wergu Wetan	KOTA	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
41	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan gedung serbaguna desa Jetiskapuan	1 paket	desa Jetiskapuan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 300.000.000	VERIFIKASI
44	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Marka Jalan di Jalan Prambatan-Gribig Desa Gribig	1 paket	Desa Gribig, Kudus	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
46	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Monumen Gapura RW. 01 Desa Pasuruhan Lor	1 paket	RW. 01 Desa Pasuruhan Lor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 25.000.000	VERIFIKASI
51	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Pengecoran Jalan Gang 24 Desa Undaan Lor	1 paket	Gang 24 Desa Undaan Lor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
52	Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan Jalan Dukuh Kawa'an-Gringging	1 paket	Jalan Dukuh Kawa'an-Gringging	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 150.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
53	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	PEMBANGUNAN JUT BETONISASI JALAN BLOK PLOSO PETEK KELOMPOK TANI "SIDO SUBUR" DESA KANDANG MAS KECAMATAN DAWE KUDUS	1 paket	DESA KANDANG MAS KECAMATAN DAWE KUDUS	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
54	Rehab sedang/berat ruang kelas	rehab kelas SD 1 bulung cangkring	1 paket	bulung cangkring	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
55	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	RA AL KHURIYAH 02 BESITO	1 paket	Besito	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
68	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pembangunan Lanjutan MTs Sultan Agung Desa Golantepus Mejobo	1 paket	Desa Golantepus Mejobo	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
72	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Bantuan Dana Sarana dan Prasarana PAUD KB Dewi Hajar Kesambi	1 paket	Desa Kesambi RT.02 RW.01 Mejobo Kudus, Kab. Kudus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 20.000.000	VERIFIKASI
73	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah Diniyah DARUSSA'ADAH	1 paket	Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
75	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait	Pembangunan TPQ NU TARBIYATUL ATHFAL Desa Kesambi	1 paket	Dk. Jelak Desa Kesambi Mejobo Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 20.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
	Kesejahteraan Sosial						
77	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PEMBANGUNAN SALURAN TERSIER TAMBAK MOJO Desa Margorejo	1 paket	Dk. Gentungan RT.03 RW.11 Margorejo Dawe	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
78	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pagelaran Seni Budaya Ketoprak	1 paket	Lapangan Mrican Honggosoco	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	Rp 75.000.000	VERIFIKASI
79	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pagelaran Seni Budaya Ketoprak	1 paket	Lapangan Masin	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	Rp 75.000.000	VERIFIKASI
81	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Kedungdowo - Lingkar selatan (Lanjutan)	1 paket	Ruas Jalan Kedungdowo - Lingkar selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
82	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	PAGELARAN KETOPRAK	1 paket	KUDUS	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	Rp 60.000.000	VERIFIKASI
84	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pengecoran Jalan Gang X RT. 11/ RW. 02 Desa Garung Lor	1 paket	Jalan Desa Garung Lor Gang X RT. 11/ RW. 02, Kab. Kudus, Kaliwungu,	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 150.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
				Garung Lor			
85	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rehabilitasi Jalan Beton RW 07 Desa Karangbener Bae Kudus	1 paket	Desa Karangbener Kecamatan Bae, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI
86	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Sumur Air Bersih Di RT.01 RW.01 Desa Purworejo	1 paket	Desa Purworejo Kecamatan Bae Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
89	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bantuan Sarana Prasarana Pelatihan Bola Volly Desa Pasuruhan Kidul	1 paket	Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 25.000.000	VERIFIKASI
90	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Balai Pertemuan RW 01 Desa Jati Wetan, Kec. Jati	1 paket	RT 05 RW 1 Desa Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 75.000.000	VERIFIKASI
91	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Jalan Pemukiman Perumahan Singocandi	1 paket	Singocandi Kec. Kota Kab. Kudus	DINAS PKPLH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
94	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	PELESTARIAN BUDAYA TRADISIONAL PENTAS KARAWITAN	1 paket	Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Kab. Kudus	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	Rp 45.000.000	VERIFIKASI
99	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembuatan Konten dan Video Positif	1 paket	DINAS PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
101	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan kebangsaan	1 paket	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
104	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rehabilitasi Jalan Aspal RT.02, 03, 04, 05 RW.02 Desa Kaliputu Kudus	1 paket	Desa Kaliputu Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
105	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) DPC GERAM KUDUS	1 paket	Desa Gulang RT.04 RW.02 Mejobo Kudus	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 10.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
109	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembuatan Video Profil Desa Wisata di Kabupaten Kudus	1 paket	Komplek GOR, Jalan Wergu Wetan, Wergu Wetan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59318	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	Rp 5.000.000	VERIFIKASI
111	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alat Pengolahan Sampah di RW 01 Desa Jati Wetan	1 paket	Jati Wetan RW 01	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 20.000.000	VERIFIKASI
112	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Talud JUT Blok Gedangrejo	1 paket	Desa Ngemplak	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
113	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembuatan Lapangan Desa Wates (Lanjutan)	1 paket	Wates	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 75.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
114	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jalan & Saluran Air RT 4 & RW 6 Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo (Lanjutan)	1 paket	Wates	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 75.000.000	VERIFIKASI
115	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kesambi - Bulungcangkring (lanjutan)	1 paket	Jalan Kesambi - Bulungcangkring	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
116	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan dan Pengaspalan Jalan RW 3 Desa Dersalam	1 paket	RW 3 Desa Dersalam	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
118	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rehabilitasi kelas dan alat permainan edukatif (APE) RA KARMAINI Gondoharum	1 paket	Gondoharum	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 75.000.000	VERIFIKASI
119	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pembangunan gedung Madin Darulmuqomah Yayasan Pesanggrahan Keramat Desa Bulung Kulon	1 paket	Bulung Kulon	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 75.000.000	VERIFIKASI
120	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Hibah Musholla Thoriqul Iman Desa Jojo	1 paket	RT 5 RW 4	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
121	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pengurugan/Peninggian Makam/ TPU Desa Temulus Lor	1 paket	Temulus Lor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
123	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembuatan Talud di Sungai Si Pelem	1 paket	Blimbing Kidul	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 200.000.000	VERIFIKASI
124	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	1 paket	KUDUS	SEKRETARIAT DPRD	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
125	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi ruang kelas SD 7 Tanjungrejo	1 paket	Tanjungrejo RT 4 RW 3 Jekulo	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
126	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) MADRASAH MIFTAHUS SA'ADAH	1 paket	Bendaran Rt 06 Rw 02 Garung Kidul Kaliwungu Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 40.000.000	VERIFIKASI
127	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	HIBAH KEPADA YAYASAN MIFTAHUL MA'ARIF UNTUK PEMBANGUNAN PONPES MIFTAHUL MA'ARIF KALIWUNGU	1 paket	Jl. Balai Desa Kaliwungu Rt 07 Rw 01 Kaliwungu Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
128	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Renovasi Pembangunan PONDOK PESANTREN AL MU'THI Balai Tengahan Langgardalem Kudus	1 paket	Balai Tengahan 230 Langgardalem Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
129	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pembanguna Ruang Kelas Baru (RKB) RA NU NURUL HUDA Jetak Kedungdowo	1 paket	Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
138	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan lampu Penerangan Jalan Kampung Rt.04 Rw.01 Desa Undaan Lor	1 paket	Rt.04 Rw.01 Desa Undaan Lor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
139	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pengadaan Depot Air minum Isi Ulang Rt.01 Rw.01 Ds. Undaan Lor	1 paket	Rt.01 Rw.01 Ds. Undaan Lor Kec. Undaan kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 25.000.000	VERIFIKASI
140	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan kampung Rt.06 Rw.03 Ds. Undaan Lor	1 paket	Rt.06 Rw. 03 Ds. Undaan Lor Kec. Undaan Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 40.000.000	VERIFIKASI
141	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan tutup cor drainase Rt.06 Rw.05 Ds. Undaan Lor Kec. Undaan Kab. kudus	1 paket	Rt.06 Rw.05 Ds. Undaan Lor Kec. Undaan Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 35.000.000	VERIFIKASI
143	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bantuan Beasiswa kepada SALSABILLAH JULYANA	1 paket	Ds. Kutuk Rt 03 Rw 03 Undaan Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 6.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
144	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE	1 paket	Jl. Dr. LOEKMONO HADI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 150.000.000	VERIFIKASI
145	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pembangunan MASJID JAMI' AL-FATTAH Ds. Terban Kec.Jekulo Kab. Kudus	1 paket	Ds. Terban Kec. Jekulo Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
146	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pembangunan MASJID JAMI' BAITUL MA'MUR Ds. Bulungcangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus	1 paket	Rt 02 Rw 15 Dk. Karangrowo Ds. Bulungcangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
149	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pembangunan Gedung TPQ AL-ANWAR Ds. Gondoharum Kec. Jekulo Kab. Kudus	1 paket	Ds. Gondoharum Kec. Jekulo Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
150	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MA TAMRINUT THULAB Ds. Undaan Lor Kec. Undaan Kab. Kudus	1 paket	Ds. Undaan Lor Kec. Undaan Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
151	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MI NU TARBIYATUTH THULAB Ds. Payaman Kec. Mejobo Kab. Kudus	1 paket	Jl. Suryono Suryadi Rt 01 Rw 02 Ds. Payaman Kec. Mejobo Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 10.000.000	VERIFIKASI
152	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pembangunan Asrama PONPES AL-AMIN Ds. Temulus Kec. Mejobo Kab. Kudus	1 paket	Jl. Kinolojoyo 01 Ds. Temulus Rt 03 Rw. 03 Ds. Bulungcangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 40.000.000	VERIFIKASI
155	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembangunan Peninggian Jalan Lingkungan Rt 05,06 Rw 02 Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus	1 paket	Rt 05,06 Rw 02 Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 75.000.000	VERIFIKASI
156	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Hibah Alat/Mesin Produksi Pakan Ternak Kelompok Ternak SUMBER MAKMUR	1 paket	Ds. Kandangmas Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab. Kudus	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rp 75.000.000	VERIFIKASI
157	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Rw 02 Desa Japan Kec. Dawe Kab. Kudus	1 paket	Rw. 02 Ds. Japan Kec. Dawe Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 50.000.000	VERIFIKASI
158	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Hibah Bantuan Gedung / Perkantoran PAUD SIDOMAKMUR CRANGGANG	1 paket	Ds. Cranggang Kec. Dawe Kab. Kudus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 80.000.000	VERIFIKASI

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan	
160	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Lanjutan PAGAR MAKAM RW 1 Desa Jepang	1 paket	Jepang Pakis Rw 1 Kec. Jati Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI
161	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Lanjutan PAGAR MAKAM RW 2 Desa Jepang	1 paket	Jepang Pakis Rw 2 Kec. Jati Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI
162	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pengaspalan Jalan Rw 04 Desa Prambatan Kidul	1 paket	Ds. Prambatan Kidul Rw 04 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 200.000.000	VERIFIKASI
163	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Awaliyah Al ISLAM	1 paket	Sudimoro RT. 04 RW. 08 Desa Karangmalang, Kec. Gebog, Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 100.000.000	VERIFIKASI
						Rp 8.036.000.000	

Tabel 4.8 Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang ditolak pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
8	H. Masan, S.E, M.M	Bantuan Gedung JHK Kec. Mejobo		Mejobo	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak termasuk sarpras peribadatan
14	H. Masan, S.E, M.M	Hibah untuk Kegiatan Umroh di KBIH AROFAH 10 Orang (ke Pak H.Rinduwan)		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
15	H. Masan, S.E, M.M	Pembangunan Pagar Makam Umum Dukuh Piji Wetan Desa Lau Kec. Dawe		Dukuh Piji Wetan Desa Lau Kec. Dawe	-	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
16	H.MUKHASIRON, S.Ag	Hibah untuk Kegiatan Umroh di KBIH AROFAH 3 Orang		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
18	H.MUKHASIRON, S.Ag	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU, SMP IT ASSA'IDIYYAH		Jl. Mbah Hamzah Krapyak Kirig Mejobo Kudus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	TIDAK VERIFIKASI		Pagu Tidak Memadai, Timbul Permasalahan saat Pemeriksaan BPK
20	H.MUKHASIRON, S.Ag	PEMBANGUNAN RUANG KELAS TPQ NURUL HUDA		Ds. Terban RT. 03 RW 01 Jekulo Kuus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada RAB dan tanda tangan Camat
22	H.MUKHASIRON, S.Ag	PEMBANGUNAN GEDUNG MTS NU HASYIM ASY'ARI 2 KUDUS		Karangmalang	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Kop tidak sesuai akta notaris, tidak ada RAB dan tanda tangan Camat
27	H.MUKHASIRON, S.Ag	PEMBANGUNAN GEDUNG MA NU HASYIM ASY'ARI 2 KUDUS		Karangmalang	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
32	Hj. Tri Erna Sulistyawati, S.H	Renovasi Ruang Kelas Madrasah Dinyah Al Huda Golan Tepus Kec Mejobo		Desa Golan Tepus Kec Mejobo	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Proposal tidak lengkap, Kop panitia
33	Sulistyo Utomo, S.E	Umroh 6 Orang		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
35	Sulistyo Utomo, S.E	Pembangunan Saluran RW 03 Mlati Norowito		Mlati Norowito	KOTA	TIDAK VERIFIKASI		Tidak bisa dilaksanakan di perubahan

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
36	Sulistyo Utomo, S.E	Pengadaan LPJU Rw 03 Klaling Kec.Jekulo		Klaling	DINAS PERHUBUNGAN	TIDAK VERIFIKASI		PAGU TIDAK MEMADAI
38	Sulistyo Utomo, S.E	Pembangunan Drainase/Saluran Air RW 01 Jl RA Mlati Kelurahan Mlati Kidul		Mlati Kidul, Kota Kudus	KOTA	TIDAK VERIFIKASI		Tidak bisa dilaksanakan di perubahan
39	Sulistyo Utomo, S.E	Pembangunan Drainase/Saluran air Rw 1 Jl Dasima Kelurahan Mlati Kidul Kec. Kota		Mlati Kidul	KOTA	TIDAK VERIFIKASI		Tidak dapat dilaksanakan di perubahan 2023
40	Sulistyo Utomo, S.E	Betonisasi Jalan Rw 1Jl Dasima 1 Kelurahan Mlati Kidul kec . Kota		Mlati Kidul	KOTA	TIDAK VERIFIKASI		Tidak dapat dilaksanakan di perubahan 2023
42	H. RINDUWAN	PEMBANGUNAN SALURAN RT 5 RW 2 DESA LORAM KULON		RT 5 RW 2 DESA LORAM KULON	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
43	Ruston Harahap	Perbaikan Ruas Jalan Klumpit-Sudimoro Desa Karangmalang Gebog Kudus		Gebog Kudus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TIDAK VERIFIKASI		Dibatalkan
45	SUNARTO, SE	Pembangunan Tanggul Sabuk Penghalang Banjir Dukuh Goleng RW. 12 Desa Pasuruhan Lor		Dukuh Goleng RW. 12 Desa Pasuruhan Lor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
47	SUNARTO, SE	Pembangunan Rehabilitasi "Musholla Al-Muttaqin" Rt.03 Rw.02 Desa Ploso		Rt.03 Rw.02 Desa Ploso	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Sudah masuk di 2024
48	H. A. KHOIRIL BADAWI, M.Pd	Hibah untuk Kegiatan Umroh di KBIH AROFAH 2 ORANG		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
49	H. A. KHOIRIL BADAWI, M.Pd	Pengaspalan Jalan Dukuh Dau RW. 04 Desa Hadipolo Kudus		Hadipolo Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
50	Budiyono	Pengaspalan Jalan RT 11 RW 06 GONDANGMANIS BAE KUDUS		RT 11 RW 06 GONDANGMANIS BAE KUDUS	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
56	Anis Hidayat, M.H	Hibah untuk Kegiatan Umroh di KBIH AROFAH		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
57	Anis Hidayat, M.H	Pembangunan Pagar Makam Gembol Desa Cranggang Dawe		Desa Cranggang Dawe, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
58	Anis Hidayat, M.H	Pembangunan Pagar Makam Umum Dukuh Dimoro Desa Lau		Desa Lau Dawe Kudus, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
59	Anis Hidayat, M.H	Betonisasi Jalan RW.06 Desa Lau		Desa Lau RW 06 Dawe Kudus, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
60	Anis Hidayat, M.H	PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT.05 RW.02 DESA KANDANGMAS		Desa Kandangmas Dawe Kudus, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
61	Anis Hidayat, M.H	Betonisasi Jalan RT.02 RW.04 Desa Hadipolo		Desa Hadipolo Jekulo Kudus, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
62	Anis Hidayat, M.H	Pembangunan Talud Jalan RT. 5 dan RT.7 RW.3 Desa Soco		Desa Soco Dawe Kudus, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
63	Anis Hidayat, M.H	Pembangunan Masjid Roudlotul Jannah Kelurahan Mlatinorowito		Kelurahan Mlatinorowito GG.VI RT.02 RW.05 (Lorong Marina) Kec. Kota Kab. Kudus, Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal untuk 2023
64	Anis Hidayat, M.H	Pembangunan Masjid Jami' Baitul Mu'min Desa Soco Dawe		Dukuh Gerit RT.1 RW.1 Desa Soco Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal
65	Anis Hidayat, M.H	Pembangunan Masjid Sribu Umat		Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Proposal tidak ada pengesahan dari Kemenag
66	Anis Hidayat, M.H	Pembangunan Tempat Parkir Masjid Jami' Darussalam Desa Cendono RT.01 RW.01 Dawe		Desa Cendono RT.01 RW.01 Dawe Kabupaten Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Proposal tidak ada pengesahan dari Kemenag
67	Anis Hidayat, M.H	Pembangunan Pagar Makam Pojok Desa Piji		Piji Dawe Kudus	BADAN PENGELOLAAN	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
					PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
69	Anis Hidayat, M.H	Renovasi Madrasah Diniyah Al Huda Golantepus Mejobo Kudus		Desa Golantepus Mejobo	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Proposal harus pakai perkumpulan, bukan panitia
70	Anis Hidayat, M.H	Belanja alat / bahan kebutuhan kantor - cetak kalender kecamatan gebog		Kecamatan Gebog	KECAMATAN GEBOG	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
71	H. Sutejo, S.Pd.I	Hibah untuk kegiatan Umroh ke KBIH AROFAH (2 ORANG)		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
74	H. Sutejo, S.Pd.I	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Seneng Tani Kesambi		1 paket	Desa Kesambi Blok Tempel Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Kab. Kudus	TIDAK REKOMENDASI		Pagu tidak memadai untuk mencapai target penanganan
76	H. Sutejo, S.Pd.I	Pembangunan Pemasangan Talud Jalan Jojo - Kesambi		Desa Jojo - Desa Kesambi Mejobo Kudus, Kab. Kudus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TIDAK VERIFIKASI		Pagu tidak memadai untuk mencapai target penanganan
80	Achmad Yusuf Roni	Belanja Jasa Iklan/ Reklame di Media Cetak Regional		Jl Simpang Tujuh No 1 (BKPP KAB KUDUS)	BKPSDM	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
83	H. Noor Hadi, SH	SOSIALISASI EKRAF		KUDUS	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	TIDAK VERIFIKASI		Sudah ada alokasi di tahun 2024
87	Ulwan Hakim	Hibah untuk Kegiatan Umroh di KBIH AROFAH (3 ORANG)		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
88	Ulwan Hakim	MI AL HUDA 01 DESA PADURENAN		PADURENAN GEBOG KUDUS	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal
92	HM. Sutriyono, S.E., M.M	Hibah untuk Kegiatan Umroh di KBIH AROFAH 2 Orang		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
93	HM. Sutriyono, S.E., M.M	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK		Desa wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Kab. Kudus	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	TIDAK VERIFIKASI		Alokasi 2023 sudah mencukupi
95	Andrian Fernando	Betonisasi Jalan di RT 05, 04, 03 RW.01 Desa Ngembal Kulon Jati Kudus		DesaNgembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Usulan tahun 2024
96	Andrian Fernando	Pembangunan Sumur Resapan Desa Jati Wetan		Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Usulan tahun 2024
97	Andrian Fernando	Rehab Musholla Komplek Sport Center GOR		Komplek Gor Kudus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	TIDAK VERIFIKASI		Sudah masuk di 2024
98	Andrian Fernando	Perayaan Natal Badan Musyawarah Antar Gereja Tahun 2023		Jln. Getas Pejaten No.1a Kudus, Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal untuk 2023
100	Andrian Fernando	Pengadaan Seni Ketoprak		DINAS PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	TIDAK VERIFIKASI		Dibatalkan
102	Andrian Fernando	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU TPQ USWATUN HASANAH		DESA PASURUAN KIDUL KEC JATI KAB KUDUS, Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
103	Andrian Fernando	Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana SD WIDYA KIRANA Yayasan Elim Kudus		Jl. Pemuda No. 66 Kudus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	TIDAK VERIFIKASI		PAGU TIDAK MEMADAI
106	Andrian Fernando	PENGADAAN LAPANGAN TENIS MEJA DESA JATI WETAN		Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Usulan tahun 2024
107	Andrian Fernando	Pembangunan Marka Jalan			DINAS PERHUBUNGAN	TIDAK VERIFIKASI		Pagu tidak memadai untuk mencapai target penanganan
108	Andrian Fernando	Rehab Kios PKL dan Taman Selatan Musium Kretek		Jl. Getas Pejaten No.155, Getas Pejaten, Jati, Kabupaten Kudu s, Jawa Tengah 59343, Indonesia	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	TIDAK VERIFIKASI		Pagu tidak memadai untuk mencapai target penanganan
110	H. Rochim Sutopo, ST., MT	Hibah untuk Kegiatan Umroh di KBIH AROFAH 4 ORANG		Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Bukan prioritas pokir
117	Dedhy Prayogo, SE	Pembangunan sanitasi SD 3 Blimbing Kidul		Blimbing Kidul	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	TIDAK VERIFIKASI		Pagu tidak memadai untuk mencapai target penanganan
122	H. Sutiyo	Pengecoran Jalan Gang Mawar RT 03 RW 3 Desa Temulus		Temulus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada RAB
130	H. ALI IHSAN, S.Ag, MH	Pembangunan Jembatan Rt 8 Rw 2 Dukuh bendaran Desa Garung Kidul		Bendaran Garung Kidul Kaliwungu Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
131	H. ALI IHSAN, S.Ag, MH	Peningkatan Jalan Rt 6 Rw 2 Dukuh Bendaran Desa Garung Kidul		Bendaran Garung Kidul Kaliwungu Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
132	H. ALI IHSAN, S.Ag, MH	Peningkatan Jalan Rt 8 Rw 5 Dukuh Jettah Desa Kedungdowo		Rt 8 Rw 5 Dukuh Jetak Desa Kedugdowo	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
133	H. ALI IHSAN, S.Ag, MH	Pembuatan Pagar Makam Wetan Rt 3 Rw 4 Dukuh Jetak Desa Kedungdowo		Rt 3 Rw 4 Dukuh Jetak Desa Kedungdowo	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
134	H. ALI IHSAN, S.Ag, MH	Bantuan Sarana Pembangunan Ruang Kelas Baru MI NU ISLAMIYAH Gamong Kaliwungu kudus		1 paket	Ds. Gaamong, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus	TIDAK REKOMENDASI		sudah menerima TA. 2022
135	H. ALI IHSAN, S.Ag, MH	Hibah Kandang Ternak Komunal kepada kelompok GUNA PERKASA		Ds. Banget Kecamatan Kaliwungu	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
136	H. ALI IHSAN, S.Ag, MH	Hibah Kandang Ternak Komunal Kepada kelompok Ternak BUMI AJI BUDOYO Papringan Kaliwungu Kudus		Dukuh Kencing Papringan Kaliwungu Kudus	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
137	H. ALI IHSAN, S.Ag, MH	Hibah Lele Kepada kelompok Tani SUMBER MAKMUR Kedungdowo Kaliwungu Kudus		Ds. Kedungdowo Kec. Kaliwungu kab. Kudus	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
142	Ngateman, S.Pd	Bantuan Pembangunan Masjid Baitur Rohim Desa Kutuk Kec. Undaan		Desa Kutuk, RT 03 RW 02 Kec. Undaan, Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi SKPD	Status	Keterangan Penolakan
147	Drs. H. Ilwani	Pembangunan MASJID BAITUR ROHMAN		Rt 01 Rw 04 Ds. Terban Kec. Jekulo Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal
148	Drs. H. Ilwani	Renovasi MUSHOLLA NURUL HUDA Ds. Bulungcangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus		Rt 05 Rw 10 Ds. Bulungcangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal
153	Susanto	Pembangunan Halaman Masjid BAITUR ROHMAN Gondangmanis		Ds. Gondangmanis Kec. Bae Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Belum ada proposal
154	Susanto	Pembangunan Drainase Lingkungan Rw 10 Jepang Mejobo		Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Tidak ada proposal
159	Zaenal Arifin, ST	Pembangunan Musholla Hidayatul Muttaqin		Ds. Dukuhwaringin Kec. Dawe Kab. Kudus	SEKRETARIAT DAERAH	TIDAK VERIFIKASI		Proposal tidak ada surat pengesahan dari Kemenag

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023

Perbandingan Struktur Keuangan pada RKPD Tahun 2023, APBD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Struktur Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

KODE	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**410.998.331.000**	**429.654.851.000**	**473.091.698.000**
4.1.01	Pajak Daerah	162.510.725.000	172.510.725.000	174.288.764.000
4.1.02	Retribusi Daerah	26.196.000.000	31.847.520.000	31.303.382.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.028.327.000	8.028.327.000	9.971.340.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214.263.279.000	217.268.279.000	257.528.212.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.318.163.257.000**	**1.628.282.814.140**	**1.757.098.959.370**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.144.806.286.000	1.437.590.146.140	1.552.281.652.570
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.356.971.000	190.692.668.000	204.817.306.800
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**2.700.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	2.700.000.000
	Jumlah Pendapatan	**1.729.161.588.000**	**2.057.937.665.140**	**2.232.890.657.370**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.456.802.022.564**	**1.676.011.431.622**	**1.903.285.874.627**
5.1.01	Belanja Pegawai	864.614.800.420	963.209.686.822	979.580.931.227
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.296.919.784	617.061.202.160	772.612.184.760
5.1.05	Belanja Hibah	55.420.152.360	93.358.152.640	148.566.945.640
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.470.150.000	2.382.390.000	2.525.813.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**128.440.524.366**	**289.520.540.003**	**429.398.119.629**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.587.000.000	5.643.330.800	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.928.527.400	66.147.297.500	137.193.501.375
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.494.770.530	130.493.751.867	125.458.601.889
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.181.716.436	86.788.189.836	161.498.359.165
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	248.510.000	247.970.000	4.997.657.200
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	200.000.000	250.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.000.000.000**	**9.074.820.445**	**12.660.432.210**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	9.074.820.445	12.660.432.210
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**278.690.057.000**	**270.146.157.000**	**275.758.961.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.870.673.000	20.436.325.000	20.614.129.000

KODE	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.819.384.000	249.709.832.000	255.144.832.000
	Jumlah Belanja	**1.867.932.603.930**	**2.244.752.949.070**	**2.621.103.387.466**
	Total Surplus/(Defisit)	**-138.771.015.930**	**-186.815.283.930**	**-388.212.730.096**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**138.771.015.930**	**186.815.283.930**	**390.912.730.096**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.771.015.930	186.815.283.930	390.912.730.096
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**138.771.015.930**	**186.815.283.930**	**390.912.730.096**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**2.700.000.000**
	Penyertaan Modal Daerah	0	0	2.700.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**0**	**2.700.000.000**
	Pembiayaan Netto	**138.771.015.930**	**186.815.283.930**	**388.212.730.096**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPPKAD Kudus, 2023

5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023

Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum yang di dalamnya terdapat 92 rencana program prioritas. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing uraian dimutakhirkan menyesuaikan peraturan tersebut. Dengan adanya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang merupakan *update* dari Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, menyebabkan perbedaan indikator program pada RKPD dengan indikator program pada RPJMD. Selain itu terkait amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta urusan sosial, agar memasukkan indikator SPM dalam indikator program pada RKPD. Hal ini menyebabkan adanya beberapa indikator program pada RKPD yang tidak tercantum dalam indikator program pada RPJMD. Berikut ini diuraikan program yang akan dilaksanakan pada Perubahan RKPD tahun 2023.

5.2.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1 Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Pendidikan yang mencakup kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar difokuskan pada Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk honorarium guru swasta non PNS, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sebanyak, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan Fasilitasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama fokus pada Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk Honararium Kesejahteraan Guru non ASN; Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan Fasilitasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diarahkan untuk Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD untuk Tunjangan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan guru PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diarahkan pada Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan. Indikator program ini adalah :

- APK SD/MI/Paket A 101,80
- APK SMP/MTs/Paket B 114,75
- APK PAUD 90,00
- Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun 102,27
- Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun 103,19

- APK Pendidikan Kesetaraan 1,42
- APM SD/MI/Paket A 99,83
- APM SMP/MTs/Paket B 97,97
- Jumlah warga negara 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (SPM) 100%
- Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) 100%
- Persentase sekolah terakreditasi A 74,36
- Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi 95,52
- Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi 95,10
- Persentase sarana prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik 95,28
- Persentase sarana prasarana Pendidikan non formal dalam kondisi baik 90
- Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik 38,00
- Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik 70,00
- Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SPM) :
  - Rata - rata kemampuan Literasi SD 2,07
  - Rata - rata kemampuan Numerasi SD 1,91
  - Rata - rata kemampuan Literasi SMP 2,03
  - Rata - rata kemampuan Numerasi SMP 1,99.

5.2.1.2 Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, urusan Kesehatan akan melaksanakan program prioritas sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Progam ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan

Obat, Vaksin. Selanjutnya untuk Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mencakup Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk seluruh warga kudus; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut. Kemudian untuk kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi diarahkan untuk Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet. Serta pada kegitan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota akan fokus pada Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; dan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Indikator program ini adalah :

- Cakupan pelayanan BLUD 100%
- Angka Kematian Ibu 52,78 per 100.000 KH
- Angka Kematian Bayi 6,9 per 1000 KH
- Prevalensi stunting pada anak dibawah dua tahun 18,60
- Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan 100%
- Cakupan desa/kelurahan UCI dan IDL 100%
- Cakupan pelayanan pengendalian penyakit 100%
- Persentase tercapainya ketersediaan sarpras pendukungnya 100%
- Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100%.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan 92,7%.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini meliputi kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan

(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan. Untuk kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga fokus pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Selanjutnya kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) fokus pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM). Kemudian pada kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan fokus pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan. Indikator program ini adalah Persentase sarana kefarmasian, alat Kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar 100%.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini meliputi kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. Kemudian kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Indikator program ini adalah Cakupan desa siaga aktif 80%.

5.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) mencakup kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai meliputi penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing saluran irigasi dan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir. Sedangkan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Primer. Indikator program ini adalah Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 85%.
b. Program Penyelenggaraan Jalan mencakup kegiatan Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan dan pemeliharaan alat berat untuk kesiapan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat. Indikator program ini adalah :
   - Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 92,83%.
   - Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap 91,07%.
   - Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik 89%.
c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi kegiatan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat. Indikator program ini adalah Persentase penduduk berakses air minum 100%.
d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah meliputi kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Operasi Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Indikator program ini adalah Persentase rumah tinggal bersanitasi 100%.
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase. Indikator program ini adalah Persentase drainase dalam kondisi baik 66,00%.

f. Program Penataan Bangunan Gedung meliputi kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG sebanyak 1 dokumen, kegiatan Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota kegiatan penyusuna dokumen Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan 60%.
g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase ketaatan rencana tata ruang 100%.
h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi. Indikator program ini adalah Rasio tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 50%.
i. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase pekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan 60%.

5.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai Berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan mencakup kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebanyak 1dokumen, kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Indikator program ini adalah:
   - Cakupan ketersediaan rumah layak huni 98,30%.
   - Jumlah warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni 100%.
   - Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang

memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100%.

b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencakup kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Indikator program ini adalah:
   - Persentase PSU dalam kondisi baik 99,14%.
   - Presentase kawasan permukiman lingkungan yang layak 99,14%.

c. Program Kawasan Permukiman mencakup kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Indikator program ini adalah Persentase lingkungan permukiman kumuh 0,02%.

5.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diarahkan pada Penanganan Gangguan Trantibum serta Penegakan Perda melalui Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Pengamanan sebanyak 62 orang, patroli pengamanan Tibum Tranmas, Apel Siaga Pemilu dan Pilkada, serta operasi penegakan Perda dan Perkada. Indikator program ini adalah:

- Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas 80%.
- Cakupan penegakan perda dan perkada 85%.
- Rasio Linmas per Jumlah RT 1,34.
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota 100%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran diarahkan pada Penilaian Sarpras Proteksi Kebakaran dan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran melalui Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 26 orang. Indikator program ini adalah:
   - Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten 86%.
   - Cakupan penanganan penyelamatan non kebakaran kabupeten 100%.
   - Tingkat waktu tanggap (response time rate) 7 menit.
   - Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standard kualifikasi 100%.
   - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%.

b. Program Penanggulangan Bencana diarahkan pada Pelayananan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Informasi

Bencana dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana. Indikator program ini adalah:

- Cakupan penanggulangan bencana sesuai standard 100%.
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100%
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%
- Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%.

5.2.1.6 Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini fokus pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar 85%.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini meliputi kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melaksanakan Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Permakanan; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemberian Layanan Kedaruratan; dan Penyediaan Sandang. Sedangkan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial melaksanakan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota dan Pemberian Layanan Kedaruratan. Indikator program ini adalah:

- Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial 100%.
- Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar 85%.
- Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar social 80%.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini fokus pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan

melaksanakan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :

- Persentase Keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial 75%
- Rasio PMKS 7,5%.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini fokus pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial. Indikator program ini adalah :

- Cakupan penanganan korban bencana alam/sosial 100%.
- Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten. Indikator program ini adalah persentase TMP terpelihara 100%.

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.2.1 Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja berupa kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro. Indikator program ini adalah Persentase Perusahaan yang telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja 2%.
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mencakup kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Indikator program ini adalah Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi 50%.
c. Program Hubungan Industrial mencakup kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase kasus yang terselesaikan 100%.
d. Program Penempatan Tenaga Kerja mencakup kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dan

kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI). Indikator program ini adalah Persentase pencari kerja yang sudah bekerja 50%.

5.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG. Sedangkan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :

- Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD 29%
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 63,02
- Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja 71,85%.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan melaksanakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Fokus kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan adalah penyusunan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melakukan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu 100%.

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini fokus pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:
   - Persentase pekerja perempuan 89%
   - Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja (TPAK) 71,85%.

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang menjadi fokus adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Kemudian untuk kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota melaksanakan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Strata Kabupaten Layak Anak (KLA) Nindya.

e. Program Perlindungan Khusus Anak
Pada Program Perlindungan Khusus Anak ini fokus pada kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani 100%.

5.2.2.3 Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan berupa kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan. Indikator program ini adalah:
   - Persentase peningkatan sarpras lumbung pangan 100%.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan berupa kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota pada 9 kecamatan. Indikator program ini adalah Persentase penanganan daerah rawan pangan 100%.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan berupa kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase keamanan pangan 90%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mencakup kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan pangan utama 100%.

5.2.2.4 Pertanahan

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase luas tanah bersertifikat 74,84%.
b. Program Penatagunaan Tanah dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase penyelesaian administrasi pertanahan 74,84%.

5.2.2.5 Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup mencakup kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, embuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Indikator program ini adalah:
   - Indeks tutupan lahan 60,85%.
   - Persentase Dokumen Kebijakan Lingkungan Hidup sesuai Standar 100%.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup mencakup kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan kegiatan Pengelolaan

Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota masing – masing 1 dokumen. Indikator program ini adalah:

- Indeks kualitas air 50,85
- Indeks kualitas udara 93,92
- Indeks kualitas lingkungan hidup 67,77
- Indeks kualitas lahan 60,85
- Persentase dokumen laporan pengelolaan lingkungan yang disusun sesuai standar 100%.

c. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berupa kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50%.

d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat mencakup kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Indikator program ini adalah Presentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup 25%.

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) berupa kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3. Indikator program ini adalah:

- Persentase penanganan volume sampah 72%.
- Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 48,48%.

f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mencakup kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Indikator program ini adalah Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) 8,20%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup berupa kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Presentase Pengaduan masyarakat terkait persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti 100%.

a. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat berupa kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Indikator pro gram

ini adalah Persentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi 50%.

b. Program Pengelolaan Persampahan mencakup kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase penanganan volume sampah 72%.

5.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk.

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk menjadi fokus program Pendaftaran Penduduk dengan melaksanakan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Indikator program ini adalah Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 100%.

b. Program Pencatatan Sipil.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil. Indikator program ini adalah Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 100%.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .

Kegiatan yang dilaksanakan oleh program ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Indikator program ini adalah Cakupan pengeloaan database kependudukan 100%.

5.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini adalah Penyelenggaraan Penataan Desa dengan melaksanakan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa. Indikator program ini adalah:

- Meningkatnya penatan desa 123 desa.
- Persentase pelaksanaan TMMD/Karya Bhakti 123 desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa.

Program Peningkatan Kerjasama Desa melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa melalui Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Indikator program ini adalah:

- Meningkatnya kerjasama desa 2 produk hukum
- Persentase peningkatan kawasan perdesaan 2 produk hukum

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada program Administrasi Pemerintahan Desa meliputi: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Fasilitasi Penyusunan Profil Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan; Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD; Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa. Indikator program ini adalah:

- Cakupan administrasi pemerintahan desa 15 dokumen
- Persentase desa yang bermasalah 15 dokumen
- Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan desa 15 dokumen

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi: Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Indikator program ini adalah

- Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Berjalan sesuai regulasi 100%.
- Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi 100%.
- Prosentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa 100%.

5.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengendalian Penduduk.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk diarahkan dengan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK). Sedangkan untuk kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Indikator program ini adalah:

- Total Fertility Rate (TFR) 2,01
- Laju Pertumbuhan Penduduk 1%

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

Pada Program ini mengarah pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; dan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dilaksanakan dengan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK. Sedangkan kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota melakukan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Indikator program ini adalah Cakupan peserta KB aktif 72,00%.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Untuk Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) hanya fokus untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan melaksanakan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Indikator program ini adalah:

- Persentase penggunaan MKJP 14%.
- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) 14,50%.

5.2.2.9 Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mencakup kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:

- Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan 40 km/jam
- Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan 90%.

5.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Mendukung prioritas pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, rencana program prioritas yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media sebesar 100%.
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

   Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:

   - Indeks SPBE 2,87
   - Kebijakan Internal SPBE 3,06
   - Layanan SPBE 3,03
   - Tata Kelola SPBE 2,43.

5.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian berupa kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Indikator program ini adalah Persentase koperasi aktif 89%.
b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) mencakup kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Indikator program ini adalah Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil dan Menengah 0,3%.
c. Program Pengembangan UMKM berupa kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Indikator program ini adalah Persentase pengembangan UMKM 6%.

5.2.2.12 Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan iklim penanaman modal mencakup kegiatan harmonisasi kebijakan penanaman modal terutama dalam pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dengan kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota. Indikator program ini adalah Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal sebesar 100 %.
b. Program Promosi Penanaman Modal mencakup kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dengan target sasaran penyusunan peraturan pedoman promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kegiatan promosi penamanan modal. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan jumlah investor sebesar 10%.
c. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mengutamakan kegiatan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta penyelenggaran pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik. Indikator program ini adalah Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis sebesar 100 %.
d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan sinkronisasi dan koordinasi realisasi investasi penamanan modal dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Indikator program ini adalah Realisasi investasi yang terlaporkan sebesar 3,497 Trilyun.

e. Program Pelayanan Penanaman Modal mendukung pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator program ini adalah:
   - Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan 60%.
   - Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan 80%.

5.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
   Mencakup kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Presentase organisasi pemuda yang aktif 96,36%.
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
   Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing keolahragaan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. Indikator program ini adalah Cakupan pembinaan olahraga 92%.
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
   Program ini melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dan fokus pada Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah. Indikator program ini adalah Presentase organisasi pramuka yang aktif 100%.

5.2.2.14 Statistik

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Indikator program ini adalah Cakupan pelayanan data statistik sektoral 100%.

5.2.2.15 Persandian

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian 24%.

5.2.2.16 Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program pengembangan kebudayaan berupa kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Indikator program ini adalah Persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan 62,5%.
b. Program Pembinaan Sejarah berupa kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah. Indikator program ini adalah Jumlah Tema Dokumentasi Sejarah Lokal 1 tema.
c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mencakup kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, penetapan Cagar Budaya dan kegiatan Pelindungan Cagar Budaya sebanyak. Indikator program ini adalah Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 20%.
d. Program Pengelolaan Permuseuman berupa kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum sebanyak 10 unit. Indikator program ini adalah Persentase Museum Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola 100%.

5.2.2.17 Perpustakaan

Urusan perpustakaan mendukung prioritas penguatan daya saing daerah dengan fokus peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai kelompok sasaran layanan perpustakaan.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan melalui kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas pembinaan dan pendampingan akreditasi perpustakaan sesuai standar nasional, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial bersinergi dengan komunitas / relawan literasi untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, serta penambahan koleksi bahan pustaka. Indikator program ini adalah:

- Persentase pengunjung perpustakaan pertahun 9,4%
- Persentase ketersediaan bahan pustaka 73,58%.

5.2.2.18 Kearsipan

Urusan kearsipan mendukung penguatan daya saing daerah dengan fokus tatakelola arsip untuk ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip, melalui kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota. aktivitas difokuskan pada perlindungan dan penyelamatan arsip dengan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis. Indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip 32,00%.

5.2.3 Urusan Pilihan

5.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan budidaya Perikanan dan sekolah lapang dan bantuan hibah sarpras budidaya perikanan. Untuk kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dilakukan melalui penangkaran benih ikan.

   Program ini diarahkan untuk pencapaian Indikator Persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 100%.

b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan, Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok (POKDAKAN/POKLAHSAR) di 9 kecamatan dan Sosialisasi GEMARIKAN. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator:
   - Persentase peningkatan produksi perikanan olahan 100%.

5.2.3.2 Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, mencakup kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata 10%.

b. Program Pemasaran Pariwisata, berupa kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. Indikator program ini adalah:
   - Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata 14%.
   - Persentase peningkatan promosi pariwisata 15%.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Indikator program ini

adalah Persentase pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2%.

5.2.3.3 Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian berupa kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:
   - Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian 100%.
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mencakup kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian sebanyak 1 dokumen dan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sebanyak 30 unit. Indikator program ini adalah:
   - Persentase peninglatan penyediaan prasarana pertanian 100%.
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mencakup kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan produksi peternakan 100%.
d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian berupa kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan seluas 106 Ha. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian / perkebunan 100%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyuluhan Pertanian berupa kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Indikator program ini adalah persentase peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan pengetahuan maupun teknologi pertanian 100%.

5.2.3.4 Kehutanan

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya berupa kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:

- Persentase tutupan lahan 0,48%.
- Persentase tutupan lahan Tahura 15%.

5.2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan berupa kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral 100%.

5.2.3.6 Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan berupa penyediaan sarana distribusi perdagangan yaitu revitalisasi sederhana sebagian bangunan pasar yang rusak berat, dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Kegiatan lainnya yaitu Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu:
   - Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD 4,50 %.
   - Cakupan pengelolaan pasar rakyat 95%.
   - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana gudang SRG 10%.
   - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar rakyat 10%.
b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar berupa pemantauan harga dan stok barang tersebut pada pasar rakyat yang laporannya terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui operasi pasar reguler dan pasar khusus yang akan berdampak pada 1 (satu) kabupaten. Kegiatan lainnya yaitu pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tingkat kabupaten melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, pengawasan pengadaannya dan pengawasan penyaluran serta penggunaanya. Semua itu dilakukan dengan operasi secara berkala dan operasi gabungan secara insidental. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi 100%.
c. Program Pengembangan Ekspor. Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan kabupaten berupa pembinaan dan pengembangan usaha

produk ekspor unggulan kabupaten serta peningkatan citra produk ekspor dalam pameran tingkat nasional dan provinsi. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu Nilai ekspor sebesar Rp. 1.657.570.000.000,-.

d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya sehingga diperlukan juga pengadaan dan pemeliharaan alat dan bahannya, serta pengawasan atau penyuluhan metrologi legal melalui pembinaan pelaku usahanya. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu:
   - Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen 95%.
   - Persentase fasilitasi perlindungan konsumen 20%.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui pelaksanaan promosi produk dalam negeri tingkat kabupaten berupa 'DANDANGAN' dan peningkatan atau pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Program ini dalam rangka mencapai Indikator kinerja yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 70%.

5.2.3.7 Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mencakup kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase pertumbuhan IKM 0,40%.

5.2.3.8 Transmigrasi

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi berupa kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase calon transmigran yang terfasilitasi 25%.

5.2.4 Unsur Pendukung

5.2.4.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan fungsi staf dalam konsep suatu organisasi. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 asisten. Dalam menjalankan fungsi staf, Sekretariat Daerah melaksanakan program prioritas meliputi:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :
   - Indeks Kepuasan Masyarakat 85%.
   - Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah 100%

- Nilai akuntabilitas kinerja 83
- Indeks Reformasi Birokrasi 90
- Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi 100%
- Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 100%.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Indikator program ini adalah :
   - Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan 100%.
   - Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan 97%.
   - Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda 90%
   - Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan 100%
   - Persentase fasilitasi Kerjasama 100%
   - Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan 90%
   - Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh 100%

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Perekonomian dan Pembangunan. Indikator program ini antara lain:
- Persentase pelaksanaan barang dan jasa 90%
- Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu 90%
- persentase pelaksanaan rekomendasi TPID 85%.
- Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD 85%.

5.2.4.2 Sekretariat DPRD

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan yaitu Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meliputi kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; dan Fasilitasi Tugas DPRD. Untuk kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD melaksanakan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik. Selanjutnya kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran fokus pada Pembahasan APBD. Kemudian kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan fokus untuk Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Dilanjutkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dilaksnakan Pendalaman Tugas DPRD; Publikasi dan Dokumentasi Dewan; Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi. Untuk mendukung kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan Kunjungan Kerja dalam Daerah dan Pelaksanaan Reses. Sedangkan untuk kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dilakukan Pengawasan Kode Etik anggota DPRD. Dan terakhir kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. Indikator program ini adalah:

- Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi 100%
- Persentase kegiatanDPRD yang dipublikasikan 100%
- PersentasePelaksanaan ProgramKerja DPRD yang telah disahkan 100%
- Presentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda 100%.

5.2.5 Unsur Penunjang

5.2.5.1 Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mencakup kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah. Indikator program ini adalah :
   - Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu 100%;
   - Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan 100%;
   - Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100%;
   - Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100%;
   - Persentase keterisian data/Informasi 65%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Indikator program ini adalah:
   - Indeks kualitas perencanaan bidang Pemsosbud 100%
   - Indeks kualitas perencanaan bidang Praswil, Ekonomi dan SDA 100%.

- Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan soslial budaya 100%
- Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam 100%.

5.2.5.2 Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator program ini adalah :
   - Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 100%.
   - Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 100%.
   - Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan 100%.
   - Capaian realisasi pembayaran belanja PD 100%.
   - penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan 100%.
   - Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan Penyelesaian tahapan/proses 100%.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator program ini adalah Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah 90%.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah mencakup Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Indikator program ini adalah Persentase Realisasi target PAD 100%.

5.2.5.3 Kepegawaian

Rencana program penunjang yang akan dilaksanakan hanya akan fokus kepada Program Kepegawaian Daerah. Dalam program ini akan dilaksnakan beberapa kegiatan meliputi : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN akan mencakup Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. Selanjutnya untuk kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dilaksanakan Pengelolaan Promosi ASN; Pengelolaan Kenaikan

Pangkat ASN; dan Pengelolaan Mutasi ASN. Kemudian pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN fokus Pembinaan Jabatan Fungsional ASN. Serta kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur meliputi Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pembinaan Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai; dan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Indikator program ini adalah:

- Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar 100%
- Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku 100%
- Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian 95%
- Persentase system informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG Poin Penilaian Mandiri 100%
- Merit Sistem Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karier, Mutasi Rotasi dan Promosi, Pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan, Sistem Pendukung 220,5

5.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program penunjang yang akan dilaksanakan urusan Pendidikan dan Pelatihan yaitu Program Pengembangan Sumberdaya Manusia yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis; dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dilaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Sedangkan untuk kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional akan dilaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Indikator program ini adalah:

- Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun 46%
- Persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi 15%
- Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Peningkatan Kompetensi 15.

5.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi

kegiatan penelitan dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dan pengembangan inovasi dan teknologi. Indikator program ini adalah:

- Persentase peningkatan hasil kelitbangan 100%.
- Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah 100%.
- Persentase penerapan hasil inovasi 100%.

5.2.6 Unsur Pengawasan

5.2.6.1 Inspektorat

Inspektorat sebagai unsur pengawasan memiliki peran strategis dalam mengawal efektif dan efisiennya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kudus. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, aktivitas inti kegiatan yang dilakukan meliputi *assurance dan consulting.* Pendampingan, asistensi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, SPIP, Pencanangan Zona Integritas, WBM, WBBK dilakukan untuk mencapai target bersihnya penyimpangan atas pengelolaan keuangan dan asset yang bersifat material oleh Perangkat Daerah, menindaklanjuti aduan masyarakat atas pungli, gratifikasi dan aduan lainnya. Serta dalam upaya pencegahan korupsi, berkoordinasi dan disupervisi oleh KPK. Indikator program ini adalah:
   - Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material 100%
   - Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK 100%
   - Persentase aduan pungli yang selesai ditindak lanjuti 100%
   - Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti 100%
   - Nilai rata-rata maturitas SPIP PD 3,5
   - Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti 100%
   - Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM 32,4%
   - Persentase realisasi progres PMPRB 100%
   - Persentase PD dengan capaian Kinerja >90% sebesar 75%.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   Program ini dilaksanakan melalui kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, serta kegiatan pendampingan dan asistensi. Indikator program ini adalah Persentase Elemen Kapabilitas Level 4 sebesar 50%.

5.2.7 Unsur Kewilayahan

5.2.7.1 Kecamatan

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
   Program ini melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan prioritas Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Indikator program ini adalah Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100%.
b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
   Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan fokus pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan melaksanakan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Indikator program ini adalah Cakupan Kegiatan Pemerdayaan Desa/Kelurahan 100%.
c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
   Program ini melaksanakan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan fokus kepada Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Indikator program ini adalah Cakupan kegiatan koordinasi Trantibum 100%.
d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
   Dalam rangka pelaksanaan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum maka dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah melalui Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator program ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100%.
e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
   Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan meliputi : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; dan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa. Indikator program ini adalah Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100%.

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

5.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam upaya mendukung prioritas pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, urusan kesatuan bangsa dan politik akan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Melaksanakan aktivitas antara lain: pendidikan politik kepada masyarakat, Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk tahapan Pilkada di tahun 2023, serta Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Indikator program ini adalah
   1. Persentase pendidikan politik masyarakat 100%.
   2. Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 86%
b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain fasilitasi penanganan konflik, serta harmonisasi Forkompinda dan forkopimcam, rakor fasilitasi permasalahan, fasilitasi bagi Anggota FKDM, Anggota TKPD, TTPKS. Adapun indikator program ini adalah persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Melaksanakan aktivitas penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat yang meliputi Sosialisasi Wasbang dan PPBN, Fasilitasi Paskibraka, Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan dan hari-hari besar lainnya. Indikator program ini persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%.
b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Melaksanakan aktivitas pembinaan ormas dan LSM melalui sosialisasi dan rapat koordinasi. Indikator program ini adalah persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 100%.
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Melaksanakan aktivitas pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama serta pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Pembinaan P4GN dan Tes Urin Para Pejabat Eselon III, Pembinaan PAKEM, Honor Tim Pengurus FKUB, Honor Tim Pegurus PAKEM, serta Sosialisasi. Indikator program ini adalah persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:

- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 85%.

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kudus. Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2023.

BUPATI KUDUS,

H A R T O P O